

**MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI
KABUPATEN SERANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Administrasi Publik



Oleh :

SANTI NURMAYANTI

NIM 6661121331

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

SERANG, APRIL 2018

ABSTRAK

Santi Nurmayanti. 6661121331. Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I : Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dosen Pembimbing II : Riswanda, P.hD.

Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang. Permasalahannya adalah motivasi usaha yang dimiliki kelompok usaha tidak konsisten, kurangnya pengawasan atau SDM di Dinas Sosial, permohonan proposal KUBE tidak sebanding dengan target yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, dan kurangnya pemahaman fakir miskin tentang cara membuat proposal dan laporan evaluasi usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen strategi Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Serang. Dengan menggunakan teori manajemen strategi oleh Glueck dan Jauch dalam Saladin (2003:4) yaitu analisis dan diagnosis, perumusan, implementasi, dan evaluasi; menggunakan metode eksploratif dan pendekatan kualitatif dengan model analisis Miles dan Huberman. Ditemukan hasil penelitian bahwa manajemen strategi Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Serang ialah membuat perencanaan dan penganggaran program, memberikan pelatihan usaha dan bantuan dana serta melakukan evaluasi. Beberapa kendala yaitu proses analisis dan perumusan strategi diputuskan oleh pegawai yang bertanggung jawab terhadap program KUBE saja, pengaturan dana setiap tahunnya tidak pasti, pelatihan terkait KUBE hanya dilakukan satu kali, dan evaluasi diadakan satu kali dengan menerima LPJ usaha dari TKSK. Rekomendasinya adalah lebih mematangkan proses perumusan strategi dan melakukan perekrutan pegawai agar tidak rangkap jabatan.

Kata Kunci : Manajemen Strategi, Pemberdayaan Fakir Miskin, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

ABSTRACT

Santi Nurmayanti. 6661121331. The Strategy Management of Social Service's in Empowering The Poor through Joint Venture Group at Serang District. Department of Public Administration. Faculty of Social Science and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. The 1st Advisor : Dr. Agus Sjafari, M.Si., The 2nd Advisor : Riswanda, P.hD.

The Strategy Management of Social Service's in Empowering The Poor through Joint Venture Group at Serang District. The problems are motivation of joint venture group not consistent, lack of supervision or human resources in the social service, proposal request is not comparable to the target issued by the social service, and then lack of understanding of the poor about how to make a proposal and evaluation reports. The study aim to describe The Strategy Management of Social Service's in Empowering The Poor through Joint Venture Group at Serang District. This study used strategy management theory by Glueck and Jauch in Saladin (2003:4) that are analysis and diagnosis, formulation, implementation, and evaluation; using explorative methods and qualitative approaches with Miles and Huberman analysis model. The findings showed that the strategy management of social service's in empowering the poor through joint venture group at Serang District is making program planning and budgeting, providing business training and financial support, and evaluation. Some of the cause are process analysis and startegy formulation is determined by the employee responsible for the program only, the arrangements of funds every year is uncertain, training related joint venture group just only one, and evaluation is held one time by receiving reports of the village counselor. The recommendations are more maximize the process of strategy formulation and recruit employees to avoid multiple positions.

Keywords: Strategy Management , Empowering of The Poor, Joint Venture Group

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Santi Nurmayanti
NIM : 6661121331
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 12 Maret 1994
Progam Studi : Administrasi Publik

Menyatakan skripsi yang berjudul MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN SERANG adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaann saya dapat dicabut.

Serang, Maret 2018



Santi Nurmayanti

NIM. 6661121331

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Santi Nurmayanti

NIM : 6661121331

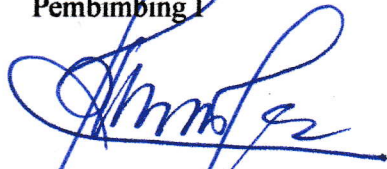
Judul Skripsi : **Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang**

Serang, Maret 2018

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

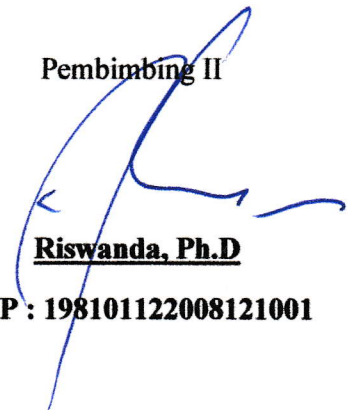
Pembimbing I



Dr. Agus Sjafari, M.Si

NIP : 197108242005011002

Pembimbing II



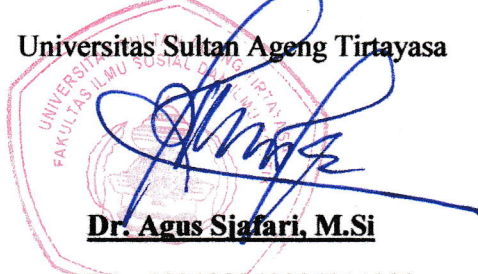
Riswanda, Ph.D

NIP : 198101122008121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, M.Si

NIP : 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Santi Nurmayanti
NIM : 6661121331
Judul Skripsi : MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK
USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN SERANG

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 09
April 2018 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 09 April 2018

Ketua Penguji :

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

Anggota :

Drs. Hasuri Wasch, M.Si
NIP. 1962020320001002

Anggota :

Riswanda, Ph.D
NIP. 198101122008121001

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

*Pergilah kepada mereka (masyarakat),
Hiduplah bersama mereka,
Beljarlah dari mereka,
Mulailah dari mereka,
Bekerjalah bersama mereka,
Bangunlah di atas apa yang mereka miliki,
Tetapi sebagai pemimpin yang terbaik,
Ketika semua tugas telah diselesaikan,
Pekerjaan telah dilengkapi.
Mereka (masyarakat) akan mencatat : "kami telah menyelesaikannya sendiri".
- (Lao Tzu)*

Skripsi ini saya persembahkan untuk...

Mama, Bapak, Kiki serta Galih

Yang telah memberikan do'a yang tulus, dan motivasi

Secara moral dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Love you all....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Atas berkat rahmat, karunia dan ridho-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan judul “*Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang*”. Hasil skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan segala bimbingan, motivasi, pengarahan, saran dan dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si selaku Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai ketua penguji skripsi yang telah memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Arenawati, M.Si selaku Sekretaris Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Rina Yulianti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Bapak Riswanda, S.Sos., M.PA., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan segala bimbingan, motivasi, pengarahan, saran dan dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak.
10. Bapak Drs. Hasuri Waseh, M.Si selaku penguji ahli yang telah memberikan arahan-gambaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Publik Negara Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12. Kepada Bapak H. Yayat Sutiana, S.E., Ibu Betty Rubiyati, S.Sos., Ibu Dra. Hj. Dian Mardiani, M.Si., Ibu Iis Isrofiah, Bapak Irfan Firdaus, Ibu Jahroh, Bapak Ikhwan, Bapak Sopian Yasa, Ibu Hamdanah, Bapak M.Rafe'i, Bapak Naeni, Ibu Anita S.Pd., dan Bapak H.Suwandi yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
13. Kedua orang tuaku Bapak Nurdin dan Ibu Sularmi yang tidak pernah letih untuk menyayangi dan memberikan doa kepada penulis.
14. Kakakku Kiki Nurmalasari yang tidak hentinya selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis di saat suka maupun duka.
15. Terima kasih kepada Keluarga Besar Darmo dan Risin Family, yang tak hentinya selalu memberikan motivasi.
16. Galih Hidayat Ramadhan yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam memperoleh data serta turut memberikan masukan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini hingga dapat diselesaikan.

17. Sahabat-sahabat yang memberikan dorongan dan motivasi terbaik dalam menyusun penelitian ini yaitu : Putri Kusumawardani, Natasa Eka Prislia, Fuji Larasakti Afdiningsih, Evi Revitasari, Sukriyandi, Wahyu Nugraha, Andika Pratama, Akhmad Khotibul Umam, Suryacita Maylisa, Mirza Adlina, Dina Prastyani, Dewi Tarina Prabawanti, Siva Sazkia, dan teman-teman Keluarga Besar ANE 2012. Semoga kami semua dapat berjuang dan sukses bersama.
18. Keluarga Besar Untirta Movement Community (UMC) yang telah membantu peneliti dalam proses pembentukan paradigma berfikir dan menanamkan nilai-nilai perjuangan. Khususnya kepada UMC angkatan 8 : Karlina Purnamawati, Devi Alfianti, Putri Novitasari, Sufi Miliana, Septi Umiyati, Silvi Yonata, Arira Lutfia, Jeremia Pasaribu, Julius Jeremi, Ramlan Stefanus, Jonah Silas, Clinton Silaban, Rijal Artomi, Tabah Nur Iman, terima kasih rasa kekeluargaan, suka-cita, pembelajaran dan nilai-nilai perjuangan yang telah didapatkan peneliti selama 4 tahun. Terima kasih untuk semua cerita yang pernah tercipta dan tetap dDBMP...
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti sangat menyadari ada begitu banyak kesalahan dan kekurangannya, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI	
DASAR PENELITIAN	22
2.1 Landasan Teori	22
2.2 Teori Manajemen Strategi	23
2.2.1 Definisi Manajemen Strategi	23

2.2.2 Model Proses Manajemen Strategi	26
2.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat	33
2.3.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat	33
2.3.2 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat	37
2.4 Konsep Kemiskinan	38
2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial	40
2.5.1 Definisi Kesejahteraan Sosial	40
2.5.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial	44
2.6 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	44
2.7 Konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	48
2.8 Penelitian Terdahulu	54
2.9 Kerangka Berfikir	57
2.10 Asumsi Dasar	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	62
3.1 Metode Penelitian	62
3.2 Fokus Penelitian	63
3.3 Lokasi Penelitian	63
3.4 Variabel Penelitian	64
3.4.1 Definisi Konsep	64
3.4.2 Definisi Operasional	65
3.5 Instrumen Penelitian	66
3.6 Informan Penelitian	67
3.7 Teknik Pengumpulan Data	69
3.7.1 Pengamatan/Observasi	69
3.7.2 Wawancara	70
3.7.3 Studi Dokumentasi	73
3.8 Teknis Pengolahan dan Analisis Data	73

3.9 Uji Keabsahan Data	75
3.9.1 Triangulasi	75
3.9.2 Member Check	76
3.10 Jadwal Penelitian	77
BAB IV HASIL PENELITIAN	78
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	78
4.2 Deskripsi Data	83
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	83
4.2.2 Data Informan Penelitian	86
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	91
4.3.1 Analisis dan Diagnosis	92
4.3.2 Perumusan/Formulasi	108
4.3.3 Pelaksanaan/Implementasi	117
4.3.4 Evaluasi	142
4.4 Pembahasan	156
4.4.1 Analisis dan Diagnosis	157
4.4.2 Perumusan/Formulasi	161
4.4.3 Pelaksanaan/Implementasi	163
4.4.4 Evaluasi	168
BAB V PENUTUP	172
5.1 Kesimpulan	172
5.2 Saran	173

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Statistik Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2015 – 2016	5
Tabel 1.2 Data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016	7
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti yang akan Dilakukan oleh Peneliti	56
Tabel 3.1 Informan Penelitian	68
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara	71
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	77
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data PMKS khususnya Keluarga Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Serang per Kecamatan Tahun 2016	80
Tabel 4.2 Data Penerima KUBE Fakir Miskin APBD II Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016	82
Tabel 4.3 Informan Penelitian	87
Tabel 4.4 Persentase Keberhasilan KUBE Tahun 2016	154

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Bidang Penanganan Fakir Tahun 2016	10
Gambar 2.1 Model Proses Manajemen Strategi Menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch	27
Gambar 2.2 Model Proses Manajemen Strategi Menurut Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger	28
Gambar 2.3 Model Proses Manajemen Strategi Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter	29
Gambar 2.4 Mekanisme Pengusulan dan Penyaluran Bantuan Sosial	52
Gambar 2.5 Kerangka Berfikir	60
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)	74
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Serang	79
Gambar 4.2 Contoh Proposal Usaha	99
Gambar 4.3 Mekanisme Pembuatan Strategi Program KUBE	111
Gambar 4.4 Strategi Program KUBE Tahun 2016	113
Gambar 4.5 Struktur Kerja Bidang Penanganan Fakir Miskin	127
Gambar 4.6 Usaha KUBE di Pontang 2016	133
Gambar 4.7 Jenis Usaha KUBE 2016	134
Gambar 4.8 Mekanisme Evaluasi	143
Gambar 4.9 Bentuk LPJ Bidang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2016	148
Gambar 4.10 Target dan Capaian Kinerja Pemberdayaan Fakir Miskin 2016	152
Gambar 4.11 Target dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2016	153

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Tabel Wawancara Informan
LAMPIRAN 2	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN 3	Keterangan Informan
LAMPIRAN 4	<i>Member Check</i>
LAMPIRAN 5	Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN 6	Dokumentasi Penelitian
LAMPIRAN 7	Data Pendukung Penelitian
LAMPIRAN 9	Daftar Hadir Bimbingan
LAMPIRAN 10	CV Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain (World Bank, 2004). Selain itu World Bank (2004), mengemukakan :

“Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti; makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat sembilan (9) dalam daftar negara dengan jumlah orang miskin terbesar di dunia. Selain itu angka kemiskinan Indonesia tahun 2015 turun ke 11,22%, dibandingkan tahun 2014 sebesar 11,3%”.

Di Indonesia permasalahan kemiskinan ini pun selalu menjadi perbincangan yang sangat menarik, karena kemiskinan mempengaruhi jalannya perekonomian di negara ini. Hampir berbagai kalangan di Indonesia (baik para akademisi, lembaga legislatif, eksekutif, pengusaha maupun masyarakat) pasti membahas masalah ini. Selain itu banyak pula tokoh ilmuwan atau akademisi dari dahulu sampai sekarang yang mengeluarkan teori, konsep atau pendekatan tentang kemiskinan agar setiap tahunnya kemiskinan mengalami penurunan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002 : 3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, uang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002 : 4). Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, menurut SMERU (Suharto dkk, 2004) dalam (Sjafari, 2014 : 16). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin :

“Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”.

Undang-Undang atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai kemiskinan atau fakir miskin di Indonesia awalnya pada Tahun 1981 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1981

tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin. Selanjutnya Undang-Undang, yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Undang-Undang ini menyatakan : “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Berdasarkan pengertian dan tujuan diadakannya Kesejahteraan Sosial, yaitu :

“Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial diselenggarakan dengan tujuan, yaitu : (1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; (2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi masyarakat dimana kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat dapat dipenuhi dengan layak dengan cara meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa Bab III mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada bagian empat membahas Pemberdayaan Sosial, dalam Undang-Undang ini menyatakan : “Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami

masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”. Selanjutnya berdasarkan pengertian dan tujuan pemberdayaan sosial, yaitu :

“Pada pasal 12 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk ; (a) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; (b) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

Sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial, yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dapat disimpulkan pemberdayaan sosial merupakan salah satu penyelenggara kesejahteraan sosial selain rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Pemberdayaan sosial ialah upaya yang dilakukan pemerintah untuk warga negaranya yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan sosialnya dengan cara meningkatkan peran lembaga atau perseorangan sebagai sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk mendukung pelaksanaan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang atau Peraturan mengenai Kesejahteraan Sosial. Beberapa payung hukum yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial khususnya Pemberdayaan Fakir Miskin diantaranya ; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin; Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terbentuk pada tahun 2000. Awalnya Provinsi Banten ialah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten memiliki 4 Kota, 4 Kabupaten, 155 Kecamatan dan 1.238 Desa dan 313 Kelurahan. Sama dengan Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Banten juga memiliki masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat akibat faktor kemiskinan. Berikut Tabel Statistik Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2015 :

Tabel 1.1

Statistik Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2016

Uraian	2015	2016
Garis Kemiskinan (rupiah)	336.483	367.949
Jumlah penduduk miskin (ribuan orang)	702,4	658,1
Persentase penduduk miskin (P_0)	5,90	5,42
Indeks kedalaman kemiskinan (P_1)	0,94	0,80
Indeks keparahan kemiskinan (P_2)	0,23	0,17

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa program pengentasan kemiskinan di Banten selama setahun (2015 – 2016) dapat dikatakan cukup berhasil. Penilaian tersebut didasarkan pada jumlah dan persentase penduduk miskin yang masing-masing menurun dari 702 ribu orang dan 5,90 persen pada tahun 2015, menjadi 658 ribu orang dan 5,42 persen pada tahun 2016. Penurunan statistik kemiskinan tersebut dapat dilihat selain karena jumlah persentase penduduk miskin yang menurun, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga terlihat mengecil. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan sebesar 0,94 dan 0,23 menjadi 0,80 dan 0,17 pada 2016. Dengan statistik tersebut dapat diasumsikan bahwa pengeluaran penduduk miskin Banten secara rata-rata meningkat hingga semakin mendekati garis kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin semakin menyempit.

Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang terbagi atas 29 kecamatan, dan terdiri dari 330 desa. Kabupaten Serang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pabrik, tempat wisata maupun perindustrian dan perikanan, namun masih banyak permasalahan sosial yang dihadapi oleh Kabupaten ini. Dinas Sosial Kabupaten Serang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan. Salah satu tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Serang diantaranya melaksanakan pemberdayaan sosial demi menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program pemberdayaan fakir miskin yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Serang. KUBE ialah keluarga miskin yang dibentuk secara kelompok, selanjutnya kelompok tersebut diharapkan tumbuh dan berkembang dengan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh kelompok tersebut dengan tujuan meningkatkan pendapatan hidup keluarga miskin tersebut. Berikut data KUBE Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016 :

Tabel 1.2
Data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin
Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Sumber Dana				Ket.
			APBN	APBD I	APBD II	Jumlah	
1	Pamarayan	1)Wirana	2	-	2	4	
		2)Pudar	-	-	2	2	
		3)Sangiang	1	1	1	3	
		4)Damping	2	1	-	3	
		5)Kampungbaru	4	-	-	4	
		6)Keboncau	1	1	-	2	
2	Anyer	7)Bandulu	-	-	2	2	
3	Kragilan	8)Sukajadi	-	-	2	2	
4	Lebak Wangi	9)Kebon Ratu	-	-	2	2	
		10)Kencana Harapan	-	-	5	5	
5	Tunjung Teja	11)Pancaregang	-	-	2	2	
		12)Bojong Menteng	-	-	4	4	
6	Kibin	13)Nagara	-	-	2	2	
7	Cinangka	14)Mekar Sari	-	-	2	2	
		15)Bantar Wangi	-	-	2	2	
		16)Bantar Waru	-	5	-	5	
		17)Rancasanggal	-	5	-	5	
8	Cikeusal	18)Suka Ratu	-	-	1	1	
		19)Cimaung	-	-	1	1	
9	Pontang	20)Wanayasa	-	-	4	4	
10	Gunung Sari	21)Gunung Sari	-	-	1	1	

		22)Ciherang	-	1	-	1	
		23)Curug Sulanjana	-	2	-	2	
		24)Sukalaba	-	1	-	1	
11	Kramatwatu	25)Toyomerto	-	6	-	6	
12	Pabuaran	26)Sindang Heula	-	4	-	4	
13	Cikande	27)Cikande	8	-	-	8	
		28)Leuwilimus	2	-	-	2	
		29)Gembor Udik	4	-	-	4	
		30)Julang	2	-	-	2	
		31) Nambo Udik	2	-	-	2	
		32) Sukatani	2	-	-	2	
14	Baros	33) Sinarmukti	3	-	-	3	
		34) Padasuka	5	-	-	5	
		35) Curug Agung	2	-	-	2	
		36) Cisalam	-	2	-	2	
		37) Baros	-	2	-	2	
		38) Suka Indah	-	1	-	1	
		39) Sukacai	-	1	-	1	
15	Ciomas	40) Sukadana	4	-	-	4	
		41) Pondok Kahuru	1	6	-	7	
		42) Sukabares	2	-	-	2	
		43) Citaman	3	3	-	6	
		44) Sukarena	-	8	-	8	
16	Ciruas	45) Singamerta	6	-	-	6	
		46) Kaserangan	4	-	-	4	
		47) Gosara	1	-	-	1	
		48) Kepandean	2	2	-	4	
		49) Tirem	3	-	-	3	
		50) Kebon Ratu	4	-	-	4	
17	Jawilan	51) Pasir Buyut	-	1	-	1	
18	Padarincang	52) Kramat Laban	-	1	-	1	
		53) Cibojong	-	1	-	1	
		54) Kadu Kempong	-	1	-	1	
		55) Padarincang	-	1	-	1	
19	Mancak	56) Angsana	-	1	-	1	
		57) Pasir Waru	-	4	-	4	
		Jumlah	70	62	35	167	

(Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok usaha bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kabupaten Serang tahun 2016 terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan pada APBD II, APBD I, dan APBN. Dapat dilihat di atas pada APBN terdapat 70 KUBE yang diberi bantuan, selanjutnya pada APBD I terdapat 62 KUBE, dan pada APBD II terdapat 35 KUBE, sehingga pada tahun 2016 total ada 167 KUBE yang diberi bantuan sosial oleh Dinas Sosial

Kabupaten Serang. Namun pelaksanaan usaha yang dilakukan kelompok fakir miskin yang sudah diberikan bantuan usaha oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Dinas Sosial. Hal tersebut terlihat, pada saat Dinas Sosial memberikan dana ke kelompok fakir miskin berjumlah 167 KUBE (pada tahun 2016). Akan tetapi pada saat berjalannya waktu, usaha yang dilakukan kelompok tersebut bangkrut atau hilang. Karena hal tersebut, tujuan dari program KUBE untuk meningkatkan kesejahteraan Fakir Miskin dan mengurangi jumlah Fakir Miskin yang ada di Kabupaten Serang dapat dikatakan belum berhasil.

Berdasarkan hasil observasi awal dimana peneliti melihat langsung kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Serang khususnya Bidang Penanganan Fakir Miskin dan wawancara secara tidak terstruktur kepada pegawai Dinas Sosial Kabupaten Serang, beberapa TKSK di beberapa Kecamatan di Kabupaten Serang dan beberapa ketua maupun anggota KUBE Fakir Miskin yang sudah dan akan menerima bantuan pada tahun 2016, maka peneliti menemukan beberapa masalah penting yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam menjalani program Pemberdayaan Fakir Miskin, yaitu sebagai berikut :

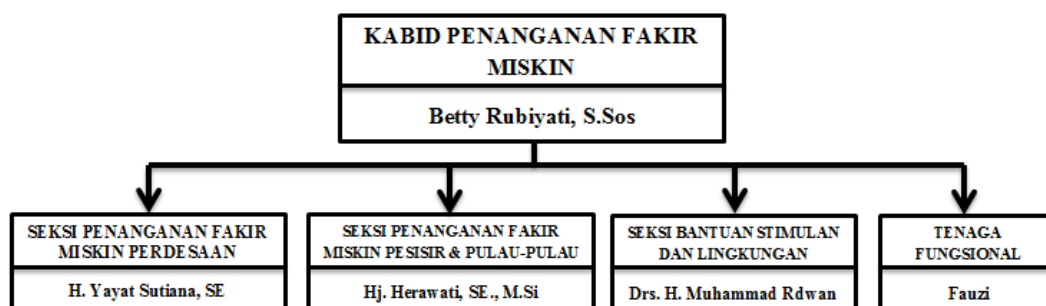
Pertama, motivasi usaha yang dimiliki kelompok usaha tidak konsisten. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Yayat Sutiana, S.E sebagai Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial Kabupaten Serang (wawancara pada senin, 12 September 2016 di Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten

Serang). Dimana banyaknya usaha yang bangkrut pada saat pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial. Kebangkrutan tersebut terjadi karena motivasi (semangat) usaha yang ada pada anggota KUBE hanya ada pada awal pemberian dana. Sehingga setiap tahunnya hanya beberapa kelompok usaha yang usahanya berkembang (mengalami peningkatan pendapatan) dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

Kedua, kurangnya pengawas atau SDM di Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam menjalankan program KUBE. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur pegawai pada Bidang Penanganan Fakir Miskin pada gambar 1.1 di bawah ini, yaitu :

Gambar I.1 :

Struktur Bidang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2016



(Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Dapat dilihat pada gambar 1.1 di atas bahwa dalam pelaksanaan program KUBE, RTLH dan PRSE yang ditangani pada bidang tersebut hanya dipegang oleh 1 orang pada setiap seksi, dan 1 tenaga fungsional, sehingga pada bidang penanganan fakir miskin terdapat 5 pegawai PNS dan 1 honorer.

Karena terbatasnya SDM yang ada mengakibatkan para penanggung jawab program mengalami kesulitan dalam menjalankan program pemberdayaan sosial tersebut.

Ketiga, permohonan proposal KUBE fakir miskin tidak sebanding dengan target yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Yayat Sutiana, S.E sebagai Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial Kabupaten Serang (wawancara pada senin, 12 September 2016 di Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang). Permohonan proposal (baik untuk KUBE, RTLH maupun PRSE) yang masuk pada tahun 2015 (untuk anggaran 2016) lebih dari 500 proposal, untuk KUBE sendiri terdapat 225 proposal. Sehingga pegawai yang bertanggungjawab pada program-program tersebut harus memilah atau menetapkan pemohon mana yang lebih berhak menerima bantuan tersebut.

Keempat, kurangnya pemahaman keluarga fakir miskin mengenai cara untuk memohon bantuan kepada Dinas Sosial. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mutiah Minawati sebagai pendamping KUBE (TKSK) Cikeusal Kabupaten Serang (wawancara pada rabu, 23 November 2016 di Aula Dinas Sosial Kabupaten Serang). Karena hal tersebut, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) membantu Dinas Sosial dalam memberi pengetahuan dan cara membuat proposal permohonan bantuan. Setiap tahun di Kecamatan Cikeusal ada saja keluarga fakir miskin

yang ingin memohon bantuan kepada Dinsos dalam membangun usaha, sehingga TKSK daerah tersebut berkewajiban untuk membantunya.

Kelima, kurangnya bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang kepada keluarga fakir miskin di Kabupaten Serang. Menurut beberapa Ketua KUBE yang ada di Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak wangi, bantuan yang sudah diterima baik berupa dana maupun fasilitas usaha dirasa masih kurang. Bantuan yang diterima dalam bentuk dana dan fasilitas usaha sebesar Rp 15.000.000,- per kelompok. (Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Lebakwangi pada tahun 2016).

Dari berbagai permasalahan yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Serang masih mengalami permasalahan dalam manajemen Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Serang. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan hasil pengamatan sementara peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Motivasi usaha yang dimiliki kelompok usaha tidak konsisten.
2. Kurangnya pengawas atau SDM di Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam menjalankan program KUBE.
3. Permohonan proposal KUBE fakir miskin tidak sebanding dengan target yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang setiap tahunnya.
4. Kurangnya pemahaman keluarga fakir miskin tentang cara membuat proposal bantuan kepada Dinas Sosial.
5. Kurangnya bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang kepada keluarga fakir miskin di Kabupaten Serang.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu tentang Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang ?”

1.5 Maksud dan Tujuan Penulisan

Setiap penelitian tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi targetan dari kegiatan penelitian tersebut. Tanpa itu semua maka apa yang akan dilakukan akan menjadi sia-sia. Maksud dan tujuan penelitian tersebut antara lain, yaitu sebagai berikut :

Untuk mengetahui Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digeneralisasikan dan diharapkan memberikan *feedback* atau manfaat yang baik bagi bidang-bidang yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah baru di bidang Administrasi negara khususnya konsep Manajemen Strategi.
- c. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan, sehingga memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi pengembangan ilmu administrasi negara.
- d. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melaksanakan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi peneliti dan pembaca.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk memaksimalkan program-program yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Serang khususnya dalam Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin di Kabupaten Serang.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga menitik ke masalah yang spesifik dan relevan.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah mendeteksi aspek permasalahan yang muncul berkaitan dari tema/topik/judul penelitian atau dengan masalah.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah memfokuskan pada masalah spesifik yang akan diajukan dalam rumusan masalah.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling penting yang berkaitan dengan judul penelitian. Perumusan masalah mendefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam bentuk definisi konsep dan operasional, kalimat yang digunakan adalah kalimat pertanyaan.

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam temuan penelitian. Manfaat teoritis berguna memberikan kontribusi tertentu terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Manfaat praktis memberikan kontribusi tertentu terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok maupun organisasi.

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, sehingga akan memperoleh konsep yang jelas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan secara sistematis tentang hubungan antar variabel penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan.

2.4 Asumsi Dasar

Merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan Kerangka Teori yang digunakan.

3.2.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian dilengkapi dengan tabel matriks, variabel indikator, sub indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran. Dalam penelitian kualitatif tidak perlu dijabarkan menjadi indikator maupun sub

indikator tetapi cukup menjabarkan fenomena yang akan diamati.

3.3 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrumen.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menjelaskan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data seperti; wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah *purposive* karena orang-orang tersebut adalah orang yang mengetahui betul apa yang menjadi permasalahan di penelitian ini.

3.6 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan kisi-kisi pertanyaan yang memudahkan peneliti dalam mencari data ke informan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan mengenai cara menganalisa data yang dilakukan dalam penelitian.

3.8 Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data yang berfungsi sebagai pelaksana pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

3.9 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan, serta yang berhubungan dengan objek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan data penelitian dengan menggunakan teori yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

4.3 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut dan lebih rinci terhadap hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas, singkat dan juga mudah dipahami. Kesimpulan juga harus sejalan dengan permasalahan serta asumsi dasar penelitian.

5.2 Saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis. Saran praktis lebih operasional sedangkan aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan konsep atau teori.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan Skripsi.

LAMPIRAN

Berisi mengenai daftar dokumen yang menunjang data penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian merupakan rangkaian atau uraian beberapa teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Cooper and Schindler dalam Sugiyono (2005 : 41) mengemukakan bahwa :

“ A theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact) ”. (Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena).

Landasan teori biasanya berisi tentang penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, melalui definisi-definisi dan uraian yang lengkap, mendalam dan jelas mengenai variabel-variabel tersebut diharapkan hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Pada bab ini akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan “Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang”. Dari hasil kajian maka peneliti dapat mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang. Untuk itu, harus ada teori yang relevan dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

2.2 Teori Manajemen Strategi

2.2.1 Definisi Manajemen Strategi

Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola (John M. Echols & Hassan Shadily, 2003 : 372). Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 2007 : 742) manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang *manajer* (pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan manajemen. Para ahli memandang manajemen dari sudut pandang yang berbeda-beda, ada beberapa ahli memandang manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, ada juga ahli lain memandang manajemen sebagai suatu proses dan sebagai profesi.

Sedangkan strategi berasal dari Yunani, yaitu *stratagos* atau *strategis* yang berarti jenderal. Strategi berarti seni para jenderal. Selain itu menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch mengartikan strategi adalah :

“sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch dalam Saladin (2003 : 4) mengemukakan definisi manajemen strategi :

“Strategic management is a stream of the decisions and actions which leads to the development of an affective strategy or strategies to help achieve objectives, the strategy management process is the way in which strategic determine objective and make strategic decisions”.

(Manajemen strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan, proses manajemen strategi ialah suatu cara dengan jalan bagaimana para perencana strategi menentukan sasaran untuk membuat kesimpulan strategi).

Dalam definisi ini manajemen strategi memiliki tujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara melakukan perkembangan strategi yang efektif, dan pada proses untuk mencapai sasaran organisasi tersebut dengan membuat kesimpulan strategi. Selanjutnya menurut Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger dalam Saladin (2003 : 4) menyatakan :

“Strategic management is that set of managerial decisions and actions that determine the long-run performance of corporation, it includes strategy formulation, strategy implementation and evaluation”.

(Manajemen strategi adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka

panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi, dan evaluasi).

Dalam definisi ini manajemen strategi dititikberatkan pada kegiatan organisasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan tersebut menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Selain itu menurut Gregory G. Dees dan Alex Miller dalam Saladin (2003 : 4), mengemukakan :

“Strategic management is a process that combines three major interrelated activities : strategic analysis, strategic formulation, and strategic implementation”.

(Strategi manajemen adalah suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi).

Dalam definisi ini manajemen strategi dipandang sebagai suatu proses yang dilakukan dari analisis, perumusan dan implementasi strategi. Sementara itu menurut Charles W. L Hill dan Gareth R. Jones dalam Saladin (2003 : 4-5), mengemukakan :

“Strategic managers are individuals who bear responsibility for the overall performance of the organization or for one of its major self-contained divisions”.

(Strategi manajemen adalah individu-individu yang bertanggung jawab secara keseluruhan dari pada organisasi atau bertanggung jawab merumuskan satu tugas utama dari divisi-divisi).

Dalam definisi ini, manajemen strategi lebih fokus kepada seseorang atau orang-orang yang bertanggung jawab membuat tugas utama dalam organisasi tersebut. Selanjutnya Ismail Solihin dalam buku “Manajemen Strategik” (2012 : 64), mengatakan bahwa :

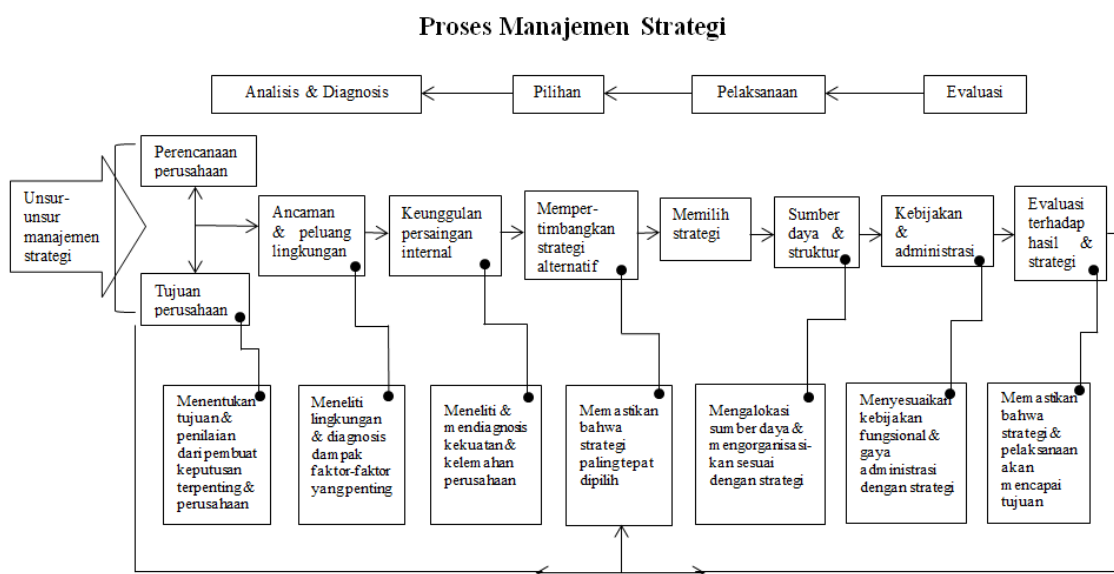
“Bila definisi manajemen strategi dikaitkan dengan terminologi “manajemen” maka manajemen strategik dapat pula didefinisikan sebagai : proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif”.

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen strategi adalah seseorang atau organisasi yang bertanggung jawab dalam merumuskan strategi organisasi, baik secara keseluruhan ataupun salah satu bagian, dalam upaya , mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.2 Model Proses Manajemen Strategi

Beberapa ahli manajemen strategi yang menjelaskan model proses manajemen strategi adalah sebagai berikut :

a. Menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch



(Sumber : Manajemen Strategi & Kebijakan Perusahaan, Saladin, 2003 : 7)

Gambar 2.1

Model Proses Manajemen Strategi Menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch

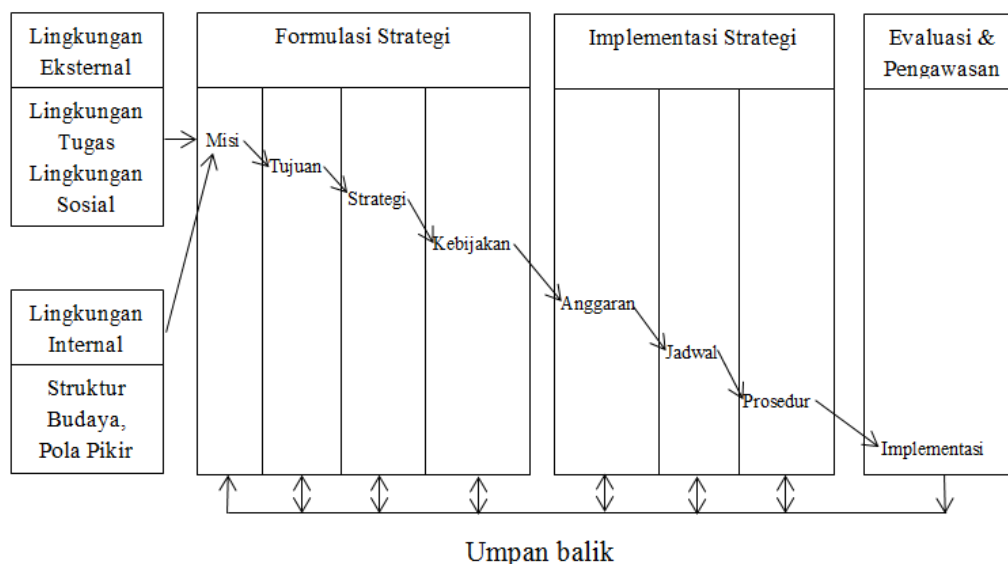
Proses manajemen strategi dari William F. Glueck-Lawrence

R. Jauch dimulai dengan :

1. Tahap pertama, adalah analisis dan diagnosis untuk merumuskan/mereencanakan strategi dan menentukan tujuan organisasi. Analisis dan diagnosis SWOT ini terdiri dari lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi.
2. Tahap kedua, adalah menentukan beberapa alternatif strategi guna memilih strategi yang handal, yang disesuaikan dengan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan organisasi.
3. Tahap ketiga, adalah bagaimana mengimplementasikan strategi yang telah dipilih. Agar strategi tersebut berjalan dengan baik, perlu membangun struktur untuk mendukung strategi itu dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepat.
4. Tahap keempat, adalah melakukan umpan balik (*feed back*), apakah strategi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seberapa jauh pelaksanaan strategi itu mencapai tujuan. Sehingga, evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah strategi itu berjalan dengan baik ataukah banyak terjadi kesenjangan atau penyimpangan.

b. Menurut Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger

Proses Manajemen Strategi



(Sumber : Manajemen Strategi & Kebijakan Perusahaan, Saladin, 2003 : 8)

Gambar 2.2

Model Proses Manajemen Strategi Menurut Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger

Proses manajemen strategi dari Thomas L. Wheelen dan J.

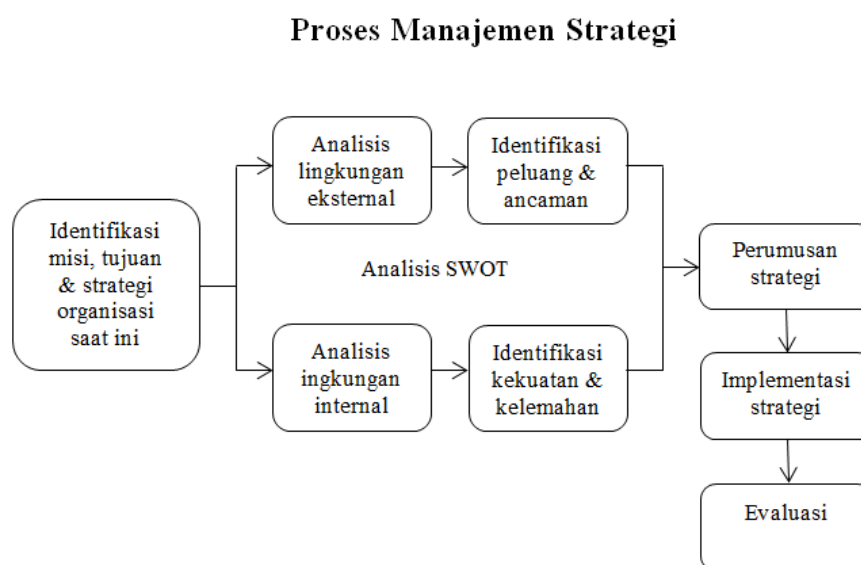
David Hunger, diantaranya :

1. Pemindaian Lingkungan, yaitu suatu kegiatan pemantauan (*monitoring*), pengevaluasian serta penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi kepada personel kunci (*key people*) di dalam organisasi.
2. Formulasi Strategi, yaitu mengkaji kembali misi dan tujuan organisasi serta merumuskan strategi yang sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut. Selain itu organisasi juga harus merumuskan kebijakan yang akan menjadi pandu bagi seluruh sumber daya manusia organisasi dalam melakukan implementasi strategi baik pada tingkat korporasi, fungsional, maupun unit usaha.
3. Implementasi Strategi, yaitu tujuan dan strategi organisasi yang telah dituangkan ke dalam rangkaian kegiatan dalam bentuk program yang terjadwal dengan jelas serta memperoleh alokasi

sumber daya yang memadai yang telah dituangkan dalam bentuk anggaran. Program-program yang telah dibuat organisasi selanjutnya harus didukung dengan prosedur yang menjelaskan secara rinci bagaimana suatu kegiatan harus dilakukan. Prosedur akan menjelaskan berbagai aktivitas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu program.

4. Evaluasi dan Pengawasan, yaitu organisasi akan membandingkan kinerja aktual yang dicapai organisasi dengan standar kinerja. Hasil evaluasi akan dijadikan dasar bagi organisasi dalam melakukan pengawasan. Hasil evaluasi dan pengawasan selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi organisasi yang memungkinkan organisasi melakukan perbaikan dalam setiap langkah proses manajemen strategi sejak pemindaian lingkungan sampai tahap evaluasi dan pengawasan.

c. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter



(Sumber : Manajemen Strategik, Solihin, 2012 : 71)

Gambar 2.3

Model Proses Manajemen Strategi Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter

Proses manajemen strategi dari Stephen P. Robbins dan Mary Coulter meliputi :

1. Mengolah input yang diperoleh melalui evaluasi terhadap misi, tujuan, strategi yang dimiliki organisasi saat ini serta analisis terhadap lingkungan internal (melalui analisis ini organisasi akan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sumber daya organisasi) dan analisis lingkungan eksternal organisasi (melalui analisis ini, organisasi dapat mengidentifikasi sejumlah peluang dan ancaman).
2. Melalui pengolahan input tersebut, organisasi akan dapat merumuskan misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya organisasi dapat memilih alternatif-alternatif strategi yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan implementasi strategi terpilih melalui anggaran alokasi sumber daya yang dibutuhkan, dimana dalam alokasi sumber daya ini terdapat penekanan pentingnya keselarasan antara tugas, manusia, struktur organisasi, teknologi yang digunakan serta sistem imbalan yang diterapkan.
4. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penerapan strategi sebagai input yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan di masa mendatang.

Selain itu proses manajemen strategi terdiri dari berbagai tahap menurut Siagian (2008 : 30), tahapan-tahapan itu, diantaranya :

1. Perumusan Misi Organisasi (perusahaan)
Dalam perumusan misi organisasi, harus terlihat jelas produk andalan apa yang akan dihasilkan, pasaran konsumen yang bagaimana yang akan direbut, cara pemanfaatan teknologi yang akan digunakan yang kesemuanya menggambarkan sistem nilai dan skala prioritas yang dianut oleh para pembuat keputusan strategik dalam organisasi.
2. Peran Profil Organisasi (perusahaan)
Profil organisasi memperkuat identitas yang telah dinyatakan dalam misi.
3. Lingkungan Eksternal
Organisasi harus berinteraksi dengan lingkungannya, perjalanan organisasi dipengaruhi dengan tingkat tertentu

oleh dampak peristiwa, perkembangan dan sifat perubahan yang terjadi di lingkungannya.

4. **Analisi dan Pilihan Strategik**
Penilaian terhadap lingkungan eksternal dan profil organisasi memungkinkan manajemen mengidentifikasi berbagai jenis peluang yang timbul dan dapat dimanfaatkan. Suatu pilihan strategik harus bermuara pada penggabungan antara sasaran jangka panjang dan strategi dasar organisasi yang pada gilirannya menempatkan pada posisi yang optimal.
5. **Penetapan Sasaran Jangka Panjang**
Berbagai sasaran jangka panjang yang akan ditetapkan, dinyatakan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan konsisten dengan berbagai sasaran lain yang ingin dicapai.
6. **Penentuan Strategi Induk**
Strategi induk adalah suatu rencana umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif yang mengandung arahan tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dalam lingkungan eksternal yang bergerak dinamis.
7. **Penentuan Sasaran jangka Pendek**
Sasaran jangka panjang dalam organisasi memerlukan konkretisasi. Salah satu cara melakukan konkretisasi ialah dengan melakukan periodisasi, antara lain dengan menetapkan sasaran tahunan. Sasaran tahunan ini memiliki jangkauan waktu yang lebih dekat maka dapat disebut dengan sasaran jangka pendek yang menunjang sasaran jangka panjang yang telah dibuat.
8. **Penentuan Strategi Operasional**
Berbagai satuan kerja yang mengoperasionalkan rencana maupun strategi perusahaan yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara berbagai kegiatan fungsional seperti produksi, pemesanan, keuangan, akunting, sumber daya manusia dan berbagai fungsi organisasional lainnya.
9. **Perumusan Kebijakan**
Perumusan kebijakan dalam arti penentuan berbagai petunjuk untuk memandu cara berfikir, cara pengambilan keputusan dan cara bertindak bagi para manajer dan bawahannya yang kesemuanya diarahkan pada implementasi dan operasionalisasi strategi organisasi.
10. **Pelebagaan Strategi**
Agar dalam suatu organisasi tercipta satu persepsi tentang gerak langkah dari semua komponen organisasi dalam rangka implementasi strategi induk dan strategi

operasional, tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai, misi yang harus diemban, bidang kegiatan fungsional yang telah dibuat, strategi dasar yang telah ditetapkan, bidang kegiatan fungsional yang telah dirumuskan kesemuanya harus menjadi “milik” setiap orang dalam organisasi.

11. Penciptaan Sistem Pengawasan

Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

12. Penciptaan Sistem Penilaian

Penilaian menjadi sangat penting mendapat perhatian karena dari penilaian itu tiga hal dapat terlihat, yaitu sasaran terlampaui, hasil yang diperoleh sama dengan sasaran yang telah ditetapkan atau sasaran tidak tercapai. Masing-masing situasi sangat penting sebagai dasar mengambil keputusan dalam proses manajemen strategi berikutnya.

13. Penciptaan Sistem Umpan Balik

Dengan umpan balik yang faktual, tepat waktu dan objektif, manajemen puncak dapat mengetahui segi keberhasilan organisasi maupun kekurangberhasilan atau bahkan kegagalannya.

Selanjutnya Pearce dan Robinson (2005) dalam Solihin (2012 : 71-72) memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai berbagai tugas penting yang harus dilakukan manajemen puncak organisasi (sebagai pihak yang memiliki inisiatif untuk melakukan proses manajemen strategi). Menurut mereka, terdapat sembilan tugas penting dalam menerapkan proses manajemen strategi, diantaranya :

1. Menyusun misi organisasi, termasuk didalamnya pernyataan mengenai maksud pendirian organisasi, filosofi perusahaan dan tujuan organisasi.
2. Melakukan analisis untuk mengetahui kondisi internal dan kemampuan organisasi.
3. Melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal organisasi yang mencakup didalamnya penilaian terhadap situasi

persaingan dan konteks usaha secara umum yang akan memengaruhi efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan.

4. Melakukan analisis terhadap alternatif pilihan strategi organisasi dengan membandingkan kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki organisasi dengan lingkungan yang dihadapi organisasi.
5. Melakukan identifikasi terhadap alternatif pilihan strategi yang diinginkan melalui evaluasi masing-masing pilihan strategi disesuaikan dengan misi dan tujuan organisasi.
6. Memilih sekumpulan tujuan jangka panjang berikut strategi utama yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Membuat tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan strategi utama.
8. Melakukan implementasi strategi terpilih melalui anggaran alokasi sumber daya yang dibutuhkan, dimana dalam alokasi sumber daya ini terdapat penekanan pentingnya keselarasan antara tugas, manusia, struktur organisasi, teknologi yang digunakan serta sistem imbalan yang diterapkan.
9. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penerapan strategi sebagai input yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan di masa mendatang.

2.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Oos M. Anwas (2013 : 48-49),

dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, adalah :

“Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya”.

Selanjutnya Djohani (2003) dalam Anwas (2013 : 49) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Selain itu menurut Parsons (1994) dalam Anwas (2013 : 49), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Secara lebih rinci Slamet (2003) dalam Anwas (2013 : 49-50), menekankan bahwa :

“Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna : berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif”.

Selanjutnya menurut Ife dalam Suharto (2005 : 59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien diatas :

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup : kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005 : 67), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu :

- a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dubois dan Miley dalam (Suharto, 2005 : 68) menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
- b. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk : menghormati harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk : memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien/sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk : ketaatan terhadap kode etik profesi; keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset, dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Berdasarkan pada definisi dan teori yang dipaparkan para ahli diatas, dalam penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk

memberikan daya/kekuasaan kepada masyarakat, agar masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

2.3.2 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 2005 : 68-69), yaitu :

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri : tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah

- terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

2.4 Konsep Kemiskinan

Menurut Suharto (2013 : 16), Kemiskinan pada hakekatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Berdasarkan studi SMERU, Suharto (2006 : 132) menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan);
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air);
5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat); dan
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam Suharto (2005 : 132-133) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Selanjutnya menurut BPS dan Depsos (2002 : 4) mengemukakan :

“Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya”.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas

kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan : kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto, 2005 : 134). Dalam konteks politik ini Friedman dalam Suharto (2005 : 134-135) mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi:

- a. Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan).
- b. Sumber keuangan (pekerjaan, kredit).
- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi soisal).
- d. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.
- e. Pengetahuan dan keterampilan.
- f. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Dari berbagai definisi di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan situasi dimana seseorang atau masyarakat mengalami kesengsaraan dan ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.5.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Menurut Suparlan (Suud, 2006 : 3) mengemukakan :

“Kesejahteraan Sosial merupakan keadaan sejahtera pada umumnya yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan

sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ; 1) Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan; 2) Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan; dan 3) Kesejahteraan sosial sebagai ilmu”.

Selanjutnya Adi (2003 : 40) mengemukakan Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup (tidak hanya secara ekonomi dan fisik belaka tetapi juga memperhatikan aspek sosial, mental dan spiritual) yang lebih baik. Selain itu Suharto (2005 : 3) menyatakan :

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang kurang beruntung.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara materiil maupun spiritual mereka harus mempunyai kemampuan untuk

bekerja dan mengembangkan diri supaya mereka mampu hidup layak dan dapat diterima di tengah masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 6 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a) Rehabilitasi Sosial;
- b) Jaminan Sosial;
- c) Pemberdayaan Sosial; dan
- d) Perlindungan sosial.

Penjelasan mengenai program penyelenggara kesejahteraan sosial terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bagian Keempat Pasal 12, yaitu :

- 1) Pemberdayaan sosial dimaksud untuk :
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. Penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. Penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. Pemberian akses; dan/atau
 - e. Pemberian bantuan usaha.
- 3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
 - a. Diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. Pelatihan keterampilan;
 - c. Pendampingan;
 - d. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. Supervisi dan advokasi sosial;

- g. Penguatan keserasian sosial;
 - h. Penataan lingkungan; dan/atau
 - i. Bimbingan lanjut.
- 4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :
- a. Diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. Penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. Kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. Pemberian stimulan.

Kemudian menurut Segal dan Bruzury dalam Suud (2006 :

5) kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi : kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Selain itu, kesejahteraan sosial menurut Midgel dalam Suud (2006 : 5), yaitu :

“Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut : pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial yang dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Serta ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, dan bahkan seluruh masyarakat”.

Dengan demikian menurut Suharto (2005 : 2), kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

2.5.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Sumarnonugroho dalam Suharto (2009 : 43)

kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi penyembuhan dan pemulihan
Fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjalar. Fungsi pemulihan terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan dan pemulihan bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada.
2. Fungsi pencegahan
Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
3. Fungsi pengembangan
Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif.
4. Fungsi penunjang
Fungsi ini menompang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya seperti bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan sebagainya.

2.6 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dalam Selayang Pandang Dinas Sosial Kabupaten Serang (2014 : 44-71) dijelaskan secara terperinci definisi dari masing-masing jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :

- 1) Fakir Miskin
Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Penyandang Disabilitas
Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
- 3) Lanjut Usia Terlantar
Seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- 4) Anak Balita Terlantar
Seorang anak yang berusia dibawah 5 tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- 5) Anak Terlantar
Seorang anak berusia 5-18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- 6) Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Seorang anak yang berusia 12-18 tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindakan pidana.

- 7) Anak Jalanan
Seorang anak yang berusia 5-18 tahun dan anak bekerja atau dipekerjakan di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- 8) Anak dengan Disabilitas
Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- 9) Anak yang Menjadi Korban Kekerasan/Diperlakukan Salah
Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan kekerasan diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- 10) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
- 11) Tuna Susila
Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi/jasa.
- 12) Gelandangan
Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta menghambat di tempat umum.
- 13) Pengemis
Orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- 14) Pemulung
Orang-orang yang melakukan pekerjaan mengais langsung dan daur ulang barang-barang bekas.
- 15) Kelompok Minoritas
Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial seperti : homo (gay), waria, dan lesbian.

- 16) Bekas Warga Bina Lembaga Pemasarakatan (BWBP)
Seseorang yang telah selesai atau dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- 17) Orang Dengan HIV/AIDS
Orang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan dukungan dan pengobatan yang mencapai kualitas hidup yang optimal.
- 18) Korban Penyalahgunaan NAPZA
Orang-orang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
- 19) Korban *Trafficking*
Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 20) Korban Tindak Kekerasan
Orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 21) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 22) Korban Bencana Alam
Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain ; gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- 23) Korban Bencana Sosial
Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 24) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antar suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26) Komunitas Adat Terpencil

Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

2.7 Konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media untuk membangun kemampuan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, melaksanakan peran sosial dengan mengembangkan potensi diri fakir miskin, yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi (Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2016 : 6-7). Secara sosial upaya menghimpun kepala keluarga fakir miskin dalam kelompok usaha bersama memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. KUBE mampu menjadi media yang dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal balik (*mutual support*) sehingga pada akhirnya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, aktivitas usaha yang dilakukan dalam kelompok memberikan kekuatan untuk mengembangkan usaha, menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing membangun jejaring usaha, membuka peluang, mengakses sumber-sumber ekonomi dan menciptakan kegiatan ekonomi yang demokratis. Keberadaan KUBE sangat penting dalam pemberdayaan fakir miskin karena :

1. KUBE diperuntukan bagi mereka yang memiliki keterbatasan hal, seperti : pendapatan, perumahan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, kepemilikan modal, komunikasi, dan teknologi.
2. Memudahkan dalam pembinaan dan monitoring sehingga pemberdayaan fakir miskin lebih efektif dan efisien baik dari segi pembiayaan, tenaga, dan waktu yang digunakan.
3. Anggota kelompok saling membantu dan berbagi dalam informasi, pengetahuan, keterampilan, modal, dan lain-lain.
4. Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota dalam mengelola usaha yang dijalankan.
5. Mampu menggali serta memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya.
6. Menumbuh kembangkan sikap keberdamaan, ekeluargaan, kegotong royongan, kesetiakawanan sosial serta keterampilan berorganisasi.

Selain itu KUBE memiliki tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Meningkatkan kemamouan anggota KUBE dalam mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.
3. Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam melaksanakan peran sosialnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 tentang Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pasal tersebut menjelaskan bahwa KUBE merupakan keluarga miskin yang dibentuk secara kelompok, selanjutnya kelompok tersebut diharapkan tumbuh dan berkembang dengan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh kelompok tersebut dengan tujuan meningkatkan pendapatan hidup keluarga miskin tersebut. Kemudian

pada PERMENSOS tersebut, pasal 2 menjelaskan bahwa KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Pada PERMENSOS Pasal 3 Bab II tentang Pembentukan KUBE dijelaskan bahwa KUBE dibentuk dengan :

1. KUBE dibentuk dengan kriteria :
 - a. Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal dan usaha.
2. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
3. KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
4. Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

Selanjutnya pada Pasal 4 sampai Pasal 6 menjelaskan tentang anggota KUBE, dimana anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Anggota KUBE harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
- c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- d. Memiliki potensi dan keterampilan; dan
- e. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.

Keanggotaan KUBE telah berakhir apabila :

- a. Telah meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak aktif secara permanen;
- d. Pindah ke kecamatan lain;
- e. Tidak menaati aturan dalam kelompok;
- f. Sakit permanen; dan
- g. Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

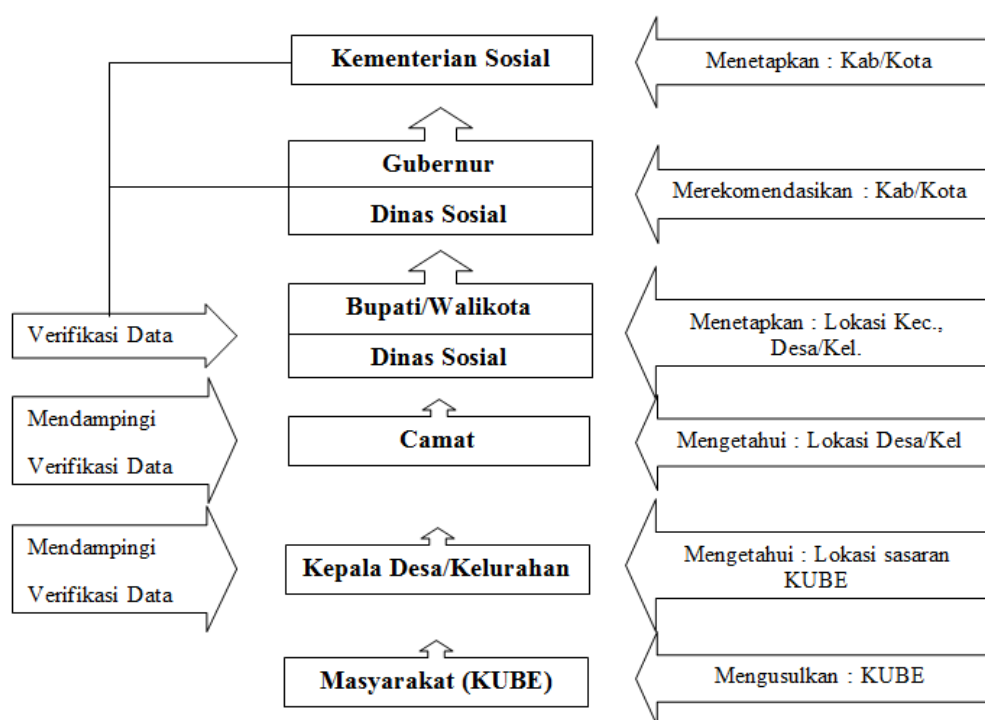
Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Pendamping KUBE. Anggota KUBE pun memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertulis pada Pasal 7 yang harus mereka taati, yaitu :

1. Anggota KUBE mempunyai hak :
 - a. Memilih/dipilih menjadi pengurus;
 - b. Mengemukakan pendapat dan gagasan;
 - c. Mengelola usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
 - e. Menerima bagian dari hasil usaha; dan
 - f. Ikut merumuskan aturan kelompok.
2. Anggota KUBE memiliki kewajiban :
 - a. Mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
 - b. Menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
 - c. Memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
 - d. Aktif dalam proses usaha KUBE;
 - e. Membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. Menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

Sumber pendanaan KUBE berasal dari APBN, APBD, dana hibah dalam negeri, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dana KUBE

ini dapat berupa uang atau barang alat usaha yang digunakan untuk kegiatan UEP. Mekanisme pencairan dana KUBE yaitu bantuan sosial (berupa uang) langsung ditrasfer ke rekening KUBE masing-masing. Namun ada apabila bantuan sosial dalam bentuk alat usaha makan akan diberikan langsung kepada pengurus KUBE. Bantuan tersebut merupakan aset KUBE bukan milik perorangan anggota KUBE.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama, Bab V menjelaskan Mekanisme Pengusulan dan Penyaluran Bantuan Sosial, berikut Skema Mekanisme Pengusulan dan Penyaluran Bantuan Sosial KUBE :



(Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Gambar 2.4

Mekanisme Pengusulan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama, berbunyi :

Pemohon Bantuan Sosial KUBE dapat diajukan oleh :

- a. Masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Selanjutnya penjelasan mengenai Pasal 13 akan dijelaskan pada

Pasal 14 dan Pasal 15, diantaranya :

Pasal 14

Permohonan Bantuan Sosial KUBE yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan mekanisme :

- a. Mengusulkan proposal KUBE kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi serta seleksi calon penerima Bantuan Sosial dengan melibatkan Pendamping KUBE;
- c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota merekomendasikan proposal kepada Kementerian Sosial dengan tembusan Dinas Sosial Provinsi;
- d. Unti eselon I yang menangani KUBE melakukan verifikasi; dan
- e. Berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan penerima Bantuan Sosial dengan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 15

Permohonan Bantuan Sosial UBE yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui mekanisme :

- a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan permohonan Bantuan Sosial KUBE kepada Kementerian Sosial dengan dilengkapi data nama dan alamat penerima bantuan sosial dan tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi;
- b. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- dan Perbatasan antar negara melakukan verifikasi berdasarkan usulan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- c. Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam menerima Bantuan Sosial KUBE harus menandatangani surat keterangan bertanggung jawab mutlak bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

2.8 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya :

1. Penelitian (Skripsi) Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Ari Hardiawan tahun 2015, dengan judul Efektifitas Program Pembinaan Dinas Sosial pada Wanita Pekerja Seks di Kota Cilegon. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan teori Efektivitas Ducan, yaitu: (1) Pencaaian Tujuan, (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode penelitian menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Program Pembinaan Wanita Pekerja Seks oleh Dinas Sosial Kota Cilegon masih belum berjalan dengan efektif.

2. Penelitian (Skripsi) Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Amelia Rizky Octarina tahun 2016, dengan judul Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan Teori Fungsi Manajemen menurut Luther Gullick, yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Penyusunan Pegawai, (4) Pembinaan Kerja, (5) Pengkoordinasian, (6) Pelaporan, dan (7) Anggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Metode penelitian menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon tidak optimal.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Manajemen Strategi menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch dalam Saladin (2003 : 7), diantaranya : (1) analisis dan diagnosis, (2) perumusan/formulasi, (3) pelaksanaan/implementasi, dan (4) evaluasi/pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan

studi dokumentasi. Metode penelitian menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi dan *member check*. Untuk lebih jelas terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti

Item	Ari Hardiawan	Amelia Rizky Octarina	Peneliti
Judul	Efektifitas Program Pembinaan Dinas Sosial pada Wanita Pekerja Seks di Kota Cilegon	Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon	Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang
Tahun	2015	2016	2018
Tujuan Penelitian	1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas program pembinaan wanita pekerja seks di Kota Cilegon. 2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam membina wanita pekerja seks di Kota Cilegon.	1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen program pemberdayaan keluarga rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon. 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon.	1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kab. Serang. 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam melaksanakan pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kab. Serang.
Teori	Teori Efektivitas oleh Ducan	Teori Fungsi Manajemen oleh Luther Gullick	Teori Manajemen Strategi oleh William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Eksploratif
Asumsi Dasar	Program Pembinaan Dinas Sosial pada Wanita Pekerja Seks di Kota Cilegon masih belum optimal serta masih diperlukan	Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon belum dapat dirasakan secara optimal dalam melaksanakan	Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang masih belum optimal dalam melaksanakan program

	perbaikan dan penambahan jenis program pembinaan untuk memperbaiki kehidupan wanita pekerja seks tersebut supaya tidak kembali lagi ke dunia prostitusi.	program kesejahteraan dalam memberdayakan keluarga rentan di Kota Cilegon.	kesejahteraan dalam memberdayakan fakir miskin di Kab. Serang.
Hasil Penelitian	Efektifitas Program Pembinaan Wanita Pekerja Seks oleh Dinas Sosial Kota Cilegon masih belum berjalan dengan efektif.	Manajemen program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon tidak optimal.	-
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peneliti memiliki tujuan penelitian yang berbeda. 2. Semua peneliti melakukan penelitian di tahun yang berbeda. 3. Semua peneliti menggunakan teori yang berbeda. 		
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap peneliti menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. 2. Semua peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, yaitu dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 3. Semua peneliti memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu tentang PMKS. 		

(Sumber : Peneliti 2018)

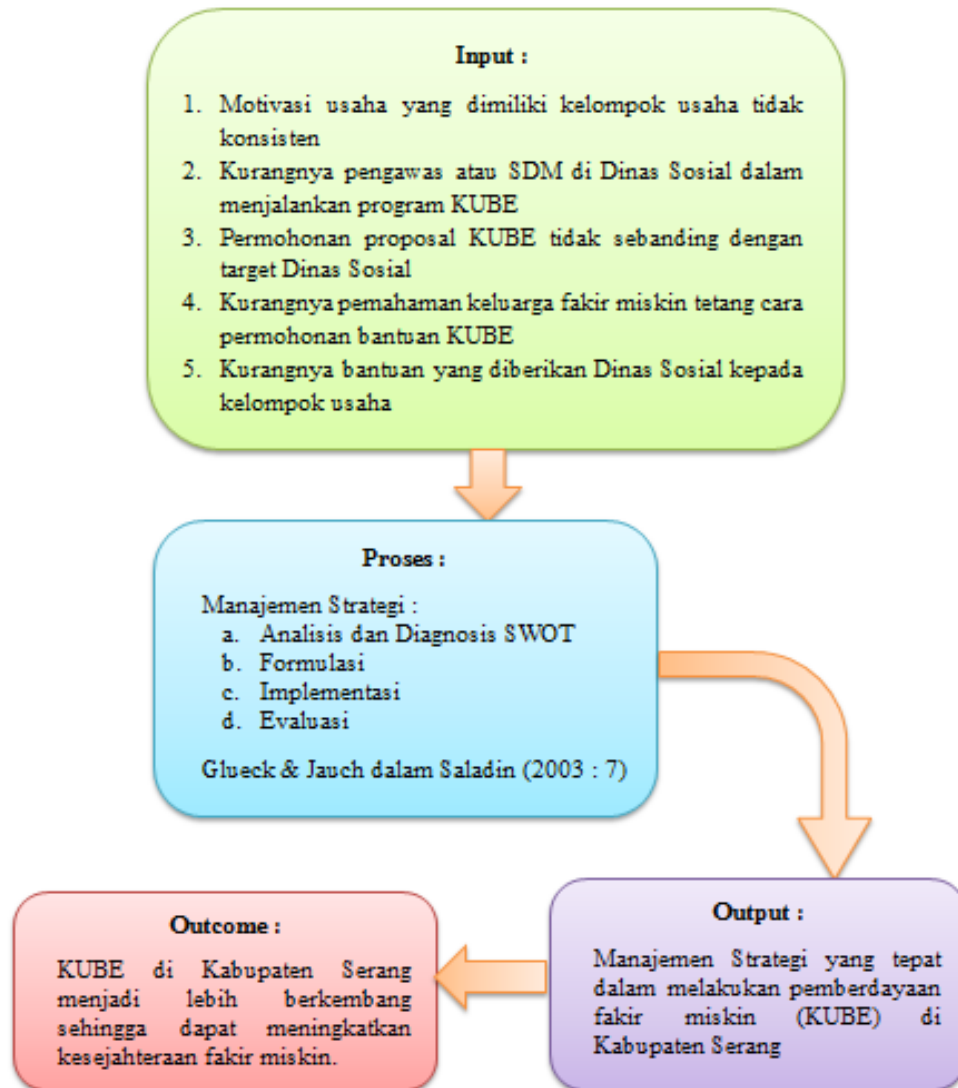
2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2011 : 60). Maka, berdasarkan judul penelitian tersebut kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu dimana Manajemen Strategi pada Dinas Sosial penting dalam memberdayakan PMKS khususnya Fakir Miskin dalam penelitian ini. Manajemen Strategi dalam penelitian ini merupakan suatu proses usaha

yang dilakukan oleh Dinas Sosial demi mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan sosial untuk masyarakat khususnya Fakir Miskin. Sedangkan pemberdayaan itu sendiri merupakan upaya dalam memberikan daya kepada Fakir Miskin dengan harapan peningkatkan kesejahteraan hidup bagi fakir miskin, baik sosial maupun ekonomi dan juga salah satu upaya dalam menangani masalah PMKS yang terjadi di Kabupaten Serang. Dinas Sosial Kabupaten Serang merupakan pelaksana program kesejahteraan sosial. Untuk melihat sejauh mana program yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Serang dilakukan dengan mengadakan berbagai program dalam suatu kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di Kabupaten Serang. Akan tetapi, terdapat berbagai masalah yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Serang, dalam penelitian ini beberapa masalah tersebut diantaranya : (1) Motivasi usaha yang dimiliki kelompok usaha tidak konsisten; (2) Kurangnya pengawas atau SDM di Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam menjalankan program KUBE; (3) Permohonan proposal KUBE fakir miskin tidak sebanding dengan target yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang setiap tahunnya; (4) Kurangnya pemahaman keluarga fakir miskin tentang cara membuat proposal bantuan kepada Dinas Sosial; dan (5) Kurangnya bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang kepada keluarga fakir miskin di Kabupaten Serang.

Penelitian mengenai Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang menggunakan Teori Manajemen Strategi menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch dalam Saladin (2003 : 7), diantaranya : (1) analisis dan diagnosis, merumuskan/merencanakan strategi dan menentukan tujuan organisasi dengan SWOT; (2) perumusan/formulasi, menentukan beberapa alternatif strategi untuk memilih strategi yang dapat digunakan untuk organisasi; (3) pelaksanaan/implementasi, mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dengan membangun struktur untuk mendukung strategi dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepat; (4) evaluasi/pengawasan, melakukan umpan balik untuk memastikan apakah strategi yang digunakan berjalan dengan baik atautkah terjadi kesenjangan atau penyimpangan. Variabel tersebut akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan nantinya akan diperoleh hasil yang menunjukkan efektif atau tidaknya pemberdayaan yang diberikan kepada fakir miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang. Maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5
Kerangka Berfikir



(Sumber : Hasil Analisis Konsep Peneliti, 2018)

2.10 Asumsi Dasar

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang dalam realitasnya ternyata masih belum optimal dalam melaksanakan pemberdayaan fakir miskin khususnya program KUBE di Kabupaten Serang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang” ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Metode eksploratif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mematahkan suatu objek secara relatif mendalam dengan mencari sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita (Arikunto, 2006 : 7). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi dinas sosial dalam pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kabupaten Serang.

Bab ini memberi gambaran tentang ; (1) penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Serang dengan subjek penelitian Dinas Sosial Kabupaten Serang, objek penelitian KUBE Kabupaten Serang, dan fokus penelitian KUBE APBD II; (2) instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini ialah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi dokumentasi; (3) cara yang digunakan peneliti untuk menganalisa data ialah dengan teknik analisis kualitatif dengan

menggunakan model interaktif dari *Miles and Huberman*; dan (4) cara yang digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta *member check*.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian “Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang” ini fokus penelitiannya yaitu pada KUBE APBD II, dimana APBD II merupakan anggaran dari APBD Kabupaten Serang dan pelaksanaan kegiatan pemberian dana KUBE pada APBD II biasanya dilakukan pada awal tahun (triwulan I).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokus penelitian dalam skripsi ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Serang yang terletak di Jl. Raya Serang Petir No. 1 Desa Cilaku Kec. Curug Serang-Banten, serta beberapa KUBE yang ada di Kec. Lebak wangi, Kec. Cikeusal, Kec. Pontang, dan Kec. Kibin Kabupaten Serang. Dengan subjek penelitian Dinas Sosial Kabupaten Serang sebagai pelaksana program KUBE, diantaranya ; Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, dan Kepala Sub Bagian Program & Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah KUBE yang ada di Kabupaten Serang, diantaranya ; KUBE Le2 Dian, KUBE Mutiara Bandeng, KUBE Wanayasa Mandiri, KUBE Jati Waringin, KUBE Patapan Sejahtera, dan KUBE Jati Waringin; beberapa TKSK (pendamping KUBE) di Kabupaten Serang, diantaranya ; TKSK Pontang, dan TKSK Lebak Wangi; serta beberapa Kepala Desa di tempat KUBE, diantaranya ; Kepala Desa Wanayasa, dan Kepala Desa Kencana Harapan. Alasan peneliti memilih beberapa KUBE tersebut adalah karena KUBE tersebut merupakan KUBE yang menerima bantuan dana dari Dinas Sosial Kabupaten Serang pada Tahun 2016 sebagai upaya dalam pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Serang.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Pada penelitian ini variabelnya adalah Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang yang akan diteliti menggunakan teori Manajemen Strategi menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch dalam Saladin (2003 : 4), yaitu :

Manajemen strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan, proses manajemen strategi ialah suatu cara dengan jalan bagaimana para perencana strategi menentukan sasaran untuk membuat kesimpulan strategi.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian), dibawah ini adalah penjabaran konsep tabel variabel penelitian :

1. Analisis dan diagnosis meliputi :
 - a. Perencanaan, yaitu menentukan/merumuskan strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dalam program pemberdayaan fakir miskin.
 - b. Tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai Dinas Sosial pada program pemberdayaan fakir miskin.
 - c. Kekuatan, yaitu meneliti kekuatan atau kelebihan yang dimiliki Dinas Sosial untuk mendukung jalannya program pemberdayaan fakir miskin.
 - d. Kelemahan, yaitu meneliti kelemahan atau kekurangan yang dimiliki Dinas Sosial agar tidak menjadi penghambat jalannya program pemberdayaan fakir miskin.
 - e. Peluang, yaitu meneliti peluang yang ada di lingkungan eksternal Dinas Sosial untuk mendukung jalannya program pemberdayaan fakir miskin.
 - f. Ancaman, yaitu meneliti ancaman yang ada di lingkungan eksternal Dinas Sosial agar tidak menjadi penghambat jalannya program pemberdayaan fakir miskin.
2. Perumusan/Formulasi, meliputi :
 - a. Alternatif strategi, yaitu menentukan beberapa alternatif strategi guna memilih strategi yang akan digunakan Dinas Sosial dalam menjalankan program pemberdayaan fakir miskin.

- b. Strategi, yaitu memilih strategi mana yang akan digunakan Dinas Sosial dalam menjalankan program pemberdayaan fakir miskin.
3. Pelaksanaan/Implementasi, meliputi :
 - a. Sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya (baik SDM maupun dana) yang dibutuhkan Dinas Sosial maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin.
 - b. Struktur, yaitu susunan terhadap cara atau metode yang digunakan Dinas Sosial maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam strategi organisasi.
 - c. Kebijakan, yaitu aturan-aturan yang digunakan Dinas Sosial maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin.
 - d. Administrasi, yaitu prosedur yang akan dijalankan Dinas Sosial maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam berbagai aktivitas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan program pemberdayaan fakir miskin.
4. Evaluasi/Pengawasan meliputi :
 - a. Bentuk evaluasi, yaitu metode atau cara Dinas Sosial dalam melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan fakir miskin.
 - b. Mekanisme evaluasi, yaitu urutan langkah yang dilakukan Dinas Sosial dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan fakir miskin.
 - c. Pihak-pihak yang terlibat, yaitu siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan fakir miskin.
 - d. Hasil dari evaluasi, yaitu dampak yang diperoleh Dinas Sosial maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) setelah melakukan evaluasi program pemberdayaan fakir miskin.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut Suharsimi Arikunto (1995) dalam Zuriyah (2009 : 168), instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data dan kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Oleh karena itu, dalam menyusun instrumen bagi kegiatan penelitian merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti.

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu informan-informan yang peneliti temukan, dimana informan ini merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Deskripsi informan yaitu menggambarkan secara umum informan-informan yang diambil sebagai narasumber yang tentunya berhubungan dengan objek yang diteliti. Sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga data dan informasi yang diambil mencapai taraf jenuh dalam penelitian kualitatif ini. Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif informan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
I	Dinas Sosial : a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial Kabupaten Serang	Key Informan
	b. Kepala Sub Bagian Program & Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang	Key Informan
	c. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang	Key Informan
II	TKSK : a. Pendamping KUBE Kec. Pontang di Kabupaten Serang	Key Informan
	b. Pendamping KUBE Kec. Lebak Wangi di Kabupaten Serang	Key Informan
III	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) a. Ketua KUBE Le2 Dian di Kabupaten Serang	Secondary Informan
	b. Ketua KUBE Wanayasa Mandiri di Kabupaten Serang	Secondary Informan
	c. Ketua KUBE Dua Putra di Kabupaten Serang	Secondary Informan
	d. Ketua KUBE Mutiara Bandeng di Kabupaten Serang	Secondary Informan
	e. Ketua KUBE Jati Waringin di Kabupaten Serang	Secondary Informan
	f. Anggota KUBE Patapan Sejahtera di Kabupaten Serang	Secondary Informan
IV	Kepala Desa : a. Kepala Desa Wanayasa di Kabupaten Serang	Secondary Informan
	b. Kepala Desa Kencana Harapan di Kabupaten Serang	Secondary Informan

(Sumber : Peneliti, 2018)

Berdasarkan tabel diatas, peneliti memilih beberapa informan untuk menjadi narasumber (sumber data). Narasumber yang menjadi *Key Informan* diantaranya ; (I₁) ialah pihak Dinas Sosial Kabupaten Serang sebagai pelaksana program pemberdayaan Fakir Miskin, seperti : I₁₋₁ ialah Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebagai

penanggungjawab program KUBE, I₁₋₂ ialah Kepala Sub Bagian Program & Evaluasi sebagai pengawas dan pembuat hasil evaluasi program-program PMKS yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Serang, dan I₁₋₃ ialah Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai penanggungjawab pemberdayaan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Serang; dan (I₂) ialah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga inti pengendali (pendamping) kegiatan KUBE yang ada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Serang. Sedangkan yang menjadi *Second Informan* dalam penelitian ini, diantaranya : (I₃) ialah pihak yang menerima atau objek dari program pemberdayaan Fakir Miskin khususnya KUBE dan (I₄) ialah Kepala Desa di tempat Usaha KUBE sebagai pihak dari Keluarga Fakir Miskin yang memohon bantuan KUBE ke Dinas Sosial di Kabupaten Serang.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.7.1 Pengamatan/Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan namun tidak terlibat secara langsung dengan objek penelitian, peneliti hanya

melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin yang berada di beberapa Kecamatan di Kabupaten Serang.

3.7.2 Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur yang bersifat mendalam. Dalam wawancara tidak terstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan dan memahami apa yang diceritakan oleh narasumber. Adapun kisi-kisi pertanyaan pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang dibuat dalam bentuk pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan yaitu tentang manajemen strategi Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang, dan program-program dalam pemberdayaan fakir miskin, serta bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Serang kepada Fakir Miskin yang ada di Kabupaten Serang.

Pedoman wawancara merupakan alur atau pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Pedoman wawancara ini disusun untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara yang akan dilakukan. Pedoman wawancara tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

No.	Dimensi	Indikator	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
1.	Analisis dan diagnosis	a. Perencanaan	1. Apa saja yang dilakukan Dinas Sosial dalam perencanaan terkait program pemberdayaan Fakir Miskin KUBE. 2. Siapa saja pihak-pihak yang ikut serta dalam perencanaan program tersebut. 3. Kapan perencanaan program tersebut dilakukan.	Dinas Sosial Kab. Serang
		b. Tujuan	4. Apa tujuan dari program KUBE fakir miskin ini.	
		c. Kekuatan	5. Usaha apa saja yang dilakukan dinas sosial dalam program KUBE ini.	
		d. Kelemahan	6. Apa saja kendala yang ada pada dinas sosial dalam program KUBE ini.	
		e. Peluang	7. Apa saja dukungan yang diterima oleh dinas sosial dalam program KUBE ini.	
		f. Ancaman	8. Apa hambatan yang diterima oleh dinas sosial dalam program KUBE ini.	
2.	Perumusan/ Formulasi	a. Alternatif strategi	9. Bagaimana dinas sosial membuat strategi yang digunakan untuk pelaksanaan program KUBE ini.	Dinas Sosial Kab. Serang
		b. Strategi	10. Bagaimana dinas sosial memutuskan strategi yang digunakan untuk pelaksanaan program KUBE ini. 11. Siapa saja pihak-pihak yang ikut serta dalam pembuatan dan penentuan strategi yang digunakan untuk pelaksanaan program KUBE ini.	
3.	Pelaksanaan/ Implementasi	a. Sumber daya	12. Bagaimana dinas sosial mengatur SDM (pegawai dinsos dan TKSK) maupun dana dalam program KUBE ini. 13. Bagaimana ketua kube mengatur SDM maupun dana yang diberikan untuk	Dinas Sosial Kab. Serang, KUBE

			pelaksanaan usahanya.	Fakir Miskin, TKSK, dan Kepala Desa.
		b. Struktur	14. Bagaimana struktur kerja yang terjadi dalam pelaksanaan program KUBE ini. 15. Bagaimana pembagian tugas yang terjadi dalam program KUBE ini.	
		c. Kebijakan	16. Peraturan/kebijakan apa yang digunakan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE ini. 17. Peraturan apa yang digunakan ketua KUBE dalam pelaksanaan usahanya.	
		d. Administrasi	18. Bagaimana prosedur/proses pelaksanaan program KUBE ini. 19. Bagaimana proses pencairan dana yang terjadi dalam program KUBE ini. 20. Bagaimana pola komunikasi yang terjadi dalam program KUBE ini. 21. Adakah pembinaan/pembekalan terkait KUBE terhadap penerima KUBE.	
4.	Evaluasi	a. Bentuk Evaluasi	22. Apa bentuk evaluasi yang dilakukan dalam evaluasi program KUBE ini.	Dinas Sosial, KUBE Fakir Miskin, TKSK, dan Kepala Desa.
		b. Mekanisme Evaluasi	23. Bagaimana mekanisme/cara dalam melakukan evaluasi terkait program KUBE ini.	
		c. Pihak-pihak yang terlibat	24. Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi program KUBE ini.	
		d. Hasil dari evaluasi	25. Bagaimana hasil dari evaluasi program ini.	

(Sumber : Peneliti, 2018)

Pedoman wawancara ini disusun dengan fokus penelitian peneliti berdasarkan apa yang nantinya akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan yang kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggung jawabkan kredibilitas datanya.

3.7.3 Studi Dokumentasi

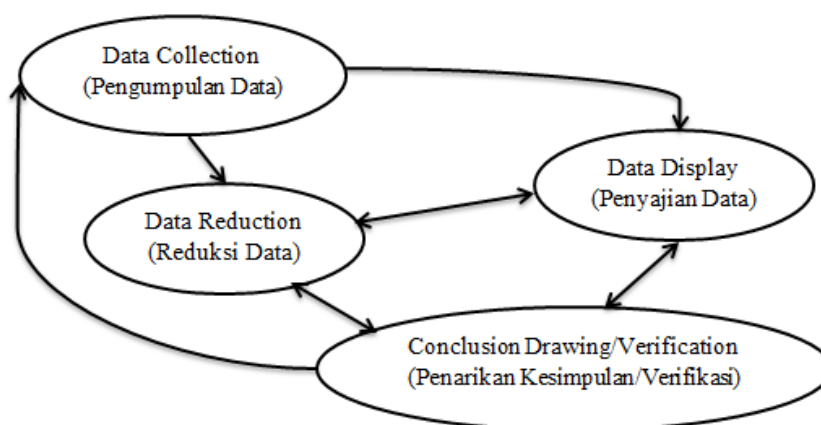
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi di dapat dari dokumentasi resmi pemerintah, dimana peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi (*library research*). Prinsip teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggali data dokumen yang telah tersedia dalam perpustakaan. Dokumen tidak hanya catatan peristiwa saat ini dan yang akan datang, namun juga catatan masa lalu. Data-data yang di dapat peneliti berupa gambar dan tabel dari data Dinas Sosial Kabupaten Serang serta foto-foto objek penelitian. Dokumen resmi yang di dapat antara lain ; Selayang Pandang Dinas Sosial Kabupaten Serang, Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016-2020, dan Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Kesejahteraan Sosial 2015-2016.

3.8 Teknis Pengolahan dan Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dengan menggunakan model interaktif dari Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011 : 246), yang menggunakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh. Model interaktif dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)



(Sumber : Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Sugiyono, 2011 : 247)

Proses datanya mencakup :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Reduksi data berarti proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dan mencari yang diperlukan.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Selanjutnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. *Conclusions Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.9 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan peneliti adalah uji kredibilitas data yang bertujuan untuk mengetahui derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang didapat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan *member check*.

3.9.1 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2008 : 125), triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Selanjutnya Sugiyono (2008 : 127 – 128) membedakan teknik ini menjadi tiga macam, yaitu :

1. Triangulasi Sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam ketiga macam triangulasi di atas, peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sumber data pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Serang, Ketua KUBE Fakir Miskin yang ada di Kabupaten Serang, anggota TKSK di Kabupaten Serang, dan beberapa Kepala Desa yang ada di Kabupaten Serang.

3.9.2 Member Check

Menurut Sugiyono (2008 : 129), *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang ditemukan di lapangan disepakati oleh narasumber (pemberi data), maka data tersebut valid sehingga dapat dikatakan kredibel (dapat dipercaya). Namun apabila sebaliknya, dimana narasumber tidak menyetujui data maka kita harus mengubah temuan dan menyesuaikan data dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Setelah narasumber menyetujuinya, kita dapat meminta untuk menandatangani data tersebut agar lebih otentik. Selain itu, langkah tersebut dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*.

3.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi tentang aktivitas serta waktu yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Jadwal pada penelitian ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian							
		2016		2017				2018	
		Mar	Jun - Des	Jan - Juni	Juli	Juli - Sept	Sept - Des	Jan - Mar	Apr
1	Pengumuman Judul								
2	Observasi Awal								
3	Penyusunan Proposal								
4	Bimbingan dan Perbaikan Proposal								
5	Seminar Proposal								
6	Revisi Proposal								
7	Proses Pengumpulan Data di Lapangan								
8	Reduksi Data								
9	Penyajian Data dan Penyusunan Laporan Penelitian								
10	Sidang Skripsi								

(Sumber : Peneliti, 2018)

BAB IV

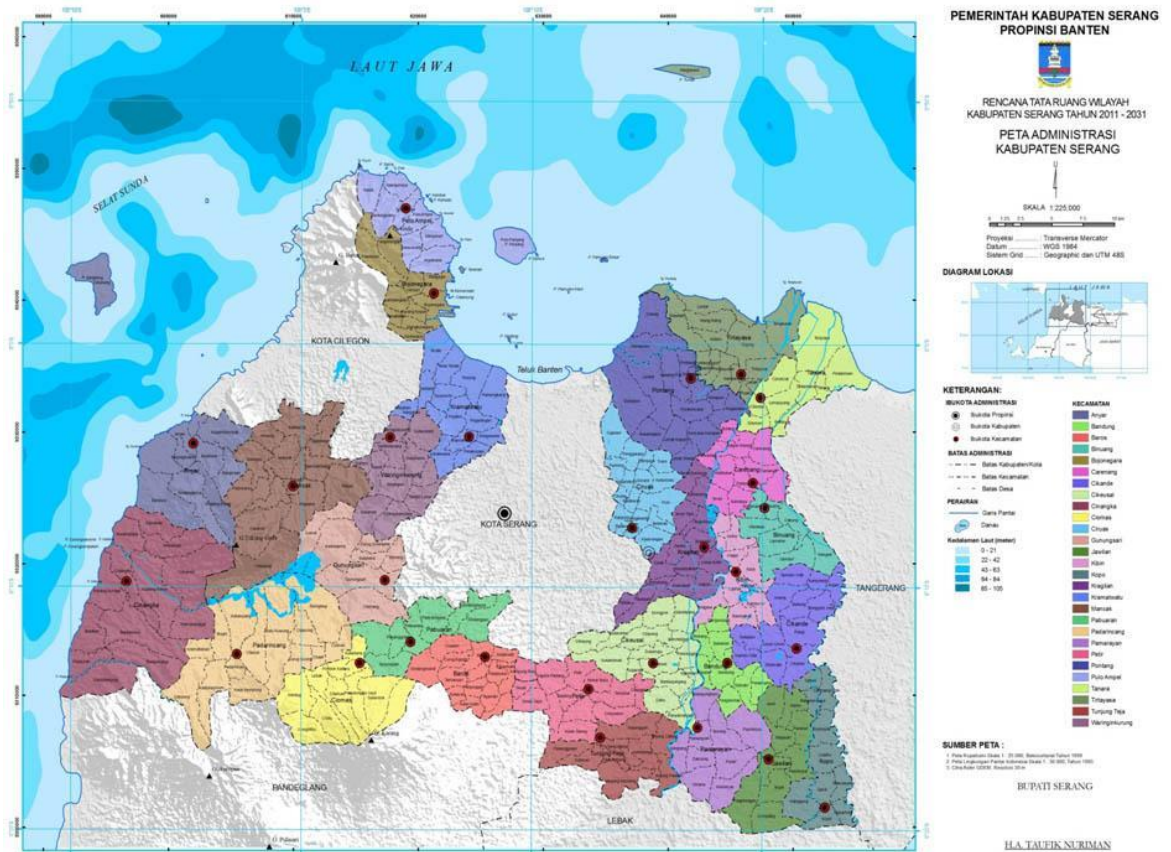
HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Serang beserta Dinas Sosial Kabupaten Serang selaku Dinas yang berwenang untuk melakukan Manajemen Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia. Secara administratif Kabupaten Serang terdiri atas 29 Kecamatan (Anyar, Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Lebak Wangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, dan Waringin Kurung) dan 326 Desa. Adapun peta Kabupaten Serang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Serang



(Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2018)

Secara letak geografis, Kabupaten Serang merupakan daerah yang sangat potensial dan amat diuntungkan. Posisi geografis dalam aksesibilitas keluar masuk wilayah Kabupaten Serang cukup strategis, karena dilalui oleh jalan Tol Jakarta – Merak yang merupakan akses utama dari dan menuju Pulau Sumatera melalui transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu, Kabupaten Serang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pabrik, tempat wisata maupun perindustrian dan perikanan,

namun masih banyak permasalahan sosial yang dihadapi oleh Kabupaten ini. Berikut adalah rekapitulasi data PMKS khususnya Keluarga Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Serang per Kecamatan Tahun 2016 :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Data PMKS khususnya Keluarga Fakir Miskin di
Dinas Sosial Kabupaten Serang per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Keluarga Fakir Miskin	
		Jumlah KK	Jumlah Individu
1	Kramatwatu	3.325	12.996
2	Waringin Kurung	4.336	16.047
3	Bojonegara	2.748	9.962
4	Pulo Ampel	1.569	5.002
5	Ciruas	5.530	18.586
6	Kragilan	3.432	12.345
7	Pontang	2.161	8.020
8	Tirtayasa	5.104	17.192
9	Tanara	2.410	9.388
10	Cikande	4.422	14.250
11	Kibin	2.716	9.055
12	Carenang	3.679	12.480
13	Binuang	1.791	5.409
14	Petir	7.277	24.112
15	Tunjung Teja	3.056	10.261
16	Baros	4.814	18.221
17	Cikeusal	5.248	18.756
18	Pamarayan	4.373	16.882
19	Kopo	4.316	17.290
20	Jawilan	2.589	8.007
21	Ciomas	4.059	15.178
22	Pabuaran	1.725	7.044
23	Padarincang	5.009	17.359
24	Anyar	4.011	14.456
25	Cinangka	6.011	20.034
26	Mancak	2.757	10.352

27	Gunung Sari	1.568	5.977
28	Bandung	3.084	10.378
29	Lebak Wangi	3.358	12.613
Jumlah		106.478	377.622

(Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui jumlah Fakir Miskin terbanyak ada pada Kecamatan Petir yaitu sebanyak 7.277 Kepala Keluarga atau sekitar 24.112 orang. Sedangkan jumlah Fakir Miskin terendah ada pada Kecamatan Gunung Sari yaitu sebanyak 1.568 Kepala Keluarga atau sekitar 5.977 orang. Jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Serang sebanyak 377.622 orang, sedangkan menurut Dinas Sosial Kabupaten Serang jumlah Fakir Miskin yang sudah diberdayakan setiap tahunnya berbeda-beda. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program pemberdayaan fakir miskin yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Serang. KUBE ialah keluarga miskin yang dibentuk secara kelompok, selanjutnya kelompok tersebut diharapkan tumbuh dan berkembang dengan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh kelompok tersebut dengan tujuan meningkatkan pendapatan hidup keluarga miskin tersebut. Berikut data penerima KUBE Fakir Miskin APBD II Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016 :

Tabel 4.2
Data Penerima KUBE Fakir Miskin APBD II
Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016

No.	Kecamatan	Desa	Nama KUBE	Jenis Usaha
1	Pamarayan	Wirana	Saluyu	Budidaya Ikan Lele
2		Wirana	Cipta Mandiri	Ternak Kambing
3		Pudar	Maju Bersama	Budidaya Ikan Lele
4		Pudar	Rakyat Mandiri	Ternak Kambing
5		Sangiang	Mutiara	Budidaya Ikan Lele
6	Anyer	Bandulu	Pelita	Tenda & Panggung
7		Bandulu	Bina Usaha	Penyewaan Papan Selancar
8	Kragilan	Sukajadi	Al-Muhibbin I	Jasa Pesta
9		Sukajadi	Al-Muhibbin II	Jasa Pesta
10	Lebak Wangi	Kebon Ratu	Maju Sejahtera	Perbengkelan
11		Kebon Ratu	Harapan Jaya	Perbengkelan
12		Kencana Harapan	Tunas Mandiri	Perbengkelan
13		Kencana Harapan	Jati Waringin	Ternak Bebek
14		Kencana Harapan	Harapan Mandiri	Ternak Bebek
15		Kencana Harapan	Ghonam Jaya	Ternak Kambing
16		Kencana Harapan	Adem Ayem	Ternak Lele
17	Tunjung Teja	Pancaregang	Makmur I	Jasa Pesta
18		Pancaregang	Makmur II	Jasa Pesta
19		Bojong Menteng	Makmur Jaya	Jasa Pesta (Kursi)
20		Bojong Menteng	Cilandak Jaya	Tabung Gas
21		Bojong Menteng	Makmur Mandiri	Jasa Pesta (Tenda)
22		Bojong Menteng	Cilandak Berdikari	Jasa Pesta (Tenda)
23	Kibin	Nagara	Patapan Sejahtera	Ternak Kambing
24		Nagara	Harapan Jaya	Ternak Kambing
25	Cikeusal	Sukaratu	Jamur Barokah	Budidaya Jamur
26		Cimaung	Dua Putra	Perbengkelan
27	Pontang	Wanayasa	Le2 Dian	Pengelolaan Bontot Ikan Payus
28		Wanayasa	Mutiara Bandeng	Pengelolaan Dendeng
29		Wanayasa	Bandeng Jaya	Pengelolaan Dendeng Bandeng
30		Wanayasa	Wanayasa Mandiri	Jasa Pesta
31	Gunung Sari	Gunung Sari	R&R	Pedagang Makanan & Minuman
32	Cinangka	Mekarsari	Bangkit	Ternak Kambing
33		Mekarsari	Sejahtera	Jasa Pesta (Kursi)
34		Bantarwangi	Berdikari I	Jasa Mesin Traktor
35		Bantarwangi	Berdikari II	Jasa Pesta (Kursi)

(Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa kelompok usaha bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kabupaten Serang tahun 2016 pada APBD II terdiri dari 35 KUBE. Kecamatan terbanyak yang menerima KUBE ialah Kecamatan Lebak Wangi 6 KUBE, sedangkan yang terkecil ialah Kecamatan Gunung Sari 1 KUBE.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini mengenai Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan teori proses manajemen strategi menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch dalam Saladin (2003 : 4). Teori ini memberikan gambaran atau proses manajemen strategi yang meliputi ; Analisis dan Diagnosis, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, obeservasi dan dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi merupakan sumber utama

dalam penelitian ini. Kata-kata dan tindakan informan merupakan sumber utama penelitian. Kemudian sumber data dicatat oleh peneliti dengan menggunakan catatan tertulis dan direkam melalui *handphone* yang peneliti gunakan dalam penelitian. Sumber data sekunder yang didapatkan peneliti berupa dokumentasi seperti; dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016-2017, dokumen Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016-2020, dan profil KUBE di Kabupaten Serang merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lain berupa foto-foto lapangan dimana foto-foto tersebut merupakan foto kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan fakir miskin KUBE di Kabupaten Serang.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan kajian pustaka kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis untuk mendapatkan pola serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan pada jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam penyusunan jawaban penelitian, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data peneliti memberikan kode-kode sebagai berikut:

- a. Kode Q menunjukkan daftar pertanyaan;
- b. Kode Q₁, Q₂, Q₃ dan seterusnya menunjukkan daftar urutan pertanyaan;
- c. Kode I menunjukkan informan;

- d. Kode I₁, I₂, I₃ dan seterusnya menunjukkan daftar urutan informan;
- e. Kode I₁₋₁, I₁₋₂, I₁₋₃, I₁₋₄ menunjukkan daftar informan dari instansi pemerintah, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Serang;
- f. Kode I₂₋₁, I₂₋₂ menunjukkan daftar informan dari Pendamping KUBE, yaitu TKSK di Kabupaten Serang;
- g. Kode I₃₋₁, I₃₋₂, I₃₋₃, I₃₋₄, I₃₋₅, I₃₋₆ menunjukkan daftar informan dari beberapa Ketua KUBE yang ada di Kabupaten Serang;
- h. Kode I₄₋₁, I₄₋₂ menunjukkan daftar informan dari beberapa Kepala di Kabupaten Serang;
- i. Kode P menunjukkan Peneliti.

Setelah pembuatan koding pada tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. Selanjutnya dengan triangulasi yaitu proses *check* dan *recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya. Setelah semua proses analisis data telah dilakukan peneliti dapat melakukan penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir data diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh.

4.2.2 Data Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang. Dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti menggunakan cara pengambilan sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni dengan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui situasi yang sedang peneliti teliti.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial Kabupaten Serang, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang, Kepala Sub Bagian Program & Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang, Pendamping KUBE di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, Ketua KUBE yang ada Kabupaten Serang, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang. Adapun yang menjadi *key informan* dan *secondary informan* dalam penelitian ini diantaranya :

Tabel 4.3
Informan Penelitian

No.	Informan	Status Informan (SI)	Jenis Kelamin	Kode Informan (I)
Dinas Sosial Kabupaten Serang				
1	H. Yayat Sutiana, SE	Kasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial	Laki-laki	I ₁₋₁
2	Dian Mardiani	KaSub Bag. Program & Evaluasi Dinas Sosial	Perempuan	I ₁₋₂
3	Betty Rubiyati, S	KaBid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	Perempuan	I ₁₋₃
Pendamping KUBE (TKSK)				
4	Iis Isrofiah	TKSK Kec. Pontang	Perempuan	I ₂₋₁
5	Irfan Firdaus	TKSK Kec. Lebak Wangi	Laki-laki	I ₂₋₂
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				
6	Jahroh	Ketua KUBE Le2 Dian	Perempuan	I ₃₋₁
7	Ihkwan	Ketua KUBE Wanayasa Mandiri	Laki-laki	I ₃₋₂
8	Sopian Yasa D	Ketua KUBE Dua Putra	Laki-laki	I ₃₋₃
9	Hamdanah	Ketua KUBE Mutiara Bandeng	Perempuan	I ₃₋₄
10	M. Rafe'i	Ketua KUBE Jati Waringin	Laki-laki	I ₃₋₅
11	Naeni	Anggota KUBE Patapan Sejahtera	Laki-laki	I ₃₋₆
Kepala Desa				
12	Anita, S.Pd	Kepala Desa Wanayasa	Perempuan	I ₄₋₁
13	H. Suwandi	Kepala Desa Kencana Harapan	Laki-laki	I ₄₋₂

(Sumber : Peneliti, 2018)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, informan penelitian dalam penelitian ini terdapat 13 informan yang terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Serang. TKSK (Pendamping KUBE), Ketua KUBE, dan Kepala Desa di wilayah KUBE tersebut. Informan di Dinas Sosial Kabupaten Serang terdapat 3 informan, yaitu : (I₁₋₁) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial Kabupaten Serang bapak H. Yayat Sutiana SE, beliau merupakan penanggung jawab langsung program KUBE sehingga beliau yang membuat perencanaan dari awal hingga evaluasi program KUBE berlangsung; selanjutnya (I₁₋₂)

Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang ibu Dian Mardiani M.Si., beliau merupakan pengawas dan pembuat hasil evaluasi program-program PMKS yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Serang sehingga beliau yang menentukan apakah laporan perencanaan program KUBE sesuai dengan renstra dan dapat dijalankan atau tidak serta yang menentukan apakah LPJ program KUBE sesuai target dan sasaran atau tidak; dan terakhir (I₁₋₃) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang ibu Betty Rubiyati S.Sos., beliau merupakan penanggungjawab pemberdayaan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Serang sehingga beliau yang membantu pak yayat dalam menentukan strategi untuk program KUBE, membuat LPJ program KUBE.

Kemudian informan di TKSK (pendamping KUBE) terdapat 2 informan, yaitu : (I₂₋₁) TKSK Pontang ibu Iis Isrofiaah, beliau merupakan pendamping KUBE di Kecamatan Pontang dan pihak perantara antara KUBE dengan Dinas Sosial sehingga beliau pihak yang mengetahui jalannya program KUBE dari awal permohonan porosal hingga akhir evaluasi; dan (I₂₋₂) TKSK Lebak Wangi bapak Irfan Firdaus, beliau merupakan pendamping KUBE di Kecamatan Lebak Wangi dan pihak perantara antara KUBE dengan Dinas Sosial selain itu pada tahun 2016 Lebak Wangi merupakan Kecamatan yang menerima paling banyak bantuan KUBE 7 KUBE.

Selanjutnya informan di KUBE terdapat 6 informan, yaitu : (I₃₋₁) Ketua KUBE Le2 Dian ibu Jahroh, beliau merupakan Ketua KUBE yang memiliki usaha pengelolaan Bontot ikan payus dan usaha yang dilakukan sampai sekarang masih berjalan dan berkembang; (I₃₋₂) Ketua KUBE Wanayasa Mandiri bapak Ikhwan, beliau merupakan Ketua KUBE yang memiliki usaha jasa pesta (kursi dan tenda) dan usaha yang dilakukan berlangsung dan berkembang sampai sekarang dan dapat membantu masyarakat desa wanayasa dalam penyewaan jasa pesta; (I₃₋₃) Ketua KUBE Dua Putra bapak Sopian Yasa, beliau merupakan ketua KUBE yang memiliki usaha perbengkelan Las Mobil dan dapat dikatakan memiliki modal dan pendapatan yang besar karena jenis usahanya yang jarang ada di daerah perdesaan; (I₃₋₄) Ketua KUBE Mutiara Bandeng ibu Hamdanah, beliau merupakan Ketua KUBE yang memiliki usaha dendeng dan usahanya berkembang pesat sampai saat ini karena jenis usahanya bertambah dan anggota yang dimiliki makin banyak; (I₃₋₅) Ketua KUBE Jati Waringin bapak M.Rafe'i, beliau merupakan Ketua KUBE yang memiliki usaha ternak bebek dan usahanya sampai sekarang berkembang dan dapat memberikan pendapatan bagi para anggotanya; dan (I₃₋₆) anggota KUBE Patapan Sejahtera bapak Naeni, beliau merupakan anggota KUBE yang memiliki usaha ternak kambing dan usahanya sampai sekarang masih ada namun tidak memiliki keuntungan karena kambing yang ditenak tidak bertambah dan anggota KUBE yang lain pun menyerahkan pengurusan

kambing tersebut ke bapak naeni ini. Peneliti memilih keenam informan ini karena jenis usaha mereka yang berbeda-beda dan sampai sekarang usahanya masih ada namun memiliki perkembangan yang berbeda-beda.

Informan terakhir dalam penelitian ini ialah Kepala Desa tempat usaha berlangsung, terdapat 2 informan dalam penelitian ini yaitu : (I₄₋₁) Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Pontang ibu Anita, beliau merupakan Kepala Desa yang wilayahnya pada tahun 2016 diberikan bantuan KUBE 4 kelompok dan KUBE di sana sampai sekarang perkembangan usahanya sangat baik; dan (I₄₋₂) Kepala Desa Kencana Harapan bapak Suwandi, beliau merupakan Kepala Desa yang wilayahnya pada tahun 2016 diberikan bantuan KUBE paling banyak 5 kelompok dan perkembangan usahanya cukup baik. Peneliti mencukupkan yang menjadi informan dalam penelitian ini hanya pada orang-orang atau kelompok yang telah tercantum di atas dengan pertimbangan karena berdasarkan proses pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti telah bersifat jenuh dan telah menghasilkan kesimpulan yang kredibel dengan didukung oleh data yang valid dan konsisten yang ditemukan kembali oleh peneliti sehingga peneliti tidak lagi menambah daftar informan dalam penelitian ini.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu manajemen strategi. Berdasarkan temuan lapangan yang didapatkan oleh peneliti mengenai pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan fakir miskin itu merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, melalui ; peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan sosial. Berdasarkan hal tersebut untuk melakukan manajemen strategi yang akan dibuat dan direkomendasikan oleh peneliti, terlebih dahulu peneliti melihat manajemen strategi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas terkait. Dalam hal ini, maka pihak yang berwenang untuk melakukan pemberdayaan sosial kepada fakir miskin KUBE adalah pihak yang membidangi fakir miskin yaitu Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Serang berfokus pada upaya pemberdayaan fakir miskin, berkaitan dengan pengawasan terhadap program-program terkait, penanganan terhadap kasus-kasus PMKS, serta penanggulangan terhadap kemiskinan dalam penerapannya. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala dan keterbatasan dalam penerapan tanggung jawab tersebut, namun selama

ini Dinas Sosial selalu berupaya untuk melakukan pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya agar dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan yang didasarkan pada temuan lapangan, maka peneliti akan menjelaskan data di lapangan berdasarkan pada indikator-indikator teori manajemen strategi menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch dalam Saladin (2003 : 4), yang peneliti gunakan sebagai berikut :

4.3.1 Analisis dan Diagnosis

Analisis dan Diagnosis adalah merumuskan/merencanakan strategi dan menentukan tujuan organisasi. Analisis dan diagnosis SWOT ini terdiri dari lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi. Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab di sektor sosial yaitu memberikan bantuan dan perlindungan sosial melalui kegiatan pelayanan pemberdayaan, rehabilitasi, jaminan dan pembinaan yang berkenaan dengan masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki visi :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial menuju Masyarakat Kabupaten Serang yang Adil dan Berkualitas”

Perumusan visi tersebut mengidentifikasi visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang masuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya Fakir Miskin menjadi berkesejahteraan sosial. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₁) mengenai tujuan dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), beliau menjelaskan :

“Tujuan dari program kube ini agar masyarakat miskin di kabupaten serang berkurang setiap tahunnya. Dengan cara kita sebagai dinas sosial, dinas yang menanganin masalah sosial masyarakat di kab. serang ini memberikan bantuan (baik itu dana, barang untuk usaha maupun dorongan moril)”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Hal ini juga senada dengan pernyataan Ibu Betty Rubiyati, S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan :

“Tujuan dari program KUBE ini pastinya tingkat kemiskinan di kabupaten serang berkurang, dengan cara kita sebagai dinas sosial kabupaten serang membantu fakir miskin tersebut dengan memberikan bantuan usaha agar mereka mempunyai pekerjaan dan memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Hal ini pun dipertegas oleh Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), beliau mengatakan :

“Tujuan dasar dari program KUBE ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat khususnya yang ada di desa-desa. Dimana masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan kita beri bantuan usaha dalam bentuk kelompok agar mereka-mereka ini memiliki pendapatan usaha, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun tidak besar”. (Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Selain itu pendamping KUBE Pontang (I₂₋₁) dan pendamping KUBE Lebak Wangi (I₂₋₂) pun mengatakan bahwa :

“Tujuan KUBE itu untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki pekerjaan dan pendapatan, sehingga kemiskinan di daerah ini berkurang”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiyah, 8 Februari 2018).

“Tujuan KUBE untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah ini dengan cara memberikan bantuan usaha kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan”. (Wawancara dengan Bapak Irfan Firdaus, 8 Februari 2018).

Dari berbagai pernyataan (I₁₋₁ – I₂₋₂) diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan dari program KUBE ialah mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang, khususnya yang ada di daerah perdesaan, dengan cara memberikan bantuan usaha kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan dengan membentuk kelompok usaha agar mereka memiliki pekerjaan dan pendapatan, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Serang meningkat.

Sedangkan sasaran keberhasilan dari program KUBE menurut Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₁), ialah :

“Sasaran keberhasilannya dari hasil pengawasannya, ada berapa banyak yang masih berjalan saat kita lakukan pengawasan pada akhir tahun”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Hal tersebut dikatakan pula oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan:

“Sasaran keberhasilan KUBE, dapat dilihat pada evaluasi akhir tahun, dimana kita bisa melihat berapa jumlah KUBE yang masih ada. Karena sebelum-sebelumnya KUBE yang telah diberi bantuan melaksanakan usahanya hanya sebentar”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Selanjutnya Ibu Dian Mardiani selaku Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), beliau menjelaskan :

“Sasaran keberhasilan KUBE itu dapat dilihat setelah akhir tahun berjalan. Kita melihat dari perbandingan berapa jumlah KUBE awal yang yang kami beri bantuan, dengan saat akhir tahun di laporan evaluasi pelaksanaan KUBE. Itu nanti kebaca apakah tahun berjalan ini program KUBE dapat dikatakan berhasil, kurang berhasil, atau tidak berhasil”.(Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Kemudian pendamping KUBE Pontang (I₂₋₁) dan pendamping KUBE Lebak Wangi (I₂₋₂), pun mengatakan bahwa :

“Sasaran keberhasilan KUBE ialah usaha yang telah diberikan modal usaha oleh dinstos ini berjalan, agar anggota-anggota KUBE ini memiliki pendapatan untuk keluarganya”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, 8 Februari 2018).

“Sasaran keberhasilan kube ini apabila usaha yang dijalankan tetap ada dan memberikan dampak positif kepada anggota kube tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Irfan Firdaus, 8 Februari 2018).

Penjelasan mengenai sasaran keberhasilan KUBE yang telah dijelaskan dari (I₁₋₁ – I₂₋₂) diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa sasaran keberhasilan dari program KUBE ialah sasaran keberhasilan KUBE dapat dilihat dari berapa jumlah KUBE yang masih berjalan pada saat evaluasi berlangsung dan dari usaha tersebut memberikan dampak positif kepada anggota kube tersebut. Tujuan dan sasaran keberhasilan yang telah dijelaskan diatas merupakan harapan yang diinginkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan program KUBE tersebut. Namun pada kenyataannya Dinas Sosial Kabupaten Serang masih mengalami permasalahan dalam menjalani program pemberdayaan fakir miskin, seperti motivasi usaha yang dimiliki kelompok usaha tidak konsisten. Sehingga mengakibatkan usaha KUBE hanya berjalan kurang dari tiga tahun.

Setiap tahunnya Dinas Sosial Kabupaten Serang selalu melakukan perencanaan terkait program KUBE ini agar pelaksanaan KUBE ini sesuai dengan tujuan dan sasaran awal keberhasilan tersebut.

Pada program KUBE, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁) merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Pada tahun perencanaan beliau mengatakan :

“Mengenai perencanaan biasanya bidang penanganan fakir miskin membicarakannya dengan bidang lain dahulu, karena setiap tahun dinas sosial sering mengadakan penyuluhan terkait program-program yang ada di dinas sosial salah satunya program kube ini. Biasanya dari penyuluhan di beberapa daerah tersebut ada beberapa proposal yang masuk ke dinas sosial untuk pengajuan bantuan usaha ini. Nanti setiap pertengahan tahun sebelumnya (seperti untuk tahun 2017 ini, kita sudah seleksi proposal yang akan diterima atau tidaknya dari bulan mei-agustus tahun 2016 lalu), kita menyeleksi dulu dari orang-orang dalam anggota kube ini mana yang datanya ada di data basis terpadu, lalu punya kartu jamsosratu, jamsostek, bpjs, dll. Setelah kita menyeleksi proposal yang kita terima, kita menghitung anggaran yang sekiranya tahun depan akan kita terima dari APBD kab. serang itu berapa (karena program dinkos itu banyak jadi kita harus membagi-baginya setiap program itu dapat anggaran berapa). Lalu kita juga buat pelatihan kepada kelompok-kelompok usaha yang akan menerima bantuan (biasanya itu pelatihan usaha, pembuatan laporan keuangan sederhana untuk usahanya, dan ilmu tentang usaha-usaha apa saja yang mau mereka lakukan). Karena program KUBE ini setiap tahunnya ada, jadi pihak yang melakukan perencanaan biasanya, saya sebagai kasie penanganan fakir miskin perdesaan, dan ibu Betty sebagai kepala bidang penanganan fakir miskin. Mungkin itu perencanaan yang biasanya kita lakukan”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Selanjutnya Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (I₁₋₃), sebagai bidang yang bertanggung jawab terhadap program KUBE, mengatakan :

“Dalam hal perencanaan KUBE yang kita lakukan sebagai bidang yang menangani fakir miskin (bukan hanya KUBE tapi ada juga PRSE dan RTLH), kalo tahun ini menyiapkan data proposal yang akan diberikan bantuan usaha dengan menyeleksi proposal usaha yang diajukan beberapa fakir miskin yang ada kabupaten serang. Setelah datanya fix kita membuat jadwal pelatihan, pemberian dana serta waktu untuk melakukan pengawasan. Lalu pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan ini yaitu ; saya sebagai kabid, pak yayat sebagai kasek penanganan fakir miskin perdesaan, bagian program dan evaluasi, dan kepala dinas sebagai pengawas dalam perencanaan ini”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Pada tahun perencanaan program ini yang melakukan perencanaan ialah bidang penangan fakir miskin selaku bidang yang bertanggung jawab pada program KUBE ini, hal ini diperjelas oleh Ibu Dian Mardiani selaku Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), beliau menjelaskan :

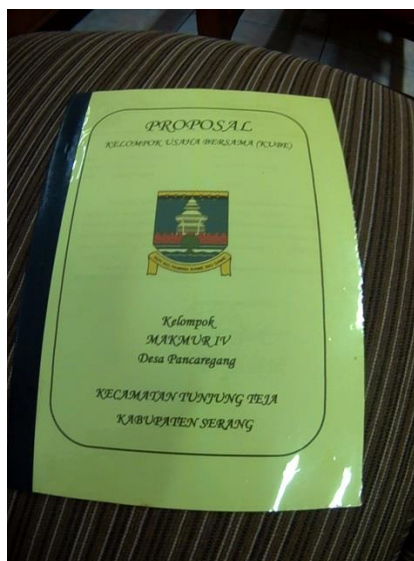
“Untuk perencanaan program sendiri, itu yang melakukan masing-masing bidang. Nanti setelah perencanaan dibuat baru perbidang itu memberikan laporan perencanaan itu ke sub program dan evaluasi. Lalu oleh sub program dan evaluasi ini dilihat apakah perencanaan yang dibuat oleh bidang itu sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ada di dalam rencana strategi dinsos”.(Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan (I₁₋₁ – I₁₋₃) diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Perencanaan yang dilakukan dalam program KUBE ialah menyeleksi proposal usaha yang diajukan beberapa fakir miskin yang ada Kabupaten Serang. Salah satu contoh

proposal usaha yang diajukan Kelompok Fakir Miskin dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.2

Contoh Proposal Usaha



(Sumber : Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun, 2016)

Pada gambar 4.2 di atas merupakan salah satu contoh proposal usaha yang diajukan oleh kelompok Makmur IV Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja. Proposal usaha tersebut berisikan latar belakang mengenai usaha yang akan dibuat, anggaran yang dibutuhkan untuk modal usaha tersebut, perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan usaha, data nama-nama anggota KUBE, serta kesimpulan dari proposal usaha.

Dalam proses penyeleksian proposal ini melihat beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang, diantaranya ; nama-nama yang dilampirkan dalam proposal ada di

dalam data basis terpadu fakir miskin daerah Kabupaten Serang, memiliki KK dan KTP yang berdomisili di Kabupaten Serang. Selanjutnya menghitung anggaran untuk dana bantuan, dana pelaksanaan sosialisasi sampai dana yang diperlukan pada evaluasi program. Setelah perencanaan tersebut dibuat, laporan perencanaan diserahkan kepada bidang sub program dan evaluasi, oleh sub program dan evaluasi dilihat apakah perencanaan yang dibuat untuk program KUBE sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ada di dalam rencana strategi Dinas Sosial. Dalam perencanaan ini pendamping desa (TKSK) tidak dilibatkan.

Pada tahanan perencanaan awal program KUBE ini, Dinas Sosial merumuskan/merencanakan strategi yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan program agar pelaksanaan KUBE tersebut sesuai dengan target rencana kerja. Dalam merencanakan strategi tersebut Dinas Sosial harus menganalisis atau mendiagnosis SWOT program KUBE Dinas Sosial. Analisis tersebut terdiri dari lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi. Serta dari lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman organisasi.

Untuk lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan, peneliti mewawancarai pihak Dinas Sosial terkait kekuatan organisasi yaitu usaha apa saja yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE ini. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁) menjelaskan bahwa :

“Usaha yang kita lakukan seperti ; menyeleksi proposal yang akan menerima bantuan kube ini, memberikan pelatihan usaha kepada kelompok usaha tersebut, memberikan bantuan (dana atau barang usaha) untuk menjalankan usaha mereka, mengawasi jalannya usaha mereka, dan yang terakhir membuat laporan terkait kube ini setiap tahunnya.”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Selanjutnya Ibu Betty Rubiyati,S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan :

“Usaha disini maksudnya yang kita lakukan dalam program KUBE ini, seperti; menyeleksi proposal usaha yang diajukan fakir miskin, memberikan pelatihan untuk menunjang usaha mereka, mengawasi usaha mereka, serta membuat laporan tentang usaha mereka”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Kemudian peneliti mewawancarai pihak Dinas Sosial terkait kelemahan organisasi yaitu kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan program KUBE ini. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁), menjelaskan bahwa :

“Sekarang harus berdasarkan basis data terpadu (hasil sensus bps), jadi dalam menyeleksi proposal atau fakir miskin yang akan menerima bantuan harus dari data yang tertera disana, terus juga fakir miskin tersebut harus memiliki beberapa kartu, seperti ; kartu jamkesda, jamsosratu, bpjs. Sedangkan proposal yang kita terima setiap tahunnya banyak, jadi kita harus menyeleksi semua anggota dalam proposal tersebut memiliki persyaratan yang tadi atau enggak, kalo sudah semua tapi proposalnya masih melebihi rencana saya seleksi lagi dari yang lebih miskin (yang diutamakan), sampai sesuai dengan rencana kube tahun itu. Terus juga SDM yang ada di dinas ini hanya beberapa orang perbidang, di bidang ini setiap program dipegang 1 kasie sisanya 1 kabid dan 1 fungsional, jadi kita

kayak kekurangan SDM juga dalam menjalankan program-program yang ada ini”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Lalu Ibu Betty Rubiyati, S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan:

“Kendala pada program KUBE ini saat menyeleksi proposal, yang mengajukan proposal itu banyak setiap tahunnya diatas 200 proposal, sedangkan kita memiliki target yang kita buat sesuai dengan anggaran yang kita terima. Jadi dalam penyeleksian ini kita harus memilih mana yang benar-benar pantas untuk menerima bantuan dari kita. Lalu SDM yang ada di bidang ini pun minim, per orang memegang 1 program sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Itu yang saya tahu, kalo untuk detailnya di lapangan tanya langsung ke pak yayat sebagai orang yang menangani program KUBE ini”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh (I₁₋₁ dan I₁₋₃) diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Usaha yang dilakukan dinas sosial dalam program KUBE dari awal perencanaan sampai akhir evaluasi diantaranya ; menyeleksi proposal, melakukan anggaran kerja, memberikan pelatihan usaha kepada anggota KUBE, mengawasi jalannya usaha, dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan usaha. Sedangkan Kendala yang ada dalam program KUBE ini diantaranya ; kurangnya SDM yang dimiliki dinas sosial dalam pelaksanaan program KUBE, penyeleksian proposal dimana setiap tahunnya proposal yang masuk lebih banyak daripada jumlah KUBE dianggarkan, menyebabkan pegawai dinas sosial harus menyeleksi

proposal dengan teliti dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Sedangkan untuk lingkungan eksternal yaitu peluang dan ancaman, peneliti mewawancarai pihak Dinas Sosial terkait peluang organisasi yaitu dukungan apa saja yang diterima Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE ini. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁) mengemukakan bahwa :

“Alhamdulillah kita dinsos setiap tahunnya sering menerima dana bansos (entah dari provinsi atau pusat), jadi dana tersebut kita berikan kepada proposal yang sudah saya seleksi namun tidak menerima bantuan tahap awal. Masyarakatnya juga sering membantu kita saat di lapangan kita sedang melakukan kegiatan penyuluhan atau pengawasan”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Lalu Ibu Betty Rubiyati, S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan:

“Dukungan mungkin dana, karna setiap tahunnya KUBE ini mendapat dana tambahan berupa dana bantuan sosial baik itu dari pusat, provinsi atau kabupaten. Mungkin karna jumlah fakir miskin ini yang palingan banyak jika dibandingkan PMKS lain”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Kemudian dalam hal peluang Dinas Sosial, peneliti mewawancarai pendamping KUBE yaitu TKSK mengenai dukungan yang mereka dapatkan dalam pelaksanaan KUBE ini. Ibu Iis Isrofia selaku TKSK KUBE Pontang (I₂₋₁) dan Bapak Irfan Firdaus selaku TKSK KUBE Lebak Wangi (I₂₋₂), mengatakan :

“Alhamdulillah, untuk dukungan setiap TKSK itu difasilitasi motor untuk keliling ke daerah-daerah KUBE. Sehingga karena adanya motor ini TKSK apabila harus bolak-balik dari desa, dinsos atau kecamatan ini menjadi lebih mudah”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, 8 Februari 2018).

“Untuk dukungan, kami selalu dibantu oleh pihak desa terkait komunikasi tersebut. Selain itu oleh provinsi juga kami diberikan fasilitas motor untuk tugas ini”. (Wawancara dengan Bapak Irfan Firdaus, 8 Februari 2018).

Selanjutnya peneliti mewawancarai pihak Dinas Sosial terkait ancaman organisasi yaitu hambatan apa saja yang diterima Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE ini. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁), mengatakan bahwa :

“Kalo hambatannya itu, tksknya sering ganti-ganti nomor dan tidak memberikan kabar ke kita kalo ganti nomor, jadi kita agak susah menghubunginya”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Lalu Ibu Betty Rubiyati, S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan:

“Hambatannya kalo yang saya tahu, kita terkendala daerah mungkin, KUBE ini memiliki sasaran masyarakat miskin yang daerahnya agak jauh dari perkotaan, ditambah lagi kabupaten serang yang kita tahu memiliki luas wilayah yang besar. Sehingga pada saat kita survey lapangan dan melakukan pengawasan itu lama karna jarak yang kita tempuh jauh”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Kemudian dalam hal ancaman Dinas Sosial, peneliti mewawancarai pendamping KUBE yaitu TKSK mengenai hambatan yang mereka dapatkan dalam pelaksanaan KUBE ini. Ibu Iis Isrofia selaku TKSK KUBE Pontang (I₂₋₁) dan Bapak Irfan Firdaus selaku TKSK KUBE Lebak Wangi (I₂₋₂), mengatakan :

“Hambatannya mungkin di anggota-anggota KUBE, karena jika kita menghubungi anggota-anggota KUBE langsung susah. Jadi tksk bekerja sama dengan pihak desa, apabila ada pertemuan kelompok kita meminta bantuan ke sekdes biasanya untuk memberitahu kepada anggota KUBE tersebut. Karena kita ini tidak hanya mendampingi KUBE tapi semua PMKS yang ada di pontang ini. Sedangkan selain untuk pendampingan kami juga sering ada pertemuan atau pelatihan mengenai TKSK baik itu dari pusat atau provinsi. Sehingga hambatannya apabila waktunya bentrok kami harus memilih atau meminta bantuan kepada orang lain”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, 8 Februari 2018).

“Hambatannya susah mengatur atau menghubungi anggota KUBE, karena mereka kelompok usaha yang terdiri dari 10 orang setiap kelompok jadi apabila ada sesuatu yang harus diberi tahu agak susah karena mereka sering kali ganti nomor. Sehingga saya menghubungi pihak desa agar mereka yang memberi tahu langsung ke masing-masing kelompok tersebut. Lalu usaha mereka yang sering berhenti atau hilang padahal baru setahun berjalan. Kalo ada kejadian seperti itu kali selaku TKSK harus memberikan motivasi usaha kepada mereka agar jiwa kebersamaan dan sosial mereka terbangun kembali dan semangat wirausaha mereka ada kembali”. (Wawancara dengan Bapak Irfan Firdaus, 8 Februari 2018).

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh (I₁₋₁, I₁₋₃, I₂₋₁, dan I₂₋₂) diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa peluang atau dukungan yang didapatkan dalam program ini yaitu adanya pemberian dana bantuan sosial (bansos) setiap tahunnya dari kementerian sosial

maupun dinas sosial provinsi untuk KUBE. Sehingga jumlah KUBE yang menerima bantuan setiap tahunnya diatas jumlah awal yang dianggarkan oleh dinas sosial kabupaten serang. Selain itu adanya fasilitas kendaraan dinas berupa motor yang diberikan dinas sosial provinsi kepada masing-masing TKSK memberikan kemudahan TKSK dalam menjalankan tugas.

Sedangkan hambatan yang ada dalam program KUBE ini diantaranya ; kontak nomor yang sering berganti-ganti membuat dinas sosial agak susah menghubungi TKSK, wilayah kabupaten serang yang luas dan kebanyakan memiliki akses jalan yang rusak atau sulit dilalui membuat proses ke lapangan menjadi lama, banyaknya jenis PMKS yang didampingi membuat TKSK sulit mengatur waktu pendampingan, susah nya mengatur atau menghubungi anggota KUBE yang mengakibatkan TKSK berkoordinasi dengan pihak desa dalam memberitahukan informasi mengenai KUBE, dan banyaknya KUBE yang berhenti berusaha karena modal atau tidak mendapatkan keuntungan.

Dari data lapangan yang telah dijelaskan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam merumuskan/merencanakan strategi dan menentukan tujuan program KUBE Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari program KUBE ialah mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang khususnya yang ada di daerah perdesaan, dengan cara memberikan bantuan usaha kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan.
2. Sasaran keberhasilan dari program KUBE ialah dapat dilihat dari berapa jumlah KUBE yang masih berjalan pada saat evaluasi berlangsung dan usaha tersebut memberikan dampak positif kepada anggota KUBE.
3. Perencanaan yang dilakukan dalam program KUBE ialah menyeleksi proposal usaha, dan menghitung anggaran untuk pelaksanaan program. Laporan perencanaan diserahkan kepada bidang sub program dan evaluasi, untuk dilihat sesuai dengan rencana strategi Dinas Sosial atau tidak. Dalam tahap perencanaan pendamping desa tidak dilibatkan.
4. Usaha yang dilakukan Dinas Sosial dalam program KUBE diantaranya ; menyeleksi proposal, melakukan anggara kerja, memberikan pelatihan usaha kepada anggota KUBE, mengawasi jalannya usaha, dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan usaha.
5. Kendala yang ada dalam program KUBE ini diantaranya ; kurangnya SDM yang dimiliki dinas sosial dalam pelaksanaan program KUBE, penyeleksian proposal lebih banyak daripada jumlah KUBE yang dianggarkan.

6. Peluang atau dukungan yang didapatkan dalam program KUBE yaitu ; adanya pemberian dana bantuan sosial (bansos) setiap tahunnya dari kementerian sosial maupun dinas sosial provinsi untuk KUBE, dan adanya fasilitas kendaraan dinas berupa motor yang diberikan Dinas Sosial Provinsi Banten kepada masing-masing TKSK.
7. Hambatan yang ada dalam program KUBE diantaranya ; kontak nomor yang sering berganti-ganti membuat dinas sosial agak susah menghubungi TKSK, wilayah Kabupaten Serang yang luas dan kebanyakan memiliki akses jalan yang rusak atau sulit dilalui membuat proses ke lapangan menjadi lama, banyaknya jenis PMKS yang didampingi membuat TKSK sulit mengatur waktu pendampingan, susah mengatur atau menghubungi anggota KUBE yang mengakibatkan TKSK berkoordinasi dengan pihak desa, dan banyaknya KUBE yang berhenti berusaha karena modal atau tidak mendapatkan keuntungan.

4.3.2 Perumusan/Formulasi

Perumusan/Formulasi adalah menentukan beberapa alternatif strategi guna memilih strategi yang handal, yang disesuaikan dengan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan organisasi. Dinas Sosial dalam menentukan strategi mana yang akan digunakan pastinya menganalisis keadaan internal maupun eksternal organisasi. Dalam

membuat analisis-analisis tersebut pun pasti membuat beberapa alternatif strategi guna menyesuaikan mana strategi yang cocok dengan keadaan internal maupun eksternal Dinas Sosial dalam melaksanakan program KUBE ini. Peneliti mewawancarai pihak Dinas Sosial terkait cara membuat strategi yang akan digunakan untuk pelaksanaan program KUBE. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁-1) menjelaskan bahwa :

“Strategi yang dibuat dinsos untuk KUBE mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya (kita beri pelatihan sebelum diberi bantuan, lalu pemberian bantuan), dan pengawasan yang kita lakukan akan bagaimana. Hal itu harus saling sinkron dari mulai awal sampai akhir evaluasi tersebut, dan permasalahan yang tahun sebelumnya ada, dengan strategi yang kita buat ini kita harap KUBE setiap tahunnya capaian keberhasilannya selalu naik dari tahun sebelumnya dan permasalahannya tidak terulang kembali. Biasanya kita membuat strategi yang akan kita pakai untuk pelaksanaan KUBE saat rapat kerja semua bidang di dinsos ini. Dalam rapat kerja itu kita tidak hanya merapatkan KUBE saja, tapi semua program PMKS juga. Kayak misalnya untuk KUBE tahun ini, saat rapat kerja kita membahas permasalahan yang ada di KUBE tahun kemarin apa, yang kurang apa, agar strategi atau rencana yang kita buat untuk KUBE tahun ini tidak seperti tahun kemarin. Kemudian masukan-masukan dari bidang lain enaknya KUBE tahun ini bagaimana”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Selain itu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), mengemukakan :

“Strategi yang kita buat dalam pelaksanaan KUBE ini pastinya mengikuti dengan renstra yang sudah dibuat sebelumnya, dan tidak jauh beda dengan perencanaan awal KUBE ini bedanya strategi ini dibuat dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi KUBE selama 1 tahun berjalan. Strategi yang dibuat

pun sudah dipertimbangkan dengan kendala-kendala yang dialami sebelumnya, anggaran dan SDM yang kita miliki agar strategi ini dapat berjalan dengan baik. Dalam pembuatan atau perumusan strategi ini tidak setiap tahunnya kita buat, dalam arti ketika pada tahap evaluasi KUBE banyak kendala dan tidak sesuai dengan sasaran awal, maka strategi ini akan dibuat agar program KUBE ke depannya menjadi lebih baik dan sesuai renstra yang telah dibuat. Pembuatan strategi ini pun tidak sembarangan, karena ini menjadi hal yang penting sehingga perumusan ini ada pada saat rapat kerja yang dihadiri oleh semua pegawai dinsos yang berhubungan dengan program ini”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

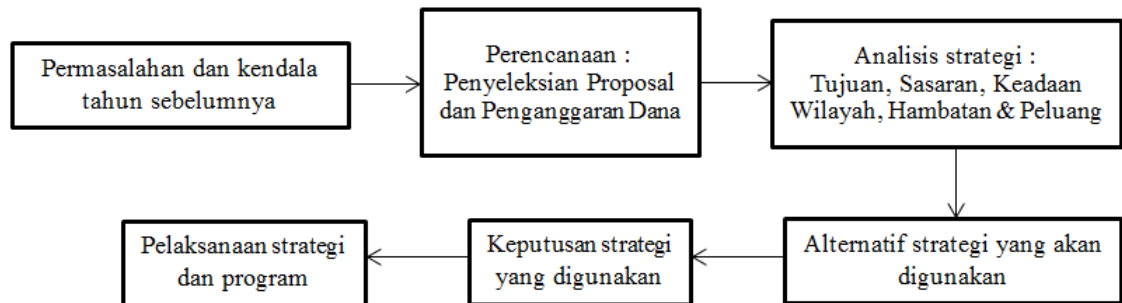
Hal ini pun dipertegas oleh Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), beliau mengatakan :

“Untuk strategi jangka panjang itu dibuat bersama (kepala-kepala bidang) dalam rapat kerja besar yang diadakan 5 tahun sekali dan dituangkan dalam bentuk rencana strategi dinas sosial. Semua program, baik program prioritas maupun kegiatan pendukung lainnya. Sedangkan untuk strategi program KUBE sendiri, itu yang membuat bidang penanganan fakir miskin dan strategi itu diberikan kepada sub program dan evaluasi saat pemberian laporan perencanaan awal”. (Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Kemudian terdapat mekanisme atau alur yang digunakan Dinas Sosial khususnya bidang Penanganan Fakir Miskin dalam pembuatan strategi program KUBE, contoh mekanisme yang digunakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.3

Mekanisme pembuatan strategi program KUBE



(Sumber : Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun, 2018)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa mekanisme pembuatan strategi yang dibuat untuk program KUBE ini cukup panjang, dimana sebelumnya harus melihat laporan evaluasi tahun sebelumnya untuk melihat hambatan serta kendala yang terjadi pada tahun tersebut. Kemudian Dinas Sosial membuat perencanaan program yaitu menyeleksi proposal yang masuk serta membuat anggaran kegiatan selama satu tahun berjalan. Baru setelah itu menganalisa strategi yang akan digunakan untuk tahun berjalan, dimana mereka melihat tujuan, sasaran serta renstra Dinas Sosial, digabungkan dengan keadaan wilayah tempat KUBE yang akan menerima bantuan sehingga menghasilkan beberapa alternatif strategi serta peluang dan hambatan yang diterima. Setelah alternatif strategi tersebut ada, selanjutnya baru membuat keputusan tentang strategi mana yang akan digunakan.

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh (I₁₋₁ dan I₁₋₃) serta gambar diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Strategi yang digunakan untuk program KUBE dibuat oleh bidang penanganan fakir miskin, selaku bidang yang bertanggungjawab pada program KUBE tersebut. Strategi yang dibuat setiap tahunnya harus sesuai dengan rencana strategi (renstra) Dinas Sosial. Strategi tersebut berisi perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi KUBE. Strategi yang dibuat pun sudah dipertimbangkan dengan sasaran awal, kendala-kendala yang dialami tahun sebelumnya, anggaran dan SDM yang dimiliki agar strategi ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan pencapaian keberhasilan dan renstra yang telah dibuat serta permasalahan yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali.

Setelah membuat beberapa alternatif strategi yang akan digunakan dalam pelaksanaan KUBE, Dinas Sosial memutuskan strategi yang akan digunakan. Salah satu contoh strategi yang diambil pada pemberdayaan sosial program KUBE tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.4
Strategi Program KUBE Tahun 2016

2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Serang

1. Strategi dan Kebijakan pada Misi Meningkatkan Pelayanan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran misi meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

STRATEGI	KEBIJAKAN
Terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin melalui KUBE	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga

(Sumber : Laporan Strategi Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2016)

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa strategi dan kebijakan program KUBE Dinas Sosial Kabupaten Serang masuk ke dalam Misi untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS. Pada tahun 2016 untuk program KUBE memiliki strategi “terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin melalui KUBE” dengan kebijakan “meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga”. Dengan strategi tersebut usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE pada tahun 2016, yaitu dengan memberikan bantuan dana yang dipergunakan untuk membeli fasilitas usaha yang akan digunakan pada masing-masing anggota KUBE.

Kemudian dengan kebijakan yang tersebut Dinas Sosial memberikan pelatihan wirausaha serta pelatihan manajemen usaha kepada para anggota KUBE agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan keluarga masing-masing anggota KUBE tersebut.

Selanjutnya keputusan mengenai strategi apa yang diambil disampaikan oleh Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁), beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk keputusan yang diambil, setiap selesai rapat kerja kita mencatat semua masukan tentang strategi-strategi yang baiknya dijalankan untuk KUBE pada saat rapat tersebut. Nanti saya lihat dulu penerima KUBE tahun depan itu dimana dan bagaimana (karena faktor lingkungan dan orang-orang KUBE itu juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya usaha yang akan dijalankan oleh KUBE tersebut). Jika sudah dilihat cocoknya menggunakan strategi yang mana, saya langsung membicarakannya dengan kabid, dengan alasan yang saya lihat itu. Lalu kalo kabid setuju, nanti diadakan rapat kecil yang terdiri dari ; saya, bu kabid, bu kadis, serta bagian program dan keuangan. Di rapat itu diputuskan strategi yang digunakan untuk pelaksanaan KUBE tahun depan itu apa”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Lalu Ibu Betty Rubiyati,S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan:

“Dalam hal pemutusan strategi mana yang akan dipakai, sebelumnya kita membuat beberapa strategi dengan keutungan dan kendala yang akan dihadapi di lapangan. Dari beberapa strategi itu akan kita sinkronisasikan mana yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat yang akan menerima bantuan ini (karena setelah proposal di seleksi kita akan melakukan survey untuk melihat keadaan fakir miskin

tersebut). Setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa hal tersebut barulah strategi akan ditentukan. Sedangkan yang menentukan strategi mana yang akan digunakan itu pak yayat sebagai penanggungjawab langsung KUBE dan saya sebagai kepala yang membidangi KUBE serta kepala dinas yang menyetujuinya”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Dalam hal memutuskan strategi mana yang akan digunakan oleh Dinas Sosial, setelah peneliti mendengarkan dan menyimak penjelasan dari (I₁₋₁ dan I₁₋₃) di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Keputusan mengenai strategi mana yang akan digunakan dalam KUBE pertahunnya, ditentukan oleh penanggung jawab KUBE itu sendiri. Keputusan itu diambil setelah membuat analisis keuntungan dan kendala yang akan dihadapi di lapangan serta melihat karakteristik wilayah dan masyarakat yang akan menerima bantuan. Pada tahun 2016, strategi yang digunakan untuk program KUBE ialah :

“Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin melalui KUBE”

Dari strategi tersebut Dinas Sosial masih menerima hambatan pada saat pelaksanaan program KUBE tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Bidang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2016, dimana dalam laporan tersebut terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi, yaitu :

1. Terbatasnya personil pada tingkat pelaksana yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas rutin.

2. Sarana dan prasarana teknis untuk mendukung kegiatan masih terbatas sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan optimal.
3. Terbatasnya Tenaga Profesional Pekerjaan Sosial mempengaruhi cara pemahaman pelaksanaan program kerja.

Dari data lapangan yang telah dijelaskan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menentukan beberapa alternatif strategi guna memilih strategi yang handal, yang disesuaikan dengan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan program KUBE Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang digunakan program KUBE dibuat oleh bidang penanganan fakir miskin. Strategi yang dibuat setiap tahunnya harus sesuai dengan rencana strategi (renstra) Dinas Sosial.
2. Keputusan mengenai strategi mana yang akan digunakan dalam KUBE pertahunnya, ditentukan oleh penanggung jawab KUBE itu sendiri. Keputusan itu diambil setelah membuat analisis keuntungan dan kendala yang akan dihadapi di lapangan serta melihat karakteristik wilayah dan masyarakat yang akan menerima bantuan.
3. Dari strategi yang digunakan pada tahun 2016, masih ada beberapa hambatan yang dialami, yaitu : terbatasnya personil,

sarana dan prasarana teknis, serta Tenaga Profesional Pekerjaan Sosial yang menyebabkan pelaksanaan kurang berjalan optimal.

4.3.3 Pelaksanaan/Implementasi

Pelaksanaan/Implementasi ialah bagaimana mengimplementasikan strategi yang telah dipilih. Agar strategi tersebut berjalan dengan baik, perlu membangun struktur untuk mendukung strategi itu dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepat. Dinas Sosial dalam melaksanakan program KUBE ini mengacu pada beberapa hal, diantaranya ; Sumber Daya dan Sumber Dana, struktur kerja dan pembagian tugas, kebijakan, serta administrasi. Beberapa aspek tersebut pun dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu Dinas Sosial, Pendamping KUBE, dan anggota KUBE itu sendiri.

Dalam hal Sumber Daya, terdapat sumber daya manusia dan sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan program KUBE ini. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁) mengenai pengelolaan SDM dan dana, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk mengatur SDM pegawai dinsos kita sudah ada dalam perbup serang no. 7 tahun 2012 tentang tupoksi dinas sosial kab. serang, jadi kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Sedangkan untuk TKSK, mereka ada peraturan atau semacam perjanjian kerja, jadi jika ada yang melanggar atau kerjanya tidak sesuai kita dapat menegurnya. Koordinasi setiap tahun antar pegawai dinsos pun tidak ada masalah atau kendala. Mungkin dengan TKSK ada beberapa yang agak ribet atau

bingung karena ada yang sering ganti-ganti nomor tlp, jadi saya harus sering mengupdate kontak mereka. Kemudian untuk dana, kita melihat dulu anggaran yang disediakan daerah (kab.serang) untuk program KUBE tahun ini berapa, dari anggaran itu saya harus mengaturnya untuk biaya pelatihan, bantuan per KUBE, dan hal tersebut dibuat pada saat perencanaan awal. Sehingga pada awal tahun periode berjalan pengaturan dana tersebut sudah selesai”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan:

“Untuk pengaturan kerja, kita sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, jadi sudah tidak bingung lagi. Mungkin kalo pada saat pelaksanaan pelatihannya kita membuat kepanitian kecil untuk pemberian pelatihan, namun untuk menanggung jawab utama tetap pak yayat dan tugas saya mengawasi serta membantu pak yayat dalam pelaksanaan program ini. Koordinasi yang terjalin selama ini baik, entah itu dengan TKSK atau dengan ketua KUBE, tidak ada kendala atau masalah yang serius. Karena selama ini saya belum menerima laporan yang tidak enak dari pak yayat, tetapi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa ditanyakan langsung ke pak yayat sebagai pihak yang berhubungan langsung ke TKSK atau ketua KUBE. Selanjutnya untuk pengaturan dananya, kita sudah membuat perencanaan dana pada saat perencanaan program, dimana setelah proposal yang lolos sudah ada kita baru membuat rincian anggaran untuk setiap kegiatan mulai dari awal sampai tahap evaluasi itu sudah kita anggarkan”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh (I₁₋₁) dan (I₁₋₃) menerangkan bahwa untuk mengatur SDM pegawai Dinas Sosial sudah ada dalam Peraturan Bupati Serang No. 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang, dan untuk SDM bidang Penanganan Fakir Miskin sendiri tugas dan tanggung

jawab kerjanya sudah ada dalam rencana kerja yang setaip tahunnya dibuat oleh bidang Penanganan Fakir Miskin. Koordinasi setiap tahun yang terjalin antar pegawai Dinas Sosial tidak ada masalah atau kendala dan dengan TKSK serta ketua KUBE tidak ada kendala atau masalah yang serius.

Kemudian untuk mengatur dana, Dinas Sosial melihat terlebih dahulu anggaran yang disediakan daerah (Kabupaten Serang) untuk program KUBE setiap tahunnya berapa. Setelah mengetahui dana yang akan diterima setiap tahunnya, penanggung jawab KUBE mengatur dana tersebut untuk biaya pelatihan/sosialisasi anggota KUBE, bantuan usaha perKUBE, dan hal tersebut dibuat pada saat perencanaan awal. Sehingga pada awal tahun periode berjalan pengaturan dana tersebut sudah selesai.

Selain itu Dinas Sosial juga secara tidak langsung mengatur pendamping desa (TKSK), karena mereka merupakan mediator antara Dinas Sosial dengan anggota KUBE atau pihak desa, seperti yang disampaikan oleh pendamping KUBE Pontang (I₂₋₁), beliau mengatakan :

“Dinas sosial sudah memberikan tupoksi kami selaku TKSK PMKS yang tugas utamanya adalah mendampingi PMKS yang akan menerima bantuan. Sehingga kami dalam melakukan pendampingan di (KUBE khususnya) mulai dari pembuatan proposal, pengajuan proposal, sosialisasi, pencairan, pembelanjaan dana, sampai akhir pembuatan LPJ itu kami selalu mendampingi. Selain itu koordinasi dengan dinsos itu selalu dilaksanakan baik itu dengan telepon atau langsung

datang ke kantor dinsos, sedangkan untuk KUBE kami selalu koordinasi dengan pihak desa”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, 8 Februari 2018).

Hal serupa disampaikan pula oleh pendamping KUBE Lebak

Wangi (I₂₋₂), beliau menjelaskan bahwa :

“Dinas sosial sudah memberikan tupoksi kami selaku TKSK PMKS ialah mendampingi PMKS yang akan menerima bantuan. Sehingga kami dalam melakukan pendampingan KUBE, kami melakukan pendampingan pada saat pembuatan proposal, pengajuan proposal, sosialisasi KUBE, pencairan dana KUBE, dan pembuatan LPJ yang diberikan kepada dinsos sebagai bentuk evaluasi usaha. Koordinasi dengan dinsos selalu terjalin dengan baik, karena setiap ada penugasan atau kegiatan yang mengharuskan TKSK turun ke lapangan, TKSK harus langsung melaporkan kegiatan tersebut ke dinsos baik itu dengan langsung datang ke dinsos, melalui telepon atau dalam bentuk laporan”. (Wawancara dengan Bapak Irfan Firdaus, 8 Februari 2018).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh (I₂₋₁) dan (I₂₋₂) di atas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengatur TKSK, Dinas Sosial sudah memberikan tupoksi selaku TKSK PMKS yang tugas utamanya adalah mendampingi PMKS yang akan menerima bantuan. Sehingga TKSK dalam melakukan pendampingan di (KUBE khususnya) mulai dari pembuatan proposal, pengajuan proposal, sosialisasi, pencairan dana, pembelanjaan dana, sampai akhir pembuatan LPJ yang diberikan kepada Dinas Sosial sebagai bentuk evaluasi usaha. Koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial dengan TKSK mengalami kendala, karena adanya beberapa TKSK yang sering mengganti nomor telepon, sehingga pihak Dinas Sosial harus sering mengupdate kontak TKSK.

Selain itu koordinasi yang terjalin baik, karena setiap ada penugasan atau kegiatan yang mengharuskan TKSK turun ke lapangan. TKSK harus langsung melaporkan kegiatan tersebut ke Dinas Sosial, baik itu dengan langsung datang ke dinsos, melalui telepon atau dalam bentuk laporan.

Dalam pengaturan pegawai dan dana masing-masing KUBE, KUBE memiliki andil yang besar pada tahap pelaksanaan program KUBE ini, sehingga peneliti mewawancarai beberapa KUBE terkait pengaturan SDM dan dana yang mereka lakukan. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh ketua KUBE Wanayasa Mandiri (I₃₋₂), beliau mengatakan :

“Alhamdulillah, sekarang yang menjalankan usaha ini anggota-anggotanya, jadi saya mengawasi saja. Jika ada kendala atau kurang orang baru saya membantu. Koordinasi dengan TKSK masih sering berhubungan sampai sekarang, apalagi dengan orang dinsosnya jika ada apa-apa (seperti program lain) itu sering memberitahu ke saya. Sedangkan dana dari dinsos langsung saya belikan perlengkapan tenda dan kursi pesta, alhamdulillah masih ada dan tambah jumlah kursinya”. (Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Rabu, 20 Desember 2017).

Selain itu, ada pula pendapat dari Bapak Sopian Yasa dengan usaha perbengkelan Las kendaraan ketua KUBE Dua Putra (I₃₋₃), beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam mengatur SDM KUBE, karena keahlian ngelas ini agak jarang yang memiliki, jadi dari 10 anggota kube ini saya ajarkan keahlian ini kepada beberapa orang agar apabila salah satu tidak bisa di tempat masih ada yang lain yang bisa mengerjakannya. Untuk koordinasi, dengan dinsos dulu pernah

saat datang sekali setelah dana cair, setelah itu tidak pernah koordinasi lagi. Lalu dengan pendamping desanya juga ada kontakannya, tetapi tidak pernah kontak lagi dengan saya, tidak tahu jika anggota yang lain. Sedangkan untuk dana, sistem gaji perbulan. Jadi pendapatan selama sebulan itu ada di laporan keuangan sederhana, nanti setelah dipotong untuk operasional bengkel ini, baru dibagi rata ke semua anggota. Jadi semua anggota pun tahu pendapatan dan pengeluaran bengkel ini setiap bulannya”. (Wawancara dengan Bapak Sopian Yasa D, Selasa, 28 November 2017).

Pendapat lain pun dikemukakan oleh ketua KUBE Jati Waringin (I₃₋₅), beliau mengemukakan :

“Saya tidak pernah mengatur atau memberi tugas kepada anggota lain, sistemnya jika masih ada yang ingin ngurus bebek-bebek ini ayo kita rawat lalu hasil dari telur atau bebek yang dijual ke pasar itu kita bagi rata, sudah begitu saja. Untuk koordinasi jujur saya sudah tidak pernah kontak atau teleponan lagi dengan orang dinas atau pendampingnya, terakhir saat mereka ke sini untuk melihat bebek-bebek ini saja. Jika untuk pengaturan dana pelaksanaan KUBE ini, biasanya kami patungan untuk membeli pakan bebek ini. Pendapatan dari usaha ini sebenarnya kecil, kalo ada anggota yang sedang membutuhkan uang baru kita jual bebeknya ke pasar atau warga sekitar yang ingin beli. Sekarang alhamdulillah bebeknya sudah bertambah dari pertama kita usaha”. (Wawancara dengan Bapak M.Rafe’i, Rabu, 20 Desember 2017).

Setelah beberapa informan (I₃₋₂, I₃₋₃, dan I₃₋₅) menjelaskan mengenai pengaturan SDM, dana serta koordinasi yang terjalin di beberapa KUBE, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam mengatur SDM pada masing-masing KUBE, ketua KUBE memiliki caranya masing-masing, ada yang membebaskan anggotanya dalam

menjalankan usaha mereka, ada yang mengikuti proses jalannya usaha sehingga tidak perlu mengatur anggota-anggotanya, ada pula yang mengatur tugas dari anggota KUBEnya. Untuk koordinasi yang terjalin antara ketua KUBE dengan Dinas Sosial maupun TKSK tidak berjalan dengan baik. Karena dari beberapa KUBE setelah pemberian dana tidak berkoordinasi lagi baik dengan Dinas Sosial maupun TKSK. Namun ada ketua KUBE yang sampai sekarang masih koordinasi dengan TKSK dan Dinas Sosial. Kemudian ada pula TKSK yang tidak koordinasi dengan ketua KUBE melainkan kepada pihak desa. Sedangkan untuk pengaturan dana KUBE pun berbeda-beda, ada yang mengupah anggotanya per bulan, ada yang mengupah anggota apabila usaha tersebut sedang melaksanakan kegiatan, ada pula yang tidak mendapatkan keuntungan karena beberapa faktor.

Setelah penulis melihat dan memahami cara dinas sosial dalam mengatur SDM pegawai dan TKSK serta ketua KUBE mengatur anggotanya, pengaturan dana yang terjadi, dan koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial, TKSK, dan KUBE. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mengatur SDM pegawai Dinas Sosial sudah ada dalam Peraturan Bupati Serang No. 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang, dan untuk SDM bidang Penanganan Fakir Miskin sendiri tugas dan tanggung jawab kerjanya sudah ada dalam rencana kerja yang setiap tahunnya dibuat oleh bidang Penanganan Fakir Miskin. Untuk mengatur TKSK, Dinas

Sosial sudah memberikan tupoksi selaku TKSK PMKS yang tugas utamanya adalah mendampingi PMKS yang akan menerima bantuan. Sehingga TKSK dalam melakukan pendampingan di (KUBE khususnya) mulai dari pembuatan proposal, pengajuan proposal, sosialisasi, pencairan dana, pembelanjaan dana, sampai akhir pembuatan LPJ yang diberikan kepada Dinas Sosial sebagai bentuk evaluasi usaha. Kemudian dalam mengatur SDM pada masing-masing KUBE, ketua KUBE memiliki caranya masing-masing, ada yang membebaskan anggotanya dalam menjalankan usaha mereka, ada yang mengikuti proses jalannya usaha sehingga tidak perlu mengatur anggota-anggotanya, ada pula yang mengatur tugas dari anggota KUBEnya.

Kemudian dalam hal koordinasi, koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial dengan TKSK mengalami kendala, karena adanya beberapa TKSK yang sering mengganti nomor telepon, sehingga pihak Dinas Sosial harus sering mengupdate kontak TKSK. Selain itu koordinasi yang terjalin baik, karena setiap ada penugasan atau kegiatan yang mengharuskan TKSK turun ke lapangan. TKSK harus langsung melaporkan kegiatan tersebut ke Dinas Sosial, baik itu dengan langsung datang ke dinsos, melalui telepon atau dalam bentuk laporan. Untuk koordinasi yang terjalin antara ketua KUBE dengan Dinas Sosial maupun TKSK tidak berjalan dengan baik. Karena dari beberapa KUBE setelah pemberian dana tidak berkoordinasi lagi baik

dengan Dinas Sosial maupun TKSK. Namun ada ketua KUBE yang sampai sekarang masih koordinasi dengan TKSK dan Dinas Sosial. Kemudian ada pula TKSK yang tidak koordinasi dengan ketua KUBE melainkan kepada pihak desa.

Sedangkan untuk pengaturan dana, Dinas Sosial melihat terlebih dahulu anggaran yang disediakan daerah (Kabupaten Serang) untuk program KUBE setiap tahunnya berapa. Setelah mengetahui dana yang akan diterima setiap tahunnya, penanggung jawab KUBE mengatur dana tersebut untuk biaya pelatihan/sosialisasi anggota KUBE, bantuan usaha perKUBE, dan hal tersebut dibuat pada saat perencanaan awal. Sehingga pada awal tahun periode berjalan pengaturan dana tersebut sudah selesai. Sedangkan untuk pengaturan dana di masing-masing KUBE pun berbeda-beda, ada yang mengupah anggotanya per bulan, ada yang mengupah anggota apabila usaha tersebut sedang melaksanakan kegiatan, ada pula yang tidak mendapatkan keuntungan karena beberapa faktor.

Setelah melihat pengaturan SDM dan dana yang terjadi, selanjutnya peneliti mewawancarai terkait struktur kerja dan pembagian tugas yang terjadi di Dinas Sosial, TKSK, dan KUBE. Ibu Betty Rubiyati selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan :

“Struktur kerja di sini seperti struktur organisasi saja, dimana saya sebagai kepala bidang penanganan fakir miskin, pak yayat sebagai kasi penanganan fakir miskin perdesaan, bu heras sebagai kasi penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau, pak ridwan kasi RTLH, serta ada 1 tenaga fungsional. Pembagian tugas untuk program KUBE sendiri, yang bertanggung jawab penuh pak yayat sehingga pak yayat yang menentukan pembagian tugas dari masing-masing pelaksanaan KUBE mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Selain itu ibu Iis Isrofiah selaku TKSK pontang (I₂₋₁) mengatakan :

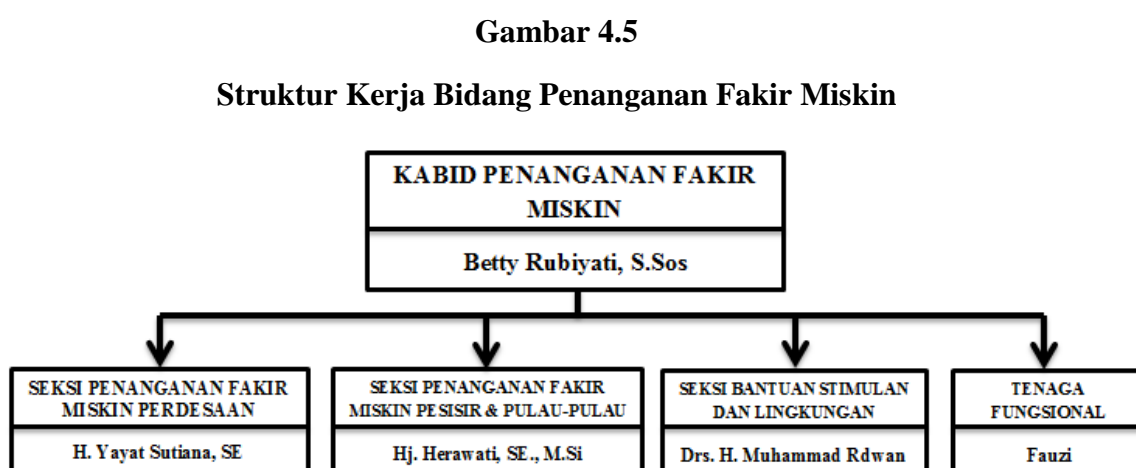
“Untuk struktur kerja itu setiap Kecamatan yang ada di Kab. serang itu memiliki 1 TKSK. Sedangkan untuk pembagian tugas, jika dinsos menugaskan sesuatu ada batas waktunya, jadi setiap ada tugas dari dinsos saya langsung mengatur jadwalnya untuk KUBE atau pmks lain, baru setelah itu saya koordinasi dengan pihak desa”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, Kamis, 8 Februari 2018).

Kemudian beberapa ketua KUBE menjabarkan struktur kerja dan pembagian tugas yang ada di KUBE mereka. Seperti ketua KUBE Wanayasa Mandir (I₃₋₂) dan Ketua KUBE Dua Putra (I₃₋₃), mereka mengatakan bahwa :

“Saat dibentuk struktur usaha KUBE ini terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota-anggota, namun berjalannya waktu kami tidak menggunakan struktur usaha tersebut. Untuk pembagian tugasnya sekarang kalo ada warga yang ingin menyewa tenda itu langsung saya kasih tahu ke anggota agar mereka yang memasang, jadi saya mengawasi saja”. (Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Rabu, 20 Desember 2017).

“Untuk struktur kerja disini menggunakan struktur organisasi sederhana, yaitu adanya ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Sedangkan pembagian tugasnya sederhana saja, ada bendahara yang menerima transaksi dan mengatur pengeluaran bengkel, dan sisanya jadi mekaniknya”. (Wawancara dengan Bapak Sopian Yasa D, Selasa, 28 November 2017).

Namun dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin ini, Dinas Sosial merasa mengalami kekurangan SDM, dimana SDM yang ada pada Bidang ini ialah lima orang pegawai PNS dan satu honorer, seperti pada gambar di bawah ini :



(Sumber : Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Dari gambar 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa satu pegawai memegang satu program yang mengakibatkan para penanggung jawab program merasa kesulitan dan saling membantu pada saat pelaksanaan program masing-masing. Sehingga pada saat pembagian tugas terjadi rangkap jabatan di para pegawai tersebut.

Berdasarkan beberapa informan (I₁₋₃, I₂₋₁, I₃₋₂, dan I₃₋₃) di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam struktur kerja yang ada pada Dinas Sosial yaitu ; kasi penanganan fakir miskin perdesaan sebagai penanggung jawab program KUBE, dibantu 1 tenaga fungsional untuk administratif, dan 1 kepala bidang penanganan fakir miskin. Dinas Sosial khususnya bidang penanganan fakir miskin kekurangan SDM sehingga antar kepala seksi saling membantu dalam kegiatan yang ada pada bidang penanganan fakir miskin. Untuk struktur kerja pendamping KUBE, setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang itu memiliki 1 TKSK. Sedangkan struktur kerja untuk KUBE menggunakan struktur kerja organisasi sederhana, yaitu ; adanya ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang terdiri dari 10 orang per KUBE.

Kemudian pembagian tugas program KUBE yang ada pada Dinas Sosial, karena kasi penanganan fakir miskin perdesaan penanggung jawab program KUBE itu sendiri. Sehingga kasi penanganan fakir miskin perdesaan yang dari awal menyeleksi, membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seperti apa. Tenaga fungsional yang menyiapkan bahan dan berkas-berkasnya. Lalu kepala seksi lain di bidang penanganan fakir miskin membantu. Untuk pembagian tugas pendamping KUBE, dinas sosial dalam menugaskan sesuatu hal selalu memiliki batas waktunya, sehingga TKSK langsung mengatur jadwal untuk KUBE atau PMKS lain,

setelah itu TKSK koordinasi dengan pihak desa terkait tugas tersebut. Sedangkan untuk pembagian tugas KUBE, masing-masing KUBE memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda, karena jenis usahanya pun berbeda.

Selanjutnya dalam indikator implementasi ini, terdapat sub indikator kebijakan atau peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan program KUBE. Peneliti mewawancarai pihak Dinas Sosial terkait dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program KUBE ini. Menurut Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁), beliau menjelaskan :

“Dasar hukumnya itu UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, sama perbup serang no. 7 tahun 2012 tentang tupoksi dinas sosial kab. serang. Tapi kalo lebih detailnya itu ada di selayang pandang dinsos kab.serang”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), beliau mengatakan:

“Untuk dasar hukum pelaksanaan program KUBE ini ada dalam UU no. 11 tahun 2009, sedangkan untuk tupoksi dinas sosial ada dalam perbup serang no. 7 tahun 2012”. (Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Selanjutnya hal ini pun dipertegas oleh Ibu Betty Rubiyati S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau menjelaskan :

“Dasar hukum pelaksanaan KUBE itu UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ada juga permensos no. 25 tahun 2015 tentang KUBE, dan untuk pelaksanaan tugas dinsos itu ada perbup serang no. 7 tahun 2012 tentang tupoksi dinas sosial kab. serang”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan (I₁₋₁ – I₁₋₃) diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dipakai Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE ialah Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2015 tentang KUBE. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Sosial ialah Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang.

Selanjutnya tahapan terakhir dalam implementasi ialah administrasi, dimana pelaksanaan program KUBE harus menyesuaikan kebijakan fungsional dan gaya administrasi dengan strategi yang digunakan. Tahap administrasi ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu : proses pelaksanaan dan pencairan dana KUBE, dan pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada TKSK dan anggota KUBE. Pada proses pelaksanaan dana pencairan dana Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁) menjelaskan bahwa :

“Proses pelaksanaan KUBE, pertama kita buat pelatihan kepada penerima bantuan KUBE (dalam pelatihan itu setiap KUBE terdiri dari 2 orang yang menerima pelatihan, lalu ilmunya disampaikan ke anggota KUBE lain, jadi bukan semua anggota KUBE), setelah pelatihan pemberian bantuan diberikan (bantuan ini ada yang berupa alat untuk usaha atau ada juga

yang berupa dana yang disetorkan ke rekening KUBE, itu tergantung kesepakatan antara dinsos dengan TKSK dan ketua KUBE), setelah itu pengawasan yang dilaksanakan nanti akhir tahun (dilihat dari laporan TKSK tentang usahanya, lalu kita melihat langsung ke lapangan apakah usaha masih berjalan atau ada kendala). Untuk waktu pelaksanaan, KUBE ini dalam setahun ada 3 yaitu; KUBE APBN (KUBE yang anggarannya dari pusat), KUBE APBD I (anggarannya dari Provinsi Banten), dan KUBE APBD II (anggarannya dari Kabupaten Serang). Nanti akhir triwulan 2 biasanya ada dana Bansos entah dari pusat, provinsi atau kabupaten itu setiap tahunnya berbeda asal dan nominal bansosnya. Sehingga waktu pelaksanaan biasanya kita melaksanakan KUBE APBD II dulu karna dananya yang turun lebih awal, lalu KUBE APBD I, dan terakhir KUBE APBN, kalo untuk yang dana bansos karena itu biasanya diberikan triwulan akhir jadi tidak tentu pelaksanaan antara bulan agustus sampai november, karena bulan desember itu kita gunakan untuk evaluasi agar bulan januari tahun depan laporan pertanggungjawabannya sudah selesai. Sedangkan untuk dana kita kirim ke rekening KUBE, jadi bukan rekening salah satu anggota KUBE, dan laporan penerimaan dana pun harus saya terima apabila anggota KUBE tersebut menarik atau mengambil dana tersebut dari rekening KUBEnya”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Proses pelaksanaan seperti yang dikemukakan oleh Bapak H.Yayat Sutiana juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), seperti :

“Proses pelaksanaan KUBE setelah data penerima KUBE fix, selanjutnya akan ada pelatihan/pembinaan untuk para anggota KUBE, biasanya yang datang dalam pelatihan ini 2 anggota per KUBE. Setelah itu pemberian bantuan yang akan diserahkan langsung kepada masing-masing rekening KUBE. Kemudian setelah dana diberikan, pihak dinsos mendatangi usaha-usaha tersebut untuk melihat apakah dana yang diberikan sudah digunakan untuk membeli peralatan usaha mereka. Kalo untuk pelaksanaan hanya itu saja, setelah itu akan diadakan tahap evaluasi dan pengawasan KUBE yang biasanya dilakukan pada akhir tahun berjalan. Untuk proses pencairan dana dilakukan setelah pelatihan berlangsung, dana dikirim langsung kepada

rekening masing-masing KUBE. Apabila dana sudah diterima ketua atau bendahara KUBE harus melaporkannya kepada pihak dinsos atau TKSK agar dapat kami data”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Sedangkan menurut pendamping Desa pelaksanaan KUBE itu sendiri dimulai dari pembuatan awal proposal yang akan diajukan TKSK dan calon penerima bantuan KUBE, seperti yang dikatakan oleh pendamping KUBE yaitu TKSK Pontang (I₂₋₁), beliau mengatakan :

“Untuk pelaksanaan program KUBE, lama proses dari pengajuan proposal sampai dana cair itu sekitar 4 sampai 5 bulan karena ada beberapa proses yang dilakukan dinsos (menerima proposal, verifikasi, survey ke lapangan, baru acc atau tidak). Sedangkan dari awal proses pendampingan pelaksanaan KUBE itu diantaranya; kami membantu calon KUBE mengajukan proposal ke dinsos, setelah acc, ada pelatihan atau sosialisasi kepada anggota KUBE yang akan menerima bantuan, lalu pencairan dana langsung ke rekening masing-masing KUBE, setiap KUBE membelanjakan dana tersebut sesuai data yang ada di proposal, setelah itu usaha baru bisa dilaksanakan dan saya selaku TKSK wajib membuat LPJ dari usaha tersebut. Sedangkan proses pencairan dana, untuk KUBE 2016 itu bantuan yang diberikan berupa uang Rp.20.000.000,- yang langsung disetorkan ke rekening masing-masing KUBE”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, Kamis, 8 Februari 2018).

Hal senada pun dikatakan oleh pendamping KUBE TKSK Lebak Wangi (I₂₋₂), beliau mengatakan :

“Pelaksanaan KUBE dari mulai pengajuan proposal sampai pembuatan LPJ dapat dikatakan selama setahun lebih. Karena dari pengajuan proposal sampai pencairan dana saja ada 5-6 bulan, lalu dilanjutkan dengan pembelanjaan peralatan usaha oleh anggota KUBE dan saya, setelah itu baru usaha dapat berjalan dan jarak sebulan sampai 2 bulan dari pencairan dana itu saya membuat LPJ KUBE yang akan diberikan kepada

dinsos pada saat akhir tahun. Untuk bantuan yang diberikan pada KUBE tahun 2016 itu berupa uang yang langsung diberikan ke masing-masing rekening KUBE”. (Wawancara dengan bapak Irfan Firdaus, Kamis, 8 Februari 2018).

Pada program KUBE 2016 ini terdapat 35 KUBE yang diberikan bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Serang. Dari 35 KUBE tersebut ada beberapa usaha yang sudah gulung tikar, namun ada beberapa usaha yang masih berjalan sampai sekarang. Berikut beberapa pelaksanaan usaha KUBE 2016 di Kecamatan Pontang yang peneliti temukan :

Gambar 4.6

Usaha KUBE 2016 di Kecamatan Pontang



(Sumber : Peneliti, 2018)

Dari gambar 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa usaha yang dijalankan oleh beberapa KUBE di Kecamatan Pontang pada tahun 2016 bermacam-macam, ada yang memiliki usaha jasa pesta yaitu KUBE Wanayasa Mandiri, ada usaha bontot ikan payus dari KUBE Le2 Dian, dan usaha dendeng ikan bandeng serta kerupuk ikan oleh KUBE Mutiara Bandeng. Selain itu ada jenis usaha lain yang dimiliki oleh beberapa KUBE seperti berikut :

Gambar 4.7
Jenis Usaha KUBE 2016



(Sumber : Peneliti, 2018)

Dari gambar 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa usaha yang dijalankan oleh beberapa KUBE pada tahun 2016 bermacam-macam,

seperti ; ternak kambing yang dilakukan oleh KUBE Patapan Sejahtera, ada usaha ternak bebek oleh KUBE Jati Waringin, jasa perbengkelan oleh KUBE Tunas Mandiri, dan jasa bengkel las mobil KUBE Dua Putra.

Berdasarkan pada pemaparan yang disampaikan oleh (I₁₋₁, I₁₋₃, I₂₋₁, dan I₂₋₂), penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk waktu pelaksanaan program KUBE, dari mulai pengajuan proposal sampai pembuatan LPJ dapat dikatakan selama setahun lebih. Karena dari pengajuan proposal sampai pencairan dana kurun waktu 4 sampai 6 bulan. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa proses yang dilakukan Dinas Sosial (menerima proposal, verifikasi, survey ke lapangan, baru acc atau tidak). Kemudian untuk pelaksanaan dari awal proses pendampingan KUBE itu diantaranya : TKSK membantu calon KUBE mengajukan proposal ke Dinas Sosial, kemudian proposal diseleksi dan verifikasi oleh Dinas Sosial, terdapat pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial kepada anggota KUBE yang akan menerima bantuan, lalu pencairan dana langsung ke rekening masing-masing KUBE, setiap KUBE membelanjakan dana tersebut sesuai data yang ada di proposal, setelah itu usaha baru bisa dilaksanakan dan TKSK wajib membuat LPJ dari usaha tersebut yang akan diberikan kepada Dinas Sosial pada saat akhir tahun. Sedangkan proses pencairan dana, untuk KUBE 2016 itu bantuan yang diberikan berupa uang Rp.20.000.000,- yang langsung disetorkan ke rekening masing-

masing KUBE. Apabila dana sudah diterima ketua atau bendahara KUBE harus melaporkannya kepada pihak Dinas Sosial atau TKSK agar dapat Dinas Sosial data.

Kemudian pada tahap pembinaan atau pelatihan terkait KUBE yang dilakukan Dinas Sosial kepada TKSK maupun penerima KUBE, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁), beliau menjelaskan:

“Untuk pembinaan, karena TKSK bukan menangani tentang KUBE saja tapi semua PMKS biasanya sering ada pelatihan terkait PMKS baik itu dari kab. serang, Prov. Banten, maupun dari pusat (kementerian). Lalu untuk penerima KUBE ada pelatihan sebelum menerima bantuan, pelatihan ini berupa pelatihan usaha atau pelatihan pelaksanaan administratif usaha seperti apa, agar ada laporan dari usaha tersebut”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Dian Mardiani selaku Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), beliau mengatakan :

“Tentunya ada, untuk pembinaan TKSK itu setiap beberapan bulan sekali selalu ada pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten maupun instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk penerima KUBE sebelum dana diberikan kepada penerima masing-masing KUBE, dinas sosial memberikan pembekalan/pelatihan mengenai dunia wirausaha dan manajemen pelaksanaan usaha sederhana, agar KUBE tersebut melaksanakan usaha mereka dengan benar”. (Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Sedangkan pendamping KUBE, yaitu TKSK Pontang (I₂₋₁) dan TKSK Lebak Wangi (I₂₋₂) mengemukakan :

“Untuk pembekalan atau pembinaan terkait KUBE itu tidak pernah, namun kalo terkait PMKS itu sering diadakan oleh dinsos provinsi”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, Kamis, 8 Februari 2018).

“Untuk pembekalan atau pembinaan terkait KUBE itu tidak pernah, namun kalo terkait PMKS itu sering diadakan oleh dinsos provinsi”. (Wawancara dengan bapak Irfan Firdaus, Kamis, 8 Februari 2018).

Selanjutnya pendapat dari beberapa Ketua KUBE mengenai pembinaan atau pelatihan terkait KUBE, diantaranya menurut Ketua KUBE Wanayasa Mandiri (I₃₋₂), beliau mengatakan :

“Ada dulu sekali, pembekalannya seperti arahan jika ada bantuan usaha seperti ini harus menjalankan usahanya dengan benar agar usahanya tidak langsung bangkrut”. (Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Rabu, 20 Desember 2017).

Hal serupa juga dikemukakan oleh ketua KUBE Mutiara Bandeng (I₃₋₄), beliau mengemukakan :

“Ada, dulu saat diberi tahu kalo usaha ini akan diberi bantuan, ada pelatihan 2 hari di dindos dan itu 1 usaha perwakilannya 2 orang”. (Wawancara dengan Ibu Hamdanah, Kamis, 15 November 2017).

Lalu hal senada juga dijelaskan oleh ketua KUBE Jati Waringin (I₃₋₅), beliau menjelaskan :

“Ada, dulu ada pembekalan sekali saat awal tahun 2016. Jika tidak salah di kantor dinasny, kita diberi pelatihan tentang sistem usaha itu seperti apa, cara mengurus keuangannya bagaimana, seperti pengetahuan tentang berwirausaha”. (Wawancara dengan bapak M. Rafe’i, Rabu, 20 Desember 2017).

Dari beberapa informan (I₁₋₁, I₁₋₂, I₂₋₁, I₂₋₂, I₃₋₂, dan I₃₋₄) yang telah menjelaskan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembinaan atau pelatihan TKSK, karena TKSK bukan menangani tentang KUBE saja tapi semua PMKS biasanya setiap beberapan bulan sekali ada pembinaan, pelatihan atau seminar terkait PMKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten maupun instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk penerima KUBE sebelum dana diberikan kepada penerima masing-masing KUBE, dinas sosial memberikan pembekalan, pelatihan atau sosialisasi mengenai dunia wirausaha dan manajemen pelaksanaan usaha sederhana, agar KUBE tersebut melaksanakan usaha mereka dengan benar.

Dari data lapangan yang telah dijelaskan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan strategi yang telah dipilih Dinas Sosial pada program KUBE adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatur SDM pegawai Dinas Sosial ada dalam Peraturan Bupati Serang No. 7 Tahun 2012, untuk mengatur TKSK Dinas Sosial sudah memberikan tupoksi selaku TKSK PMKS yang tugas utamanya adalah

mendampingi PMKS yang akan menerima bantuan dan dalam mengatur SDM pada masing-masing KUBE, ketua KUBE memiliki caranya masing-masing.

2. Koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial dengan TKSK mengalami kendala, karena adanya beberapa TKSK yang sering mengganti nomor telepon. Selain itu TKSK dalam menjalankan tugasnya harus melapor ke Dinas Sosial dengan langsung datang ke Dinas Sosial, melalui telepon atau dalam bentuk laporan. Untuk koordinasi yang terjalin antara ketua KUBE dengan Dinas Sosial maupun TKSK tidak berjalan dengan baik, ada TKSK yang tidak koordinasi dengan ketua KUBE melainkan kepada pihak desa.
3. Untuk pengaturan dana, Dinas Sosial melihat terlebih dahulu anggaran yang disediakan daerah (Kabupaten Serang) untuk program KUBE setiap tahunnya. Sedangkan untuk pengaturan dana di masing-masing KUBE berbeda-beda tergantung pada pelaksanaan usaha.
4. Struktur kerja yang ada pada Dinas Sosial yaitu ; 1 penanggung jawab program KUBE, dibantu 1 tenaga fungsional untuk administratif, dan 1 kepala bidang penanganan fakir miskin yang merasa kekurangan SDM sehingga antar pegawai saling membantu dalam kegiatan

yang ada. Struktur kerja pendamping KUBE, setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang itu memiliki 1 TKSK. Serta struktur kerja untuk KUBE menggunakan struktur kerja organisasi sederhana (ketua, sekretaris, bendahara dan anggota) yang terdiri dari 10 orang per KUBE.

5. Pembagian tugas program KUBE dibuat oleh kasi penanganan fakir miskin perdesaan sebagai penanggung jawab program dibantu tenaga fungsional. Pembagian tugas pendamping KUBE, TKSK langsung mengatur jadwal apabila ditugaskan oleh Dinas Sosial terkait KUBE atau PMKS lain, setelah itu TKSK koordinasi dengan pihak desa terkait tugas tersebut. Sedangkan untuk pembagian tugas KUBE, masing-masing KUBE memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda, karena jenis usahanya pun berbeda.
6. Kebijakan yang dipakai Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE ialah Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2015 tentang KUBE, dan untuk pelaksanaan tugas Dinas Sosial ialah Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang.

7. Untuk waktu pelaksanaan program KUBE, dari pengajuan proposal sampai pencairan dana kurun waktu 4 sampai 6 bulan. Kemudian untuk pelaksanaan dari awal proses pendampingan KUBE diantaranya : TKSK membantu mengajukan proposal, proposal diseleksi dan verifikasi oleh dinas sosial, melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada penerima KUBE, pencairan dana langsung ke rekening KUBE, setiap KUBE membelanjakan dana sesuai data yang ada di proposal, lalu pelaksanaan usaha dan terakhir TKSK wajib membuat LPJ usaha yang diberikan kepada Dinas Sosial pada akhir tahun. Sedangkan proses pencairan dana, untuk KUBE 2016 itu bantuan yang diberikan berupa uang Rp.20.000.000,- yang langsung disetorkan ke rekening masing-masing KUBE.
8. Untuk pembinaan/pelatihan TKSK, setiap beberapa bulan ada pembinaan, pelatihan atau seminar terkait PMKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten maupun instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk penerima KUBE sebelum dana diberikan, Dinas Sosial memberikan pembekalan, pelatihan atau sosialisasi tentang manajemen pelaksanaan usaha sederhana.

4.3.4 Evaluasi

Evaluasi adalah melakukan umpan balik (*feed back*), apakah strategi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seberapa jauh pelaksanaan strategi itu mencapai tujuan. Sehingga, evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah strategi itu berjalan dengan baik ataukah banyak terjadi kesenjangan atau penyimpangan. Dinas Sosial dalam melakukan evaluasi terhadap program KUBE juga mengacu pada beberapa tahapan evaluasi, diantaranya ; mekanisme evaluasi, pihak yang terlibat dalam evaluasi, bentuk evaluasi, dan hasil dari evaluasi tersebut. Pada tahanan mekanisme evaluasi Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan (I₁₋₁), beliau menjelaskan:

“Mekanisme evaluasi, kita melakukan evaluasi di akhir tahun dengan menerima laporan dari TKSK, dan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha KUBE tersebut”. (Wawancara dengan Bapak H. Yayat Sutiana, SE, Senin 13 November 2017).

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Betty Rubiyati S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan :

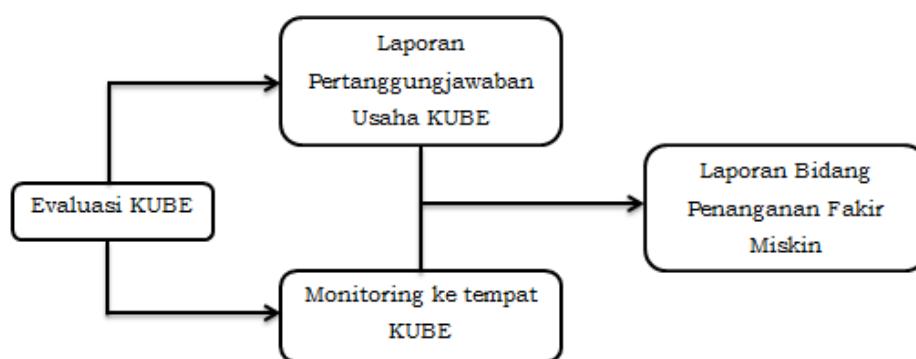
“Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir tahun, agar awal tahun berikutnya laporan pertanggung jawaban sudah selesai. Mekanisme evaluasi kita mendatangi KUBE yang telah diberikan bantuan untuk mengetahui apakah ada perkembangan usaha setelah diberikan bantuan oleh dinsos. Selain itu evaluasi juga kita lihat dari laporan yang dibuat oleh masing-masing TKSK”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Selanjutnya hal ini pun dipertegas oleh Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), beliau mengatakan :

“Mekanisme evaluasi KUBE diadakan saat triwulan ke 3, yaitu pada akhir tahun berjalan. Kami mendatangi tempat usaha KUBE tersebut, selanjutnya pak yayat sebagai penanggung jawab KUBE melakukan evaluasi”. (Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Selanjutnya setelah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai mekanisme evaluasi KUBE 2016 diatas, gambaran mengenai proses mekanisme evaluasi yang terjadi pada pelaksanaan KUBE 2016 dapat dilihat pada gambat di bawah ini :

Gambar 4.8
Mekanisme Evaluasi



(Sumber : Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2018)

Dari gambar 4.8 di atas, dapat dijelaskan bahwa evaluasi KUBE dilihat dari laporan usaha yang dibuat oleh masing-masing pendamping KUBE dan laporan monitoring yang dilakukan oleh Dinas

Sosial. Setelah melihat LPJ usaha dan melakukan monitoring tersebut, Dinas Sosial akan membuat hasil evaluasi pelaksanaan KUBE dalam satu tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut dalam bentuk Laporan Bidang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2016.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh (I₁₋₁ - I₁₋₃) diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mekanisme evaluasi diadakan pada saat triwulan ketiga, yaitu pada akhir tahun berjalan. Dengan mendatangi KUBE yang telah diberikan bantuan untuk mengetahui apakah ada perkembangan usaha setelah diberikan bantuan oleh Dinas Sosial. Selain itu evaluasi juga dilihat dari laporan yang dibuat oleh masing-masing TKSK. Kemudian Dinas Sosial pada saat evaluasi ke lapangan juga mewawancarai beberapa anggota KUBE, seperti yang dikemukakan oleh Ketua KUBE Dua Putra (I₃₋₃), beliau mengemukakan :

“Seingat saya saat itu menanyakan apa saja yang dibeli oleh KUBE ini, mengingatkan bahwa struk pembelian jangan lupa diberikan ke pendamping desa untuk laporan, lalu memfoto tempat usaha dan peralatannya, sudah hanya itu karena tidak lama juga datangnya”. (Wawancara dengan Bapak Sopian Yasa D, Selasa, 28 November 2017).

Hal tersebut juga serupa dengan Ketua KUBE Wanayasa Mandiri (I₃₋₂), beliau mengatakan :

“Dinsos melakukan evaluasi dulu ada 3 bulan sekali, jadi dalam setahun itu sudah 4-3 kali ke sini untuk survey, monitoring, dan evaluasi. Saat itu mereka mengecek peralatan usahanya bagaimana, menanyakan kendala yang ada dalam pelaksanaan usaha ini, ada kemajuan pendapatan tidak untuk anggota-anggotanya”. (Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Rabu, 20 Desember 2017).

Selanjutnya hal ini pun dipertegas oleh Kepala Desa Kencana Harapan (I₄₋₂), beliau mengatakan :

“Mereka saat datang ke kantor desa terlebih dahulu, lalu bersama-sama mendatangi tempat usaha. Lalu mereka menanyakan tentang pelaksanaan usaha, keuntungan dari usaha dan kendala yang usaha rasakan. Mereka juga mengingatkan pihak desa untuk sering-sering memonitoring usaha untuk laporan ke dinsos. Mereka jika kesini 1 mobil rombongan saya lupa siapa-siapanya karena sudah lama”. (Wawancara dengan Bapak H. Suwandi, Rabu, 20 Desember 2017).

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh (I₁₋₁, I₁₋₂, I₁₋₃, I₃₋₂, I₃₋₃, dan I₄₋₂) diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mekanisme evaluasi program KUBE diadakan saat triwulan ke tiga, yaitu pada akhir tahun berjalan. Dinas Sosial menerima LPJ usaha KUBE dari TKSK, dan melakukan monitoring ke tempat usaha KUBE tersebut. Selanjutnya kasi penanganan fakir miskin perdesaan sebagai penanggung jawab KUBE melakukan evaluasi (melakukan wawancara dengan anggota KUBE terkait kendala yang ada dalam pelaksanaan usaha dan kemajuan/keuntungan dari usaha untuk anggota-anggotanya, serta mengecek peralatan

usaha). Dinas Sosial juga mengingatkan pihak desa untuk sering-sering memonitoring usaha untuk laporan ke Dinas Sosial.

Adapun beberapa pegawai atau pihak dari Dinas Sosial maupun pendamping KUBE serta perwakilan desa yang terlibat dalam evaluasi tersebut, hal ini dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), sebagai berikut :

“Pihak yang terlibat dalam evaluasi ini, ialah bidang penanganan fakir miskin sebagai penanggung jawab program dan saya sebagai kepala sub program dan evaluasi”. (Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Selain itu pendamping KUBE yaitu TKSK Lebak Wangi (I₂₋₂), beliau mengatakan :

“Untuk pihak yang terlibat dalam evaluasi tentunya saya dan perwakilan desa mendampingi pihak dinsos (pihak-pihak yang berhubungan dengan program KUBE) dalam melakukan monitoring dan evaluasi tersebut”. (Wawancara dengan bapak Irfan Firdaus, Kamis, 8 Februari 2018).

Hal tersebut dikatakan pula oleh Ketua KUBE Jati Waringin (I_{3.5}), beliau mengatakan :

“Untuk siapa yang datang saya kurang tahu karena beberapa orang yang datang. Sebelum orang dinsos datang, kami diberitahu oleh pendamping KUBE jika ada orang dinas yang ingin kesini untuk melihat-lihat bebek”. (Wawancara dengan bapak M. Rafe'i, Rabu, 20 Desember 2017).

Dari berbagai pernyataan (I₁₋₂ , I₂₋₂, dan I₃₋₅) diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam evaluasi di lapangan diantaranya; kasi penanganan fakir miskin perdesaan, kabiid penanganan fakir miskin, dan kasub bag program dan evaluasi. Serta pendamping KUBE dan perwakilan desa mendampingi pihak dinsos dalam melakukan evaluasi di lapangan tersebut. Kemudian pada bentuk evaluasi program KUBE, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan :

“Bentuk dari evaluasi KUBE itu dokumentasi lapangan pada saat evaluasi lapangan, dan laporan dari TKSK”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Selanjutnya hal ini pun dipertegas oleh Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), beliau mengatakan :

“Bentuk evaluasi program KUBE ini berupa laporan yang diberikan dari masing-masing TKSK yang diberikan kepada bidang penanganan fakir miskin”. (Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Hal serupa juga dikatakan oleh pendamping KUBE TKSK Pontang (I₂₋₁), beliau menjelaskan :

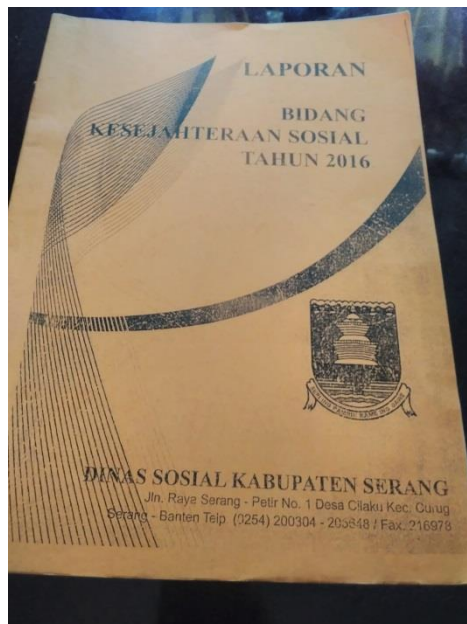
“Bentuk evaluasinya ialah LPJ usaha KUBE, dibuat dari kwitansi pembelanjaan, karena itu saat pembelanjaan peralatan usaha KUBE para TKSK mendampingi. Karena jika mengandalkan anggota kube tidak akan dibuat LPJnya”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, Kamis, 8 Februari 2018).

Kemudian Ketua KUBE Mutiara Bandeng (I₃₋₄), beliau mengatakan :

“Bentuk evaluasinya berupa laporan yang dibuat pendamping KUBE dan saya, dalam laporan itu terdiri perkembangan usaha, dana atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan usaha, dan keuntungan bagi anggota KUBE. Di laporan itu juga ada foto-foto usaha KUBE ini”. (Wawancara dengan Ibu Hamdanah, Kamis, 15 November 2017).

Bentuk Laporan Evaluasi program KUBE ini berupa Laporan Bidang Penanganan Fakir Miskin seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.9
Bentuk LPJ Bidang Penanganan Fakir Miskin 2016



(Sumber : Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Pada gambar 4.9 di atas merupakan Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang, yaitu bidang yang menangani program KUBE di Kabupaten Serang. Pada laporan pertanggung jawaban tersebut ada hasil dari evaluasi pelaksanaan program KUBE yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Dimana dari isi laporan tersebut peneliti dapat melihat data secara lengkap mengenai anggota-anggota KUBE yang menerima bantuan usaha, mengetahui evaluasi terhadap target dan pencapaian sasaran program KUBE pada tahun 2016, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan KUBE tersebut. Sehingga dari data-data tersebut peneliti dapat membaca apakah strategi yang digunakan Dinas Sosial pada program KUBE 2016 ini berjalan dengan sesuai atau tidak.

Selanjutnya penjelasan mengenai bentuk evaluasi KUBE yang telah dijelaskan dari (I₁₋₃, I₁₋₂, I₂₋₁, dan I₃₋₄) di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk evaluasinya ialah berupa LPJ usaha KUBE (didalamnya terdapat lampiran-lampiran kwitansi pembelanjaan, foto barang-barang perlengkapan usaha, dan foto pelaksanaan usaha) yang diberikan oleh pendamping KUBE, dan dokumentasi lapangan pada saat evaluasi di lapangan. Kedua data tersebut akan dibuat dalam bentuk Laporan akhir Bidang Penanganan Fakir Miskin yang didalamnya berisi : latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, evaluasi terhadap pencapaian sasaran, evaluasi kinerja program/kegiatan dan realisasi anggaran, permasalahan dan hambatan,

pemecahan masalah, serta lampiran berupa data-data nama KUBE, dan nama-nama anggota KUBE.

Tahapan terakhir pada indikator evaluasi ialah hasil dari evaluasi program KUBE, dari hasil evaluasi tersebut akan dilihat apakah pelaksanaan KUBE dalam satu tahun tersebut berhasil atau tidak. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₂), sebagai berikut :

“Hasil dari evaluasi program KUBE ini dalam bentuk laporan pertanggungjawaban bidang penanganan fakir miskin yang diberikan kepada sub program dan evaluasi, dan nantinya saya akan melihat dari laporan tersebut apakah pelaksanaan KUBE dalam tahun berjalan tersebut dapat dikatakan berhasil, kurang atau tidak berhasil”. (Wawancara dengan Ibu Dian Mardiani, Senin 2 Februari 2018).

Hal ini juga senada dengan pernyataan Ibu Betty Rubiyati, S selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang (I₁₋₃), beliau mengatakan :

“Hasil dari evaluasi ini akan dibuat dalam laporan pertanggung jawaban bidang penanganan fakir miskin kepada dinas sosial”. (Wawancara dengan Ibu Betty Rubiyati S, Senin 13 November 2017).

Hal serupa juga dikatakan oleh pendamping KUBE TKSK Pontang (I₂₋₁), beliau menjelaskan :

“Hasil dari evaluasi lapangan yang dilakukan dinsos akan dimasukkan ke dalam LPJ bidang yang menangani program

KUBE ini”. (Wawancara dengan Ibu Iis Isrofiah, Kamis, 8 Februari 2018).

Dari berbagai pernyataan (I₁₋₂ , I₁₋₃, dan I₂₋₁) diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil dari evaluasi program KUBE ialah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban bidang penanganan fakir miskin yang diberikan kepada sub program dan evaluasi. Laporan tersebut nantinya oleh sub program dan evaluasi akan dinilai apakah pelaksanaan KUBE dalam tahun berjalan tersebut dapat dikatakan berhasil, kurang atau tidak berhasil. Berikut *outcome* hasil dari evaluasi program KUBE Tahun 2016 :

Gambar 4.10
Target dan Capaian Kinerja Pemberdayaan Fakir Miskin
Tahun 2016

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Output		
	Uraian	Target	Realisasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaan	40 orang PRSE dan Kecamatan Petir dan KIBIN dan pemberian bantuan alat dan bahan usaha tata boga	40 orang PRSE dan Kecamatan Petir dan KIBIN dan pemberian bantuan alat dan bahan usaha tata boga
b. Fasilitas manajemen usaha	Terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen berusaha kepada KUBE dan pemberian bantuan usaha	20 KUBE dan pemberian bantuan usaha berupa: Ternak Kambing 6 kel., Alat Perbengkelan 4 kel., penyewaan papan selancar 1 kel., jasa pesta 11 kel., jasa mesin traktor 1 kel., ternak bebek 2 kel., tabung gas 1 kel., budidaya jamur 1 kel., pengelolaan bontot dan dendeng 3 kel., dan pedagang makanan&minuman 1 kel., Serta pelatihan dan bantuan usaha ternak lele untuk 3 KUBE	20 KUBE dan pemberian bantuan usaha berupa: Ternak Kambing 6 kel., Alat Perbengkelan 4 kel., penyewaan papan selancar 1 kel., jasa pesta 11 kel., jasa mesin traktor 1 kel., ternak bebek 2 kel., tabung gas 1 kel., budidaya jamur 1 kel., pengelolaan bontot dan dendeng 3 kel., dan pedagang makanan&minuman 1 kel., Serta pelatihan dan bantuan usaha ternak lele untuk 3 KUBE
c. Pengadaan Serana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	sosialisasi dan pemberian bahan/material bangunan untuk Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH)	20 KK (20 Rumah di Kec. Pabuaran, Ciomas, Baroz, Paderincang, Cinangka, Mancak, Gunung Sari)	20 KK (20 Rumah di Kec. Pabuaran, Ciomas, Baroz, Paderincang, Cinangka, Mancak, Gunung Sari)
d. Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan bidang pertukangan bagi PMKS	20 orang fakir miskin dan pemberian bantuan alat pertukangan kayu	20 orang fakir miskin dan pemberian bantuan alat pertukangan kayu

(Sumber : Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Dari gambar 4.10 di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan KUBE tercapai. Selain itu terdapat output dari hasil evaluasi program KUBE Tahun 2016 seperti pada gambar 4.10 dibawah ini :

Gambar 4.11
Target dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Pemberdayaan
Fakir Miskin Tahun 2016

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Output			
	Uraian	Target	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan Tata Boga	89,963,000	89,743,000	99.76
b. Fasilitas manajemen usaha	Terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen berusaha kepada KUBE dan pemberian bantuan usaha	352,190,000	351,286,000	99.74
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	sosialisasi dan pemberian bahan/material bangunan untuk Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH)	254,875,000	239,875,000	94,11
d. Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya kegiatan pelatihan pertukangan kayu	122,175,000	122,175,000	100.00

(Sumber : Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2017)

Selanjutnya dalam hal hasil evaluasi ini peneliti membuat capaian hasil program KUBE 2016 ini yang peneliti dapatkan pada saat di lapangan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4

Persentase Keberhasilan KUBE Tahun 2016

KUBE	Status KUBE			
	Berkembang	Tetap	Bangkrut	Total
Jumlah	10	13	12	35
Persentase	28,57 %	37,14%	34,29%	100%

(Sumber : Peneliti, 2018)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa keberhasilan KUBE Tahun 2016 sebesar 65,71%, hal ini dapat dilihat dari status usaha KUBE yang sampai sekarang berkembang sebesar 28,57% dan yang tetap sebesar 27,14%. Kemudian untuk usaha yang sudah hilang atau bangkrut sebesar 34,29%. Peneliti menggolongkan keberhasilan usaha menjadi tiga yaitu : berkembang, tetap, dan bangkrut. Dimana usaha berkembang ialah KUBE yang usahanya sampai sekarang mengalami perkembangan, baik dalam hal jumlah anggota, keuntungan, dan jenis usahanya. Kemudian usaha tetap ialah dimana KUBE yang usahanya dari mulai diberi bantuan pada tahun 2016 sampai sekarang awal 2018 tidak memiliki perkembangan karena beberapa faktor, seperti : tidak memiliki keuntungan, jumlah usahanya masih sama sejak awal dibentuk, dan jumlah anggota yang berkurang. Sedangkan usaha bangkrut ialah KUBE yang usahanya pada saat peneliti ke lapangan sudah tidak ada, hal ini pun ada beberapa faktor

yang menyebabkannya, seperti : para anggota yang tidak konsisten dalam menjalankan usaha, modal usaha yang dibagi-bagikan ke anggota bukan dijalankan bersama, serta faktor eksternal lainnya.

Dari data lapangan yang telah dijelaskan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam melakukan umpan balik evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah strategi itu berjalan dengan baik ataukah banyak terjadi kesenjangan atau penyimpangan pada program KUBE Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme evaluasi program KUBE diadakan saat triwulan ke tiga (akhir tahun berjalan). Dinas Sosial menerima LPJ usaha KUBE dari TKSK, dan melakukan monitoring ke tempat usaha KUBE. Dinas Sosial juga mengingatkan pihak desa untuk sering-sering memonitoring usaha untuk laporan ke Dinas Sosial.
2. Pihak yang terlibat dalam evaluasi di lapangan diantaranya; kasi penanganan fakir miskin perdesaan, kabid penanganan fakir miskin, dan kasub bag program dan evaluasi. Serta pendamping KUBE dan perwakilan desa mendampingi pihak dinsos dalam melakukan evaluasi di lapangan tersebut.
3. Bentuk evaluasi KUBE ialah LPJ usaha KUBE yang diberikan oleh pendamping KUBE, dan dokumentasi lapangan pada saat evaluasi di lapangan. Kedua data tersebut akan dibuat dalam bentuk Laporan akhir Bidang Penanganan Fakir Miskin.

4. Hasil dari evaluasi program KUBE dalam bentuk laporan pertanggungjawaban bidang penanganan fakir miskin yang diberikan kepada sub program dan evaluasi. Laporan tersebut nantinya oleh sub program dan evaluasi akan dinilai apakah pelaksanaan KUBE dalam tahun berjalan tersebut dapat dikatakan berhasil, kurang atau tidak berhasil.

4.4 Pembahasan

Dari pemaparan pada deskripsi hasil lapangan di atas mengenai gambaran umum Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang. Dari teori yang peneliti gunakan serta berdasarkan temuan lapangan yang ditemukan oleh peneliti bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di Kabupate Serang saat ini masih belum optimal. Sehingga pada dasarnya masih mengalami permasalahan atau kendala yang cukup kompleks dan perlu analisis yang lebih mendalam.

Permasalahan yang kompleks dalam melakukan pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Serang, sehingga dalam identifikasi masalah peneliti mengamati masih mengidentifikasi, diantaranya : motivasi usaha yang dimiliki kelompok usaha tidak konsisten, kurangnya pengawas atau SDM di Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam menjalankan program KUBE, permohonan proposal KUBE fakir miskin tidak sebanding dengan target yang

dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang setiap tahunnya, kurangnya pemahaman keluarga fakir miskin tentang cara membuat proposal bantuan kepada Dinas Sosial, dan kurangnya bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang kepada keluarga fakir miskin di Kabupaten Serang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu kiranya menganalisis lebih mendalam untuk menentukan manajemen strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan pemberdayaan fakir miskin. Dalam manajemen strategi akan dianalisis apa yang menjadi diagnosis, perumusan atau formulasi, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi sehingga dapat merumuskan manajemen strategi yang tepat. Adapun uraian indikator pembahasan pada penelitian ini menggunakan proses manajemen strategi dari William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch dalam Saladin (2003 : 4), yaitu :

4.4.1 Analisis dan Diagnosis

Analisis dan diagnosis merupakan indikator awal dari manajemen strategi, analisis dan diagnosis ini ditentukan dari perencanaan dan tujuan organisasi. Tujuan pemberdayaan sosial fakir miskin sesuai dengan visi dari Dinas Sosial Kabupaten Serang yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial menuju Masyarakat Kabupaten Serang yang Adil dan Berkualitas”. Selain itu juga diharapkan dapat menjadikan fakir miskin dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki pekerjaan dan pendapatan sehingga menjadikan fakir miskin sejahtera dan terbebas dari kemiskinan.

Program KUBE Fakir Miskin Tahun 2016 yang diadakan Dinas Sosial pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat Kabupaten Serang kedepannya, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang khususnya yang ada di daerah perdesaan, dengan cara memberikan bantuan usaha kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan. Namun pada penilaian keberhasilan dari program KUBE ini masih kurang baik dalam pelaksanaan, dimana sasaran keberhasilan dari program KUBE ini ialah dapat dilihat dari berapa jumlah KUBE yang masih berjalan pada saat evaluasi berlangsung dan usaha tersebut memberikan dampak positif kepada anggota KUBE.

Sedangkan yang kita tahu bahwa program KUBE memiliki tujuan jangka panjang yang menentukan apakah jumlah fakir miskin di Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan. Setelah peneliti melihat pada tahap tujuan yang baik namun sasaran keberhasilan yang kurang baik. Peneliti mulai menganalisis pada tahap perencanaan, dimana pada tahap ini perencanaan awal KUBE dibuat, dan analisis SWOT digunakan. Dalam melakukan perencanaan awal program KUBE, yang dilakukan Dinas Sosial ialah menyeleksi proposal usaha yang masuk, dan menghitung anggaran untuk pelaksanaan program. Setelah itu dibuat ke dalam bentuk laporan perencanaan yang diserahkan kepada bidang sub program dan evaluasi, untuk dilihat sesuai dengan rencana strategi

Dinas Sosial atau tidak. Dalam tahap perencanaan awal program KUBE ini, pendamping desa tidak dilibatkan.

Selain itu sebelum menentukan manajemen strategi apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan program KUBE, Dinas Sosial harus menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait pelaksanaan program KUBE tersebut. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal mengenai analisis SWOT tersebut, pada faktor kekuatan dimana Dinas Sosial memiliki usaha yang dilakukan dalam program KUBE yaitu; menyeleksi proposal, melakukan anggaran kerja, memberikan pelatihan usaha kepada anggota KUBE, mengawasi jalannya usaha, dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan usaha. Kemudian pada faktor kelemahan, Dinas Sosial memiliki kendala yang berasal dari internal organisasi yaitu kurangnya SDM yang dimiliki Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE, dan penyeleksian proposal lebih banyak daripada jumlah KUBE yang dianggarkan. Sedangkan pada faktor peluang Dinas Sosial pun memiliki dukungan yang didapatkan dalam program KUBE yaitu ; adanya pemberian dana bantuan sosial (bansos) setiap tahunnya dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Banten untuk KUBE, dan adanya fasilitas kendaraan dinas berupa motor yang diberikan Dinas Sosial Provinsi Banten kepada masing-masing TKSK. Akan tetapi pada faktor ancaman Dinas Sosial memiliki hambatan yang berasal dari eksternal organisasi, yaitu : kontak nomor yang

sering berganti-ganti membuat Dinas Sosial agak susah menghubungi TKSK, wilayah Kabupaten Serang yang luas dan kebanyakan memiliki akses jalan yang rusak atau sulit dilalui membuat proses ke lapangan menjadi lama, banyaknya jenis PMKS yang didampingi membuat TKSK sulit mengatur waktu pendampingan, susahnya mengatur atau menghubungi anggota KUBE yang mengakibatkan TKSK berkoordinasi dengan pihak desa, dan banyaknya KUBE yang berhenti berusaha karena modal atau tidak mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai analisis dan diagnosis Dinas Sosial dalam program KUBE ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses analisis dan diagnosis program KUBE Tahun 2016 dapat dikatakan berjalan kurang optimal. Hal ini terjadi karena penilaian keberhasilan dari program KUBE masih kurang baik dalam pelaksanaan, dimana sasaran keberhasilan dari program KUBE dilihat dari berapa jumlah KUBE yang masih berjalan pada hanya saat evaluasi berlangsung. Kemudian yang membuat perencanaan program hanya pegawai yang bertanggung jawab terhadap program KUBE saja. Dinas Sosial masih memiliki kendala yaitu : kurangnya SDM yang dimiliki dalam pelaksanaan KUBE, dan penyeleksian proposal lebih banyak daripada jumlah KUBE yang dianggarkan. Serta memiliki hambatan, yaitu: kontak nomor TKSK yang sering berganti-ganti, wilayah Kabupaten Serang yang luas dan kebanyakan memiliki akses

jalan yang rusak atau sulit dilalui, dan banyaknya KUBE yang berhenti berusaha karena modal atau tidak mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya dengan adanya proses analisis dan diagnosis ini maka terdapat *output* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu Dinas Sosial dapat membuat analisis sosial sesuai dengan hasil perencanaan yang dibuat dan hasil evaluasi kinerja program tahun sebelumnya karena dalam hasil evaluasi tersebut terdapat permasalahan dan hambatan yang dialami pada tahun sebelumnya. Sedangkan *outcome* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu Dinas Sosial dapat melakukan analisis sosial sebelum membuat strategi dan dapat membuat sasaran yang sesuai dengan rencana kerja dan tujuan program KUBE yang telah dibuat sebelumnya.

4.4.2 Perumusan/Formulasi

Perumusan atau formulasi merupakan indikator kedua dalam membuat manajemen strategi yang akan digunakan Dinas Sosial dalam melaksanakan program KUBE. Pada tahap perumusan atau formulasi ini, Dinas Sosial harus menentukan beberapa alternatif strategi guna memilih strategi yang handal, yang disesuaikan dengan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan organisasi yang sudah ditemukan pada tahun awal (analisis dan diagnosis). Dalam perumusan strategi pada program KUBE ini, strategi yang akan digunakan untuk pelaksanaan KUBE dibuat oleh bidang penanganan fakir miskin.

Selain itu strategi yang dibuat setiap tahunnya harus sesuai dengan rencana strategi (renstra) Dinas Sosial. Kemudian keputusan mengenai strategi mana yang akan digunakan dalam KUBE pertahunnya, ditentukan oleh penanggung jawab KUBE itu sendiri. Keputusan itu diambil setelah membuat analisis keuntungan dan kendala yang akan dihadapi di lapangan serta melihat karakteristik wilayah dan masyarakat yang akan menerima bantuan.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai perumusan atau formulasi strategi Dinas Sosial dalam program KUBE ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses analisis dan diagnosis program KUBE Tahun 2016 dapat dikatakan berjalan kurang optimal. Hal ini terjadi karena yang membuat alternatif strategi dalam pelaksanaan KUBE hanya bidang penanganan fakir miskin, dan keputusan mengenai strategi mana yang akan digunakan dalam KUBE pertahunnya, ditentukan oleh penanggung jawab KUBE itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya proses formulasi strategi ini maka terdapat *output* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu Dinas Sosial dapat menentukan strategi mana yang sesuai dengan karakteristik wilayah dalam pelaksanaan program KUBE pada tahun berjalan tersebut. Sedangkan *outcome* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu tingkat keberhasilan program KUBE tinggi karena permasalahan yang terjadi setiap tahunnya dapat berkurang.

4.4.3 Pelaksanaan/Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi merupakan indikator ketiga dari manajemen strategi dalam program KUBE. Pada tahap ini Dinas Sosial memikirkan bagaimana mengimplementasikan strategi yang telah dipilih berjalan sesuai dengan target dan tujuan program KUBE. Agar strategi tersebut berjalan dengan baik, perlu membangun struktur untuk mendukung strategi itu dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepat. Dinas Sosial dalam melaksanakan atau mengimplementasikan manajemen strategi yang telah ditentukan mengacu pada beberapa hal, diantaranya : Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana yang dimiliki Dinas Sosial serta KUBE pada program ini, struktur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan program dan usaha, pembagian tugas yang ada pada Dinas Sosial dan KUBE, kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan program KUBE, serta pelaksanaan administrasi yang ada pada program KUBE ini.

Dalam hal sumber daya manusia, untuk mengatur SDM pegawai Dinas Sosial terdapat dalam Peraturan Bupati Serang No. 7 Tahun 2012 sehingga untuk SDM bidang Penanganan Fakir Miskin sendiri tugas dan tanggung jawab kerjanya sudah ada dalam rencana kerja yang setiap tahunnya dibuat oleh bidang Penanganan Fakir Miskin. Kemudian untuk mengatur TKSK Dinas Sosial sudah memberikan tupoksi selaku TKSK PMKS yang tugas utamanya adalah mendampingi PMKS yang akan menerima bantuan. Sehingga TKSK

dalam melakukan pendampingan (KUBE khususnya) di mulai dari pembuatan proposal, pengajuan proposal, sosialisasi, pencairan dana, pembelanjaan dana, sampai akhir pembuatan LPJ yang diberikan kepada Dinas Sosial sebagai bentuk evaluasi usaha. Serta dalam mengatur SDM pada masing-masing KUBE, ketua KUBE memiliki caranya masing-masing, ada yang membebaskan anggotanya dalam menjalankan usaha mereka, ada yang mengikuti proses jalannya usaha sehingga tidak perlu mengatur anggota-anggotanya, ada pula yang mengatur tugas dari anggota KUBEnya.

Selanjutnya pada koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial dengan TKSK mengalami kendala, karena adanya beberapa TKSK yang sering mengganti nomor telepon sehingga pihak Dinas Sosial harus sering *update* kontak TKSK.. Selain itu TKSK dalam menjalankan tugasnya harus melapor ke Dinas Sosial dengan langsung datang ke Dinas Sosial, melalui telepon atau dalam bentuk laporan. Untuk koordinasi yang terjalin antara ketua KUBE dengan Dinas Sosial maupun TKSK tidak berjalan dengan baik, karena dari beberapa KUBE setelah pemberian dana tidak berkoordinasi lagi baik dengan Dinas Sosial maupun TKSK. Namun ada ketua KUBE yang sampai sekarang masih koordinasi dengan TKSK dan Dinas Sosial. Kemudian ada pula TKSK yang tidak koordinasi dengan ketua KUBE melainkan kepada pihak desa. Sedangkan untuk pengaturan dana dalam program KUBE ini, Dinas Sosial melihat terlebih dahulu anggaran yang

disediakan daerah (Kabupaten Serang) untuk program KUBE setiap tahunnya. Sedangkan untuk pengaturan dana di masing-masing KUBE berbeda-beda tergantung pada pelaksanaan usaha.

Hal lain dalam indikator implementasi ini ialah struktur kerja, dimana struktur kerja yang ada pada Dinas Sosial yaitu ; 1 penanggung jawab program KUBE, dibantu 1 tenaga fungsional untuk administratif, dan 1 kepala bidang penanganan fakir miskin yang merasa kekurangan SDM sehingga antar pegawai saling membantu dalam kegiatan yang ada. Struktur kerja pendamping KUBE, setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang itu memiliki 1 TKSK. Serta struktur kerja untuk KUBE menggunakan struktur kerja organisasi sederhana (ketua, sekretaris, bendahara dan anggota) yang terdiri dari 10 orang per KUBE. Lalu untuk pembagian tugas yang terjadi pada program KUBE, dimana pembagian tugas dibuat oleh kasi penanganan fakir miskin perdesaan sebagai penanggung jawab program dibantu tenaga fungsional. Pembagian tugas pendamping KUBE, TKSK langsung mengatur jadwal apabila ditugaskan oleh Dinas Sosial terkait KUBE atau PMKS lain, setelah itu TKSK koordinasi dengan pihak desa terkait tugas tersebut. Sedangkan untuk pembagian tugas KUBE, masing-masing KUBE memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda, karena jenis usahanya pun berbeda.

Dalam hal kebijakan, program KUBE ini memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya yaitu : Undang-Undang No. 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2015 tentang KUBE, dan untuk pelaksanaan tugas Dinas Sosial ialah Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang. Pada tahap administrasi program KUBE terbagi menjadi prosedur atau proses pelaksanaan kegiatan, dan pembinaan atau pelatihan yang terjadi pada program KUBE ini. Dimana untuk proses pelaksanaan, waktu pelaksanaan program KUBE dari pengajuan proposal sampai pencairan dana memiliki kurun waktu 4 sampai 6 bulan. Kemudian untuk pelaksanaan dari awal proses pendampingan KUBE diantaranya : TKSK membantu mengajukan proposal, proposal diseleksi dan verifikasi oleh dinas sosial, melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada penerima KUBE, pencairan dana langsung ke rekening KUBE, setiap KUBE membelanjakan dana sesuai data yang ada di proposal, lalu pelaksanaan usaha dan terakhir TKSK wajib membuat LPJ usaha yang diberikan kepada Dinas Sosial pada akhir tahun. Sedangkan proses pencairan dana, untuk KUBE 2016 itu bantuan yang diberikan berupa uang Rp.20.000.000,- yang langsung disetorkan ke rekening masing-masing KUBE. Kemudian pembinaan atau pelatihan yang ada pada program KUBE, untuk pembinaan/pelatihan TKSK, setiap beberapa bulan ada pembinaan, pelatihan atau seminar terkait PMKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten maupun instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk penerima KUBE sebelum dana diberikan, Dinas Sosial memberikan pembekalan, pelatihan atau sosialisasi tentang manajemen pelaksanaan usaha sederhana.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pelaksanaan atau implementasi strategi Dinas Sosial dalam program KUBE ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan atau implementasi strategi program KUBE Tahun 2016 dapat dikatakan berjalan kurang optimal. Hal ini terjadi karena koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial dengan TKSK masih mengalami kendala dan koordinasi yang terjalin antara ketua KUBE dengan Dinas Sosial maupun TKSK tidak berjalan dengan baik. Pengaturan dana setiap tahunnya tidak pasti. Pada struktur kerja kepala bidang penanganan fakir miskin merasa kekurangan SDM sehingga antar pegawai mengalami rangkap jabatan. Pelatihan terkait usaha KUBE hanya dilakukan satu kali sebelum pencairan dana. Waktu pelaksanaan program KUBE dari pengajuan proposal sampai laporan LPJ memerlukan waktu satu tahun lebih.

Selanjutnya dengan adanya proses implementasi strategi ini maka terdapat *output* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu Dinas Sosial dapat melaksanakan program KUBE ini sesuai dengan rencana strategi dan standar kinerja program yang dibuat. Sedangkan *outcome* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu koordinasi yang terjadi antara Dinas Sosial, TKSK dan pelaku KUBE dapat berjalan dengan baik karena

sudah adanya pembagian tugas masing-masing. Serta permasalahan dan hambatan di lapangan berkurang atau tidak ada.

4.4.4 Evaluasi

Evaluasi merupakan indikator terakhir dalam tahapan manajemen strategi yang ada pada program KUBE. Dimana dalam evaluasi ini melakukan umpan balik (*feed back*), untuk memastikan apakah strategi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seberapa jauh pelaksanaan strategi itu mencapai tujuan. Sehingga, evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah strategi itu berjalan dengan baik ataukah banyak terjadi kesenjangan atau penyimpangan. Pada tahap evaluasi ini Dinas Sosial mengacu pada beberapa hal, yaitu: mekanisme evaluasi, pihak yang terlibat dalam evaluasi, bentuk dari evaluasi tersebut, dan hasil yang didapat dari evaluasi itu.

Pada acuan awal yaitu mekanisme evaluasi program KUBE diadakan saat triwulan ke tiga (akhir tahun berjalan). Dinas Sosial menerima LPJ usaha KUBE dari TKSK, dan melakukan monitoring ke tempat usaha KUBE. Selanjutnya kasi penanganan fakir miskin perdesaan sebagai penanggung jawab KUBE melakukan evaluasi (melakukan wawancara dengan anggota KUBE terkait kendala yang ada dalam pelaksanaan usaha dan kemajuan/keuntungan dari usaha untuk anggota-anggotanya, serta mengecek peralatan usaha). Dinas Sosial juga mengingatkan pihak desa untuk sering-sering memonitoring usaha untuk laporan ke Dinas Sosial. Untuk pihak yang

terlibat dalam evaluasi di lapangan diantaranya; kepala seksi penanganan fakir miskin perdesaan, kepala bidang penanganan fakir miskin, dan kepala sub bagian program dan evaluasi. Serta pendamping KUBE dan perwakilan desa mendampingi pihak dinsos dalam melakukan evaluasi di lapangan tersebut.

Selanjutnya pada bentuk dari evaluasi program KUBE ialah LPJ usaha KUBE (didalamnya terdapat lampiran-lampiran kwitansi pembelanjaan, foto barang-barang perlengkapan usaha, dan foto pelaksanaan usaha) yang diberikan oleh pendamping KUBE, dan dokumentasi lapangan pada saat evaluasi di lapangan. Sedangkan untuk hasil dari evaluasi program KUBE yaitu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban bidang penanganan fakir miskin yang diberikan kepada sub program dan evaluasi. Laporan tersebut nantinya oleh sub program dan evaluasi akan dinilai apakah pelaksanaan KUBE dalam tahun berjalan tersebut dapat dikatakan berhasil, kurang atau tidak berhasil.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai evaluasi strategi Dinas Sosial dalam program KUBE ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses evaluasi strategi program KUBE Tahun 2016 dapat dikatakan berjalan cukup optimal. Hal ini terjadi karena mekanisme evaluasi program diadakan 1 kali saat akhir tahun berjalan, dengan menerima LPJ dari TKSK dan monitoring ke tempat KUBE. Hasil dari evaluasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban bidang

penanganan fakir miskin yang diberikan kepada sub program dan evaluasi.

Selanjutnya dengan adanya proses evaluasi strategi ini maka terdapat *output* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu Dinas Sosial dapat melihat hasil dari pelaksanaan program KUBE tahun itu, apakah sesuai dengan strategi yang dibuat, masih adakah permasalahan atau hambatan yang dialami serta dapat melihat tingkat keberhasilan program KUBE. Sedangkan *outcome* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu mekanisme evaluasi yang telah dibuat dalam manajemen strategi program KUBE dapat menjadi acuan standar evaluasi program.

Dengan demikian berdasarkan temuan lapangan dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan di atas, Manajemen Strategi yang dilakukan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang ialah membuat perencanaan dan penganggaran kerja program, melakukan sosialisasi terkait program KUBE kepada masyarakat miskin, penyeleksian proposal usaha sesuai dengan data basis terpadu, memberikan pelatihan usaha dan bantuan dana kepada penerima KUBE, memonitoring KUBE hanya setelah pemberian dana, berkoordinasi dengan TKSK terkait LPJ usaha KUBE, dan melakukan evaluasi pada akhir tahun. Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan pada program KUBE 2016, seperti : kurangnya SDM yang dimiliki dalam pelaksanaan KUBE, penyeleksian proposal lebih banyak daripada jumlah KUBE yang dianggarkan, kontak nomor TKSK yang sering berganti-ganti, wilayah

Kabupaten Serang yang luas dan kebanyakan memiliki akses jalan yang rusak atau sulit dilalui, dan banyaknya KUBE yang berhenti berusaha karena modal atau tidak mendapatkan keuntungan.

Sehingga dengan adanya Manajemen Strategi Program KUBE di Kabupaten Serang ini maka terdapat *output* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu usaha yang diberikan bantuan berjalan dengan baik dan masyarakat yang telah diberi bantuan berkembang (pekerjaan maupun pendapatan). Sedangkan *outcome* yang didapatkan Dinas Sosial yaitu meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin dan berkurangnya Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Serang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang secara umum berjalan kurang optimal, karena masih ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti : kurangnya SDM yang dimiliki dalam pelaksanaan KUBE, penyeleksian proposal lebih banyak daripada jumlah KUBE yang dianggarkan, kontak nomor TKSK yang sering berganti-ganti, wilayah Kabupaten Serang yang luas dan kebanyakan memiliki akses jalan yang rusak atau sulit dilalui, dan banyaknya KUBE yang berhenti berusaha karena modal atau tidak mendapatkan keuntungan.

Strategi yang dilakukan yaitu membuat perencanaan dan penggaran kerja program, melakukan sosialisasi terkait program KUBE kepada masyarakat miskin, penyeleksian proposal usaha sesuai dengan data basis terpadu, memberikan pelatihan usaha dan bantuan dana kepada penerima KUBE, memonitoring KUBE hanya setelah pemberian dana, berkoordinasi dengan TKSK terkait LPJ usaha KUBE, dan melakukan evaluasi pada akhir tahun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran dari hasil penelitiannya agar dapat membantu dalam penyelenggaraan pemberdayaan fakir miskin adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal perencanaan diharapkan peningkatan jumlah penerima KUBE agar dapat menjangkau lebih banyak KUBE, dan peningkatan koordinasi serta seleksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan KUBE agar pelaksanaan KUBE tepat sasaran dan waktu pelaksanaan.
2. Dalam hal formulasi diharapkan dapat mengoptimalkan analisis SWOT agar dalam pelaksanaan program tidak terjadi hambatan yang sama setiap tahunnya.
3. Dalam hal pelaksanaan diharapkan adanya penyusunan standar kinerja pegawai, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang ada, peningkatan bimbingan manajemen dan pemasaran KUBE, pemberian motivasi kepada para pelaku KUBE setelah pelaksanaan usaha berjalan, dan adanya pelatihan tentang penggunaan komputer agar anggota KUBE dapat menggunakan komputer dan membuat laporan usaha sendiri agar pelaksanaan KUBE tidak mengalami kendala.
4. Dalam hal evaluasi diharapkan melakukan monitoring yang rutin minimal 2 bulan sekali, hasil dari evaluasi dijadikan bahan dasar dalam menganalisis strategi yang akan digunakan di tahun selanjutnya agar strategi yang digunakan sesuai dengan keadaan masyarakat dan wilayah KUBE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Heene, Aime., Desmidt, Sebastian.,dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Tjiptoherijanto, Prijono. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal)*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Saladin, Djaslim. 2003. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Bandung : Linda Karya.
- Siagian, Sondang. 2007. *Manajemen Strategik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- _____. 2010. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial*. Bandung : STKS Press.

_____. 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung : CV Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.

Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama.

Peraturan Bupati Serang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Serang.

Selayang Pandang Dinas Sosial Kabupaten Serang 2014.

Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2016.

BPS Provinsi Banten. 2015. *Banten dalam Angka Banten In Figures 2015*. Banten : BPS Provinsi Banten.

BPS/Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Daerah Provinsi Banten 2016*. Banten : BPS Provinsi Banten.

Sumber Lain :

Amelia Rizky Octarina. 2016. Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Ari Hardiawan. 2015. Efektifitas Program Pembinaan Dinas Sosial pada Wanita Pekerja Seks di Kota Cilegon. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

www.banten.bps.go.id

www.worldbank.org